



KEBIJAKAN



KEBIJAKAN - Vol. 2 No. 1, DESEMBER 2018



| | | | | | |
|-----------|--------|-------|-------------|-----------------------------------|---------------------|
| KEBIJAKAN | Vol. 2 | No. 1 | Hal. 1 - 72 | Pematangsiantar, Desember 2018 | ISSN 2599 - 1744 |
|-----------|--------|-------|-------------|-----------------------------------|---------------------|



KEBIJAKAN

VOL. 2 NO. 1, Desember 2018

SUSUNAN REDAKSI

| | |
|-----------------------|---|
| Penanggung Jawab | Walikota Pematangsiantar |
| Pimpinan Redaksi | Robert Tua Siregar, Ph.D |
| Anggota Dewan Redaksi | Dr. Pinondang Nainggolan, SE, M.Si Dr. Marto Silalahi, M.Si Dr. Marisi Butarbutar, SE, MM Jonni Sitorus, ST, M.Pd Binsar Tison Gultom, S.Pd, M.Sc |
| Penyunting | Arolina Sidauruk, SH, M.Si (BAPPEDA Kota Pematangsiantar) Ivan D. Silitonga, SE (BAPPEDA Kota Pematangsiantar) Deswidya Sukrisna Hutauruk, S.Pd, M.Si (Universitas Efarina) Chintani Sihombing, S.Pd, M.Pd (Universitas Efarina) |

Mitra Bebestari Vol. 2 No. 1, Desember 2018

Prof. Dr. Sanggam Siahaan, M.Hum (Universitas HKBP Nommensen)
Dr. Chandra Situmeang, SE, MSM, M.Pd, Ak, CA (Universitas Negeri Medan)
Ervina Sectioresti Sigalingging, S.Psi, M.Psi (Universitas Pelita Harapan)
Dian Perayanti Sinaga, S.Si, M.Sc (Universitas Simalungun)

Porman Juanda Marporami Mahulae, ST (Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara)
Dumora Jenny Margaretha Siagian, ST (Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara)

Alamat Redaksi :

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pematangsiantar
Jl. Merdeka No. 4 Pematangsiantar
Tel/Fax . (0622) 27919
Website : www.pematangsiantarkota.go.id
Email : kebijakan.bappeda@gmail.com

Kebijakan adalah jurnal yang diterbitkan oleh Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pematangsiantar yang berisikan karya tulis ilmiah dalam berbagai bidang untuk memberikan referensi/input dalam pengambilan kebijakan di Kota Pematangsiantar. Kebijakan terbit enam bulan sekali dalam satu tahun yakni bulan Juni dan Desember. Kebijakan pertama kali terbit Desember 2017 dengan Nomor ISSN 2599-1744 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Pusat Nasional ISSN No : 0005.25991744/JI.3.1/SK.ISSN/2017.12 tanggal 7 Desember 2017



KEBIJAKAN

VOL. 2 NO. 1, Desember 2018

PENGANTAR REDAKSI

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan perkenanNya, Jurnal Kebijakan pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pematangsiantar Vol. 2 No. 1, Desember Tahun 2018 ini dapat diterbitkan. Jurnal Kebijakan ini memuat hasil penelitian dan pengkajian dari para akademisi perguruan tinggi, peneliti dan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ada di Kota Pematangsiantar.

Dalam penerbitan Volume 2 (dua), Nomor 1 (satu), Desember 2018 ini redaksi menyajikan 7 (tujuh) karya tulis ilmiah yang membahas Penerapan Pendekatan Ilmiah (*Scientific Approach*) dalam Pembelajaran Bahasa Inggris di Tingkat SMP Kota Pematangsiantar, Manajemen Pengelolaan Sampah di Kota Pematangsiantar, Analisis Keberadaan Ruang Terbuka Publik terhadap Peningkatan Ekonomi Masyarakat di Kota Pematangsiantar, Efisiensi dan Dampak Transportasi Online terhadap Kesempatan Kerja, Pendapatan dan Kebijakan Kota Pematangsiantar, Disparitas Kualitas Pelayanan antara Becak Siantar dan Go-Jek dalam Pemenuhan Kebutuhan Masyarakat di Kota Pematangsiantar, Model Pengembangan Manajemen Pembangunan Kelurahan, serta Pengaruh dan Manfaat Penggunaan Kartu BPJS Kesehatan di Kalangan Masyarakat Khususnya di Kota Pematangsiantar. Karya Tulis Ilmiah tersebut dianggap layak untuk diterbitkan setelah mendapatkan masukan dan proses review dari Mitra Bebestari dan disetujui oleh Dewan Redaksi.

Diharapkan Karya Tulis Ilmiah yang dituangkan dalam Jurnal Kebijakan edisi kali ini mampu memberikan sumbangan pengetahuan dan wawasan baru bagi para pembuat keputusan di Pemerintah Kota Pematangsiantar. Redaksi mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu sehingga Jurnal Kebijakan ini dapat diterbitkan.

Semoga jurnal ini dapat memberikan tambahan informasi untuk peningkatan ilmu pengetahuan bagi para pembaca. Terimakasih.

Salam Redaksi



KEBIJAKAN

VOL. 2 NO. 1, Desember 2018

ISSN : 2599 - 1744

Lembar abstrak ini boleh diperbanyak/di-copy tanpa izin dan biaya

Sanggam Siahaan

Penerapan Pendekatan Ilmiah (*Scientific Approach*) Dalam Pembelajaran Bahasa Inggris Di Tingkat SMP Kota Pematangsiantar

KEBIJAKAN, Jurnal Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pematangsiantar, 2018, Vol. 2 No. 1. Halaman 1 - 10

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menetapkan proses pembelajaran yang diterapkan di sekolah harus berbasis pendekatan ilmiah (*scientific approach*). Hal ini merupakan sesuatu yang baru khususnya dalam pengajaran Bahasa Inggris sebagai bahasa asing. Sebagai sebuah trend baru dalam dunia pendidikan Indonesia, peneliti tertarik untuk menemukan pemahaman, penerapan, dan kendala yang dihadapi guru dalam menerapkan pendekatan ilmiah dalam pembelajaran bahasa Inggris di tingkat SMP Kota Pematangsiantar. Penelitian ini merupakan jenis studi kasus yang menerapkan metode analisa kualitatif. Dengan memanfaatkan observasi, open-ended questionnaire, dan dokumen sebagai teknik pengumpulan data, peneliti menemukan bahwa masih banyak guru yang tidak memahami secara utuh konsep dasar pendekatan ilmiah walaupun telah mengikuti pelatihan dari pemerintah. Proses pembelajaran berbagai kendala yang dihadapi guru di kelas terkait efisiensi waktu, kelengkapan peralatan belajar, maupun kesiapan siswa untuk belajar. Saran kepada kepala sekolah, stakeholder, dan pemerintah setempat agar dapat meminimalisir kesulitan yang dihadapi guru dalam penerapan pendekatan ilmiah sehingga dapat meningkatkan kualitas pendidikan sekolah yang nantinya mampu mewujudkan lahirnya generasi bangsa yang kreatif, aktif, inovatif, dan berkarakter.

Kata kunci : 5M, pendekatan ilmiah dan pembelajaran bahasa Inggris.

Ira Modifa

Manajemen Pengelolaan Sampah Di Kota Pematangsiantar

KEBIJAKAN, Jurnal Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pematangsiantar, 2018, Vol. 2 No. 1. Halaman 11 - 24

Sampah secara umum didefinisikan sebagai sisa kegiatan manusia sehari-hari dan/atau proses alam yang berbentuk padat maupun cairan. Sampah merupakan tempat kehidupan berbagai mikroorganisme penyebab penyakit dan juga sebagai media pemindah dan penyebar penyakit (vektor). Karenanya, sampah harus dikelola dengan baik agar tidak mengganggu atau mengancam kesehatan lingkungan dan masyarakat. Pengelolaan sampah seharusnya meliputi pengumpulan, pengangkutan sampai dengan pemusnahan atau pengolahan sampah sedemikian rupa sehingga sampah tidak lagi mengganggu kesehatan masyarakat dan lingkungan hidup. Pengelolaan sampah di Kota Pematangsiantar juga masih bertumpu pada pendekatan akhir (*end-of-pipe*), dimana sampah dikumpulkan, diangkut dan dibuang ke tempat pemrosesan akhir sampah (TPA). Kondisi TPA Tanjung Pinggir saat ini sudah dapat dikatakan memprihatinkan dan buruk secara lingkungan. Kajian ini dijalankan dengan mempelajari faktor – faktor penyebab dan pendukung tata kelola sampah di Kota Pematangsiantar kepada subjek atau pelaku langsung dari pengelolaan sampah Kota Pematangsiantar. Metode penelitian yang akan dilakukan terdiri dari metode kepustakaan (*library research*), studi lapangan (*field research*), studi kasus (*case research*), dan analisis SWOT pengelolaan sampah di Kota Pematangsiantar. Diharapkan dengan penelitian ini Pengelolaan sampah akan terintegrasi dan dapat menstimulasi kreativitas dan inovasi dari masyarakat sehingga meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan warga. Ditemukan potensi–potensi dan cara–cara inovatif lainnya untuk mendorong tata kelola sampah yang lebih baik dimasa yang akan datang sehingga Kota Pematangsiantar bisa mencapai salah satu kota dengan predikat Zero Waste City.

Kata kunci : sampah, 3R, kesadaran lingkungan, inovasi dan zero waste city

Pinondang Nainggolan

Analisis Keberadaan Ruang Terbuka Publik Terhadap Peningkatan Ekonomi Masyarakat Di Kota Pematangsiantar

KEBIJAKAN, Jurnal Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pematangsiantar, 2018, Vol. 2 No. 1. Halaman 25 - 38

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keberadaan ruang terbuka publik dan pengaruh ruang terbuka publik terhadap peningkatan ekonomi masyarakat di Kota Pematangsiantar dengan studi kasus pada RTP Lapangan H. Adsam Malik, RTP Taman Bunga/Lapangan Merdeka dan RTP Siantar Square. Jumlah sampel yang digunakan

sebanyak 90 orang yang terdiri dari 60 orang responden pedagang dan 30 orang responden pengunjung atau konsumen. Model yang digunakan untuk analisis data adalah metode deskriptif dan metode kuantitatif dengan persamaan regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan ruang terbuka publik Lapangan H. Adam Malik dan RTP Siantar Square belum tertata dengan baik, sehingga pengunjung kurang merasa puas. Sedangkan RTP Taman Bunga/Lapangan Merdeka sudah lebih baik. Keberadaan RTP pada tiga zona dapat meningkatkan ekonomi masyarakat. Jenis produk, waktu buka usaha setiap hari berpengaruh signifikan terhadap pendapatan masyarakat pengelola usaha kuliner, sedangkan lama pengalaman berusaha tidak signifikan. Pemerintah Kota Pematangsiantar perlu menerbitkan peraturan baru tentang penggunaan ruang terbuka, melakukan penataan ruang terbuka publik serta pembinaan terhadap para pedagang kuliner sehingga dapat lebih profesional dalam mengelola usaha sekaligus sebagai sumber utama penghasilan masyarakat.

Kata kunci : keberadaan ruang terbuka publik, aktivitas ekonomi dan pendapatan masyarakat.

Binsar Tison Gultom

Efisiensi Dan Dampak Transportasi Online Terhadap Kesempatan Kerja, Pendapatan Dan Kebijakan Kota Pematangsiantar

KEBIJAKAN, Jurnal Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pematangsiantar, 2018, Vol. 2 No. 1. Halaman 39 - 50

Munculnya transportasi online telah menjadi suatu fenomena baru saat ini hampir di seluruh kota di Indonesia termasuk Kota Pematangsiantar. Hal tersebut dikarenakan transportasi online mempunyai keunggulan baik dari segi biaya perjalanan, waktu tempuh perjalanan dan kemudahan untuk memperoleh akses pengemudi. Transportasi *online* memberikan dampak positif dengan mempermudah masyarakat Kota Pematangsiantar dalam mobilitas perjalanan, mengurangi pengeluaran masyarakat pada biaya transportasi, serta menambah lowongan pekerjaan bagi masyarakat Kota Pematangsiantar yang menganggur untuk bekerja sebagai pengemudi ojek online. Namun kehadiran transportasi online tersebut di Kota Pematangsiantar pada dasarnya mendapat penolakan dari pemilik transportasi konvensional yang sebelumnya telah ada sebelum kehadiran transportasi online. Untuk itulah sebagai sebuah trend baru dalam dunia transportasi Indonesia khususnya di Kota Pematangsiantar, peneliti tertarik untuk menemukan sejauhmana efisiensi dan dampak transportasi online terhadap kesempatan kerja, pendapatan dan kebijakan Kota Pematangsiantar. Penelitian ini merupakan penelitian yang menerapkan analisa kualitatif. Creswell (2012: 465) memaparkan bahwa penelitian studi kasus adalah untuk menjelaskan dan mengungkapkan kasus secara keseluruhan dan komprehensif. Pada dasarnya dari serangkaian studi dan analisa kehadiran transportasi online telah memberikan dampak yang positif dan memberikan kemudahan kepada masyarakat Kota Pematangsiantar. Transportasi online juga telah mengurangi tingkat pengangguran di masyarakat dan menambah pendapatan masyarakat di Kota Pematangsiantar. Oleh karena itulah diperlukan adanya kebijakan atau regulasi untuk mengatur keseluruhan transportasi konvensional dan transportasi

online sehingga saling terintegrasi dan dapat mengurangi konflik yang terjadi.

Kata kunci : transportasi online, transportasi konvensional, kesempatan kerja dan kebijakan

¹ Marisi Butarbutar ²Acai Sudirman, dan ³Efendi

Disparitas Kualitas Pelayanan Antara Becak Siantar Dan Go-Jek Dalam Pemenuhan Kebutuhan Masyarakat Di Kota Pematangsiantar

KEBIJAKAN, Jurnal Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pematangsiantar, 2018, Vol. 2 No. 1. Halaman 51 - 58

Munculnya transportasi *online* berbasis aplikasi seperti Go-Jek dan Grab dirasakan telah berdampak signifikan terhadap transportasi konvensional seperti Becak Siantar. Persaingan ini menimbulkan persepsi di masyarakat tentang disparitas dalam hal kualitas pelayanan yang ditawarkan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui gambaran disparitas kualitas pelayanan yang ditawarkan oleh Becak Siantar dan Go-Jek. Objek penelitian pada Becak Siantar dan Go-Jek. Metode penelitian menggunakan penelitian lapangan dan kepustakaan. Teknik pengumpulan data melalui observasi, dokumentasi dan wawancara dengan data yang bersifat kualitatif yang bersumber dari data primer dan sekunder. Teknik analisis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Disparitas kualitas pelayanan dapat digambarkan dari beberapa dimensi berupa *reability, responsiveness, competence, access, courtesy, communication, credibility, security, understanding or knowing the customer dan tangibles*. Untuk keseluruhan disparitas kualitas pelayanan transportasi Becak Siantar dan transportasi Go-Jek ditinjau dari beberapa dimensi masih belum optimal, sehingga dibutuhkan regulasi yang mewakili kedua transportasi serta perlu upaya yang konkret dari Pemerintah Kota Pematangsiantar dan Organisasi Perangkat Daerah terkait untuk mengoptimalkan keberadaan dari Becak Siantar dan Go-Jek. Disarankan bagi Pemerintah Kota Pematangsiantar sebaiknya merancang suatu sistem yang mengkolaborasikan pelayanan Becak Siantar dan Go-Jek sehingga tidak terjadi ketimpangan sosial antar kedua transportasi tersebut.

Kata kunci : disparitas, kualitas pelayanan dan transportasi

Marto Silalahi

Model Pengembangan Manajemen Pembangunan Kelurahan

KEBIJAKAN, Jurnal Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pematangsiantar, 2018, Vol. 2 No. 1. Halaman 59 - 64

Rencana kerja pemerintahan dan pembangunan adalah dokumen pemerintahan yang mengartikulasikan kebutuhan masyarakat kedalam program dan kegiatan pemerintahan. Kemampuan mengadministrasikan kebutuhan masyarakat menjadi modal besar mempercepat dan mempermudah tercapainya rencana kerja pemerintahan dan pembangunan. Kesesuaian data kebutuhan dan data sumber daya kewilayahan menjadi hasil atau output dari musyawarah pembangunan. Dimensi

skala prioritas menjadi saringan penting dalam menentukan program dan kegiatan yang bersesuaian dengan data dan informasi tersebut. Musyawarah pembangunan (musrenbang) menjadi dasar utama menerjemahkan kebutuhan dan harapan masyarakat kedalam program dan kegiatan pemerintahan dan pembangunan Kelurahan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif analitik berdasarkan kepada pendapat para ahli yang berkompeten. Dimana partisipasi masyarakat menjadi energi besar dalam mensukseskan keberhasilan pencapaian target atau tujuan pembangunan itu sendiri. Oleh karena itu penguatan sumber daya kelurahan baik optimalisasi kinerja pemerintahan kelurahan, keberdayaan organisasi kelurahan dan partisipasi pemangku kelurahan lainnya sangatlah penting dalam sinergisasi kinerja organisasi pemerintahan kelurahan dan keberdayaan masyarakat yang sesuai dengan harapan, tuntutan dan kebutuhan masyarakat kelurahan.

Kata kunci : manajemen pembangunan kelurahan dan partisipasi masyarakat

Arolina Sidauruk

Pengaruh Dan Manfaat Penggunaan Kartu BPJS Kesehatan Di Kalangan Masyarakat Khususnya Di Kota Pematangsiantar

KEBIJAKAN, Jurnal Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pematangsiantar, 2018, Vol. 2 No.1. Halaman 65 - 72

Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) merupakan badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. Sehingga dengan adanya jaminan sosial ini resiko keuangan yang dihadapi oleh seseorang diambil alih oleh lembaga yang menyelenggarakan jaminan sosial. Untuk itu diadakan suatu penelitian sederhana yang menyangkut kesehatan masyarakat. Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dan manfaat penggunaan kartu BPJS Kesehatan di kalangan masyarakat khususnya masyarakat Kota Pematangsiantar. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian ilmiah, yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti Meleong (1993). Instrumen penelitian menggunakan kuesioner dan melakukan wawancara. Jumlah sampel 80 orang responden. Hasil penelitian menunjukkan mayoritas menerima BPJS dengan minat baik sebanyak 35 responden (43,75%), yang berpendidikan SMA dan S1 sebanyak 22 responden (27,5%), yang bekerja sebagai PNS/Non PNS sebanyak 23 responden (28,75%), sumber informasi yang diperoleh dari petugas kesehatan 80 responden (100%). Berdasarkan hasil penelitian tersebut disarankan hendaknya masyarakat dapat meningkatkan kesehatan dengan ikut serta memanfaatkan program dan keberadaan BPJS yang mampu mempengaruhi dan membawa manfaat bagi masyarakat Kota Pematangsiantar.

Kata kunci : jaminan sosial, meningkatkan kesehatan, dan minat baik



KEBIJAKAN

VOL. 2 NO. 1, Desember 2018

ISSN : 2599 - 1744

Lembar abstrak ini boleh diperbanyak/di-copy tanpa izin dan biaya

Sanggam Siahaan

Implementation Of Scientific Approach In English Learning At Junior High Level In Pematangsiantar

KEBIJAKAN, Jurnal Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pematangsiantar, 2018, Vol. 2 No. 1. Halaman 1 - 10

Indonesian Government initiated by Ministry of Education and Culture decided that all learning process must be based on scientific approach. It is a newly – implemented policy especially in English learning as a foreign language. As a new change in Indonesian Education, researchers are interested in finding teachers' understanding, appropriate implementation and constraints on how teachers carry out scientific approach in English Learning at Junior High Level in Pematangsiantar. Case study is a tool to analyze the data. Applying observation, open-ended questionnaire and document analysis as data collection technics, researchers find that there are still a lot of teachers that do not understand basic concept of Scientific Approach thoroughly although they have had a series of training and coaching from the Ministry. Teachers are still dominant actor in learning process in a classroom. Students take a role as listeners and imitators as they learn only to fulfill teachers' expectation, and not their own. Scientific approach understanding and appropriate implementation in English Learning does not work synergically. Several teachers have good understanding on scientific approach with 5M procedure and yet implemented during learning process in the classrooms. This happens because there are various obstacles during the implementation of Scientific Approach in a classroom, for instance time efficiency, lack of learning materials and students' learning preparedness. Reducing the teachers' obstacles in implementing scientific approach in the classrooms is proposed to school heads, stakeholders and local governments. Therefore, education quality that comes from scientific approach learning process may create creative, innovative and specialized-character future generations.

Keywords : 5M, scientific approach and english learning

Ira Modifa

Waste Management In Pematangsiantar

KEBIJAKAN, Jurnal Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pematangsiantar, 2018, Vol. 2 No. 1. Halaman 11 - 24

Waste Management is defined as remains produced by human daily activities and/or natural process in the form of solid/compact and liquids. Waste is known as a life-home of microorganism that may cause some diseases and create a disease intermediary and vector. Therefore, waste has to be well-managed in order to not causing and threatening social sanitary measures. Waste Management in Pematangsiantar is still focusing on end-of-pipe, in which waste is collected, transported to and disposed in a landfill. Prerequisite of Tanjung Pinggir as a landfill is still concerning and disappointing. This study is trying to find causing and supporting factors directly from subjects and actors who deal with waste management in Pematangsiantar. Library research, field research, case study and SWOT are the methods applied in this study. This research is expected to produce an integrated waste management and to stimulate innovation and inspiration from society on how to manage waste properly. Consequently, social welfare and social sanitation is achievable target for waste management. Creative manner and innovation in dealing with waste hopefully could be identified in order to generate Pematangsiantar as a Zero Waste City.

Keywords : waste, 3R, environmental awareness, innovation and zero waste city

Pinondang Nainggolan

An Analysis In The Existence Of Public Sphere To Social Economic Growth In Pematangsiantar

KEBIJAKAN, Jurnal Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pematangsiantar, 2018, Vol. 2 No. 1. Halaman 25 - 38

The purpose of this research is to analyze the existence of Public Sphere and its influence to the growth of social economy in Pematangsiantar, with Haji Adam Malik, Taman Bunga/Merdeka and Siantar Square Public Sphere as case studies. There are 90 people as sample, consists of 60 traders and 30 visitors. Data analysis model applied in this research is descriptive and quantitative methods with double linier regression. The result of this research shows that the existence of Adam Malik and Siantar Square Public Sphere is not well-managed and as a result visitors have not yet been satisfied. However, Taman Bunga/Lapangan Merdeka Public Sphere is better than the other two mentioned earlier. The existence of public sphere in the three zones may increase social economy. Variety of products and opening hours significantly influence to the income of culinary business. On the other hand, business experience does not give significant influence. Pematangsiantar Local Government is required to enact new regulation regarding public sphere practices

and functions, well-managed public sphere and advancement of culinary business and trades. As a result, the policies may increase professionalism in management and generate income growth to the business sectors.

Keywords : existence public sphere, economic activity and people's income.

Binsar Tison Gultom

Online Transportation Efficiency And Impact On Job Opportunities, Incomes And Policies In Pematangsiantar

KEBIJAKAN, Jurnal Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pematangsiantar, 2018, Vol. 2 No. 1. Halaman 39 – 50

The emerge of online transportation is an interesting and actual event that occurs in every part of Indonesia particularly in Pematangsiantar. The reason behind the phenomenon is that online transportations have outstanding quality in terms of expenses, time endurance and easy access. Online transportation contributes to positive impact on providing people in Pematangsiantar an easy-travel mobility, reducing transportation cost and increasing job opportunities. Basically, online transportation had a rejection from the owners of conventional transportations, the existing regulated mode of public transportation. As a new trend in transportation industry, the researcher is interested to investigate online transportation's efficiency and impact on job opportunities, incomes and policies in Pematangsiantar. Qualitative Analysis is conducted during the research. Creswell (2012:465) stated that case study may be able to explain and reveal the case study comprehensively. Basically, a series of study and analysis on the emerge of online transportation conclude that online transportation may give positive impact and easy-accessed transportation to the people in Pematangsiantar. Online transportation is not only reducing unemployment rate but also increasing social income. Therefore, there is an immediate need to enact policies or regulations that are able to arrange both conventional and online transportation in order to get cross-integrated and reduce conflicts.

Keywords : online transportation, conventional transportation, job opportunities and policies

¹ Marisi Butarbutar, ² Acai Sudirman and ³ Efendi

Quality Disparity Between Siantar Pedicab And Go-Jek In Fulfilling Social Needs In Pematangsiantar

KEBIJAKAN, Jurnal Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pematangsiantar, 2018, Vol. 2 No. 1. Halaman 51 - 58

The emerge of online Transportation based on online application like Go-Jek and Grab give significant impact on conventional transportation such as Siantar pedicaps. The competition results quality disparity in service based on social perception between Siantar pedicaps and Go-Jek. The research objects are Siantar pedicaps and Go-Jek. Field research and Library research are implemented. Observation, documentation and interview are tools to get primary and secondary data. Qualitative Descriptive Analysis is undertaken. The disparity of service of quality might be described in several

dimensions such as realibility, responsiveness, competence, access, courtesy, communication, credibility, security, understanding or knowing the customer dan tangibles. The disparities in service quality between Siantar pedicaps and Go-jek in several aspects are yet optimum. As a result, several regulations represent both transportation modes need to be produced and Pematangsiantar Local Government has obligation to perform tangible actions, particularly government agencies that deal with transportation issues. A system designed not only to accommodate Siantar Pedicaps' and Go-Jek's interest but also to collaborate in terms of service.

Keywords : disparity, service quality and transportation

Marto Silalahi

The Model Of Village Management Development

KEBIJAKAN, Jurnal Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pematangsiantar, 2018, Vol. 2 No. 1. Halaman 59 - 64

Work plan design in governance and development is a formal government document that articulates society's needs into program and measure. The ability to manage the need of society is one of governance instruments to accelerate in achieving development target. Appropriateness between the necessity and regional-based data sources will result in deliberative and social convention. Priority scaling is an important filter to determine program and measure that agree with regional-based data and information. People-centered development consultation becomes an important basic-data sources to evolve social needs and expectancy into village's program and measure. Descriptive-analytic method examines competent experts' ideas and explanations. Social participation is the influential consideration to make development target and goals achievable. As a result, to strengthen village resources; village governance performance, village organization empowerment, other stakeholders important factors is essential to make work plan design in governance and development well-implemented.

Keywords : village development management and social participation

Arolina Sidauruk

Influence And Benefits Of Utilizing BPJS Health Insuran Cars In Pematangsiantar

KEBIJAKAN, Jurnal Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pematangsiantar, 2018, Vol. 2 No.1. Halaman 65 - 72

Health Social Insurance Company is a legal body that has responsible to carry out social security program. The social security program will bear the social risk and consequently will take over financial risk from society. The purpose of this study is to see how large the influence and what benefits of BPJS Health insurance could offer to the society in Pematangsiantar. Qualitative research is applied at this study. Qualitative research is scientific research that has intention to understand a phenomenon in a nature of social context by focusing on

intensive interaction process between researcher and the researched phenomenon (Meleong 1993). Research instrument are questionnaire and interviewing. There are 80 people as respondents. The research shows that the majority of BPJS recipients that are satisfied (having good intentions) are 35 respondents (43,75%), Senior High and Bachelor degree are 22 respondents (27,5%), working as public officials and non-public officials 23 respondents (28,75%). Information source that are health officers are 80 respondents (100%). Based on the results, it suggests that society may be able to intensify healthy living standard by participating in the social security program. Furthermore, BPJS may influence and create benefits to the people of Pematangsiantar.

Keywords : social security, health acceleration and good purpose



KEBIJAKAN

VOL. 2 NO. 1, Desember 2018

DAFTAR ISI

| | |
|---|---------|
| Penerapan Pendekatan Ilmiah (<i>Scientific Approach</i>) Dalam Pembelajaran Bahasa Inggris Di Tingkat SMP Kota Pematangsiantar (<i>Sanggam Siahaan</i>) | 1 - 10 |
| Manajemen Pengelolaan Sampah Di Kota Pematangsiantar (<i>Ira Modifa</i>) | 11 - 24 |
| Analisis Keberadaan Ruang Terbuka Publik Terhadap Peningkatan Ekonomi Masyarakat Di Kota Pematangsiantar (<i>Pinondang Nainggolan</i>) | 25 - 38 |
| Efisiensi Dan Dampak Transportasi Online Terhadap Kesempatan Kerja, Pendapatan Dan Kebijakan Kota Pematangsiantar (<i>Binsar Tison Gultom</i>) | 39 - 50 |
| Disparitas Kualitas Pelayanan Antara Becak Siantar Dan Go-Jek Dalam Pemenuhan Kebutuhan Masyarakat Di Kota Pematangsiantar (¹ <i>Marisi Butarbutar</i>, ² <i>Acai Sudirman</i> dan ³ <i>Efendi</i>) | 51 - 58 |
| Model Pengembangan Manajemen Pembangunan Kelurahan (<i>Marto Silalahi</i>) | 59 - 64 |
| Pengaruh Dan Manfaat Penggunaan Kartu BPJS Kesehatan Di Kalangan Masyarakat Khususnya Di Kota Pematangsiantar (<i>Arolina Sidauruk</i>) | 65 - 72 |

PENERAPAN PENDEKATAN ILMIAH (*SCIENTIFIC APPROACH*) DALAM PEMBELAJARAN BAHASA INGGRIS DI TINGKAT SMP KOTA PEMATANGSIANTAR

(*IMPLEMENTATION OF SCIENTIFIC APPROACH IN ENGLISH LEARNING AT JUNIOR HIGH LEVEL IN PEMATANGSIANTAR*)

Sanggam Siahaan

Staf Pengajar Universitas HKBP Nommensen Pematangsiantar
Jl. Asahan No.4 Pematangsiantar
siahaansanggam@yahoo.com

Diterima : 1 Oktober 2018; Direvisi 16 November 2018; Disetujui 4 Desember 2018

ABSTRAK

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menetapkan proses pembelajaran yang diterapkan di sekolah harus berbasis pendekatan ilmiah (*scientific approach*). Hal ini merupakan sesuatu yang baru khususnya dalam pengajaran Bahasa Inggris sebagai bahasa asing. Sebagai sebuah trend baru dalam dunia pendidikan Indonesia, peneliti tertarik untuk menemukan pemahaman, penerapan, dan kendala yang dihadapi guru dalam menerapkan pendekatan ilmiah dalam pembelajaran bahasa Inggris di tingkat SMP Kota Pematangsiantar. Penelitian ini merupakan jenis studi kasus yang menerapkan metode analisa kualitatif. Dengan memanfaatkan observasi, open-ended questionnaire, dan dokumen sebagai teknik pengumpulan data, peneliti menemukan bahwa masih banyak guru yang tidak memahami secara utuh konsep dasar pendekatan ilmiah walaupun telah mengikuti pelatihan dari pemerintah. Proses pembelajaran dikelas masih didominasi oleh guru. Siswa lebih berperan sebagai pendengar dan peniru. Siswa belajar bukan karena ingin tahu melainkan karena disuruh guru. Pemahaman dan penerapan pendekatan ilmiah dalam pembelajaran Bahasa Inggris tidak sinergis. Beberapa guru memahami prosedur penerapan langkah 5M namun tidak menerapkannya dalam proses pembelajaran di kelas. Hal ini disebabkan berbagai kendala yang dihadapi guru di kelas terkait efisiensi waktu, kelengkapan peralatan belajar, maupun kesiapan siswa untuk belajar. Saran kepada kepala sekolah, stakeholder, dan pemerintah setempat agar dapat meminimalisir kesulitan yang dihadapi guru dalam penerapan pendekatan ilmiah sehingga dapat meningkatkan kualitas pendidikan sekolah yang nantinya mampu mewujudkan lahirnya generasi bangsa yang kreatif, aktif, inovatif, dan berkarakter.

Kata kunci : 5M, pendekatan ilmiah dan pembelajaran bahasa Inggris.

ABSTRACT

Indonesian Government initiated by Ministry of Education and Culture decided that all learning process must be based on scientific approach. It is a newly – implemented policy especially in English learning as a foreign language. As a new change in Indonesian Education, researchers are interested in finding teachers' understanding, appropriate implementation and constraints on how teachers carry out scientific approach in English Learning at Junior High Level in Pematangsiantar. Case study is a tool to analyze the data. Applying observation, open-ended questionnaire and document analysis as data collection technics, researchers find that there are still a lot of teachers that do not understand basic concept of Scientific Approach thoroughly although they have had a series of training and coaching from the Ministry. Teachers are still dominant actor in learning process in a classroom. Students take a role as listeners and imitators as they learn only to fulfill teachers' expectation, and not their own. Scientific

approach understanding and appropriate implementation in English Learning does not work synergically. Several teachers have good understanding on scientific approach with 5M procedure and yet implemented during learning process in the classrooms. This happens because there are various obstacles during the implementation of Scientific Approach in a classroom, for instance time efficiency, lack of learning materials and students' learning preparedness. Reducing the teachers' obstacles in implementing scientific approach in the classrooms is proposed to school heads, stakeholders and local governments. Therefore, education quality that comes from scientific approach learning process may create creative, innovative and specialized-character future generations.

Keywords : 5M, scientific approach and english learning

PENDAHULUAN

Sejak tahun pelajaran 2013-2014, pemerintah secara terbatas mulai melaksanakan Kurikulum 2013 khususnya bagi sekolah-sekolah yang memenuhi persyaratan dan ditetapkan secara selektif. Salah satu kunci sukses yang menentukan keberhasilan implementasi kurikulum 2013 adalah kreativitas guru, karena guru merupakan faktor penting yang besar pengaruhnya, bahkan sangat menentukan berhasil tidaknya peserta didik dalam belajar, khususnya dalam menerapkan implementasi pendekatan ilmiah dalam proses pembelajaran di kelas.

Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kurikulum 2013, pendekatan ilmiah tentunya sudah tidak asing lagi bagi para guru di sekolah. Walaupun demikian, kenyataannya, pendekatan ilmiah masih kontroversial khususnya dalam pembelajaran Bahasa Inggris. Metode ataupun pendekatan yang berlaku dalam pembelajaran bahasa memiliki konsep dan teknik pelaksanaan yang berbeda dengan pendekatan ilmiah. Beberapa metode ataupun pendekatan yang telah diterapkan dalam pembelajaran Bahasa Inggris adalah seperti yang dikemukakan oleh Larsen-Freeman (2000), Richards and Rodgers (2001), dan Brown (2007), yaitu: *Grammar-Translation Method, Direct Method, Audio-Lingual Method, Silent Way, Desuggestopedia, Total Physical Response, Community Language Learning, Communicative Language Teaching, Natural Approach, Cooperative Language Learning, dan Task-Based Language Teaching*. Sehingga model pembelajaran ilmiah ini membingungkan bagi para guru Bahasa.

Dalam standar proses pembelajaran dengan pendekatan saintifik meliputi langkah-langkah: mengamati, menanya, mencoba, mengasosiasi, mengkomunikasikan, dan mencipta. Kenyataannya masih banyak guru yang menghadapi kesulitan untuk menerapkan

langkah-langkah tersebut sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan. Hal ini menunjukkan bahwa guru belum dapat memahami dengan baik konsep tentang langkah-langkah pembelajaran tersebut (berdasarkan hasil penelitian Budianto, 2014; Azizah, 2015; Wahyudin dan Sukyadi, 2015; dan Zaim, 2017). Penelitian ini dilakukan untuk menelusuri:

- a. level pemahaman guru-guru Bahasa Inggris terhadap penerapan pendekatan ilmiah dalam pembelajaran Bahasa Inggris untuk tingkat SMP di Kota Pematangsiantar.
- b. penerapan pendekatan ilmiah dalam pembelajaran Bahasa Inggris untuk tingkat SMP di Kota Pematangsiantar.
- c. kendala yang dihadapi guru ketika menerapkan pendekatan ilmiah dalam pembelajaran Bahasa Inggris untuk tingkat SMP di Kota Pematangsiantar serta memberi solusi terhadap kendala-kendala tersebut.

Kurikulum 2013 menjanjikan lahirnya generasi penerus bangsa yang produktif, kreatif, inovatif, dan berkarakter. Dengan kreativitas, anak-anak bangsa mampu berinovasi secara produktif untuk menjawab tantangan masa depan yang semakin rumit dan kompleks. Meskipun demikian, keberhasilan Kurikulum 2013 dalam menghasilkan insan yang produktif, kreatif, dan inovatif, serta dalam merealisasikan tujuan pendidikan nasional untuk membentuk watak dan peradaban bangsa yang bermartabat sangat ditentukan oleh berbagai faktor (kunci sukses). Kunci sukses tersebut antara lain berkaitan dengan kepemimpinan kepala sekolah, kreativitas guru, aktivitas peserta didik, sosialisasi, fasilitas dan sumber belajar, lingkungan yang kondusif akademik, dan partisipasi warga sekolah.

Salah satu kunci sukses yang menentukan keberhasilan implementasi kurikulum 2013 adalah kreativitas guru, karena guru merupakan faktor penting yang besar pengaruhnya, bahkan sangat menentukan

berhasil tidaknya peserta didik dalam belajar, khususnya dalam menerapkan pendekatan ilmiah yang merupakan fokus kajian dalam penelitian ini.

Ada beberapa alasan berkenaan dengan perlunya pemberlakuan Kurikulum 2013, yaitu:

- a. butuh penekanan agar materi pelajaran sesuai dengan tahap perkembangan peserta didik. Selama ini hal tersebut kurang mendapat stressing sehingga masih sering terjadi adanya materi yang mengabaikan tahap perkembangan anak.
- b. perlunya pembelajaran yang mampu mengembangkan kreativitas siswa. Selama ini pembelajaran yang memberi ruang kepada siswa untuk mengembangkan kreativitas belum mendapat tempat.
- c. masih sangat diperlukannya pendidikan karakter. Selama ini kurikulum yang sebelumnya sudah melaksanakan pendidikan karakter, namun hasilnya belum maksimal.

Jadi pertimbangan utama pemberlakuan Kurikulum 2013 adalah faktor psikologis (yaitu penyesuaian materi pelajaran dengan teori perkembangan anak, pentingnya penguatan aspek afeksi), dan faktor sosial budaya (berkenaan dengan masalah yang dihadapi masyarakat makin kompleks yang membutuhkan manusia-manusia yang kreatif-inovatif).

Hakikat Pendekatan Ilmiah (*Scientific Approach*)

Pendekatan ilmiah merupakan pendekatan yang dikembangkan dari metode ilmiah (*scientific method*) yang pada awalnya banyak digunakan dalam pembelajaran ilmu alam (*sains*). Bernard (1995) menyatakan bahwa pada dasarnya metode ilmiah

mendorong siswa melakukan berbagai pengalaman belajar melalui observasi dan menjelaskan hasil pengamatannya. Metode ini memudahkan guru dalam memperbaiki proses pembelajaran yaitu dengan memecah proses menjadi langkah-langkah yang terperinci yang memuat instruksi bagi siswa sehingga dapat melaksanakan kegiatan belajar. Proses pembelajaran pada kurikulum 2013, sebagaimana yang tercantum didalam Permendikbud Nomor 65 Tahun 2013 tentang standar proses, menggunakan pendekatan ilmiah. Metode ilmiah pada pembahasan diatas menjadi dasar dari pengembangan kurikulum 2013 di Indonesia (Atsnan & Gazali, 2013: 54).

Walaupun pendekatan ilmiah ini sudah cukup lama menjadi trend di pembelajaran Sains, namun merupakan sesuatu hal yang baru bagi mata pelajaran yang lainnya, khususnya dalam pembelajaran Bahasa Inggris. Beberapa penelitian telah dilakukan secara berkelanjutan untuk menelusuri penerapan pendekatan ilmiah ini dalam pembelajaran Bahasa Inggris, seperti: Budianto (2014), Wahyudin & Sukyadi (2015), Azizah (2015), dan Zaim (2017). Relevansi temuan mereka menunjukkan bahwa konsep dan strategi penerapan pendekatan ilmiah masih belum jelas bagi banyak guru Bahasa Inggris. Hal tersebut tentunya disebabkan oleh berbagai faktor yang dapat bersumber dari diri guru tersebut, siswa, atau bahkan dari sekolah secara menyeluruh.

Langkah-Langkah Pendekatan Ilmiah

Sesuai dengan yang tertera di dalam Permendikbud Nomor 81A Tahun 2013 lampiran IV ada lima langkah penerapan pendekatan ilmiah (dikenal dengan singkatan 5M) yaitu:



a. Mengamati (observasi)

Metode mengamati mengutamakan kebermaknaan proses pembelajaran (*meaningfull learning*). Metode ini memiliki keunggulan tertentu, seperti menyajikan media obyek secara nyata, peserta didik senang dan tertantang, dan mudah pelaksanaannya. Metode mengamati sangat bermanfaat bagi pemenuhan rasa ingin tahu peserta didik. Sehingga proses pembelajaran memiliki kebermaknaan yang tinggi. Dalam kegiatan mengamati, guru

hendaknya membuka secara luas dan bervariasi kesempatan kepada peserta didik untuk melakukan pengamatan melalui kegiatan: melihat, menyimak, mendengar, dan membaca. Guru memfasilitasi peserta didik untuk melakukan pengamatan, melatih mereka untuk memperhatikan (melihat, membaca, mendengar) hal yang penting dari suatu benda atau objek. Adapun kompetensi yang diharapkan adalah melatih kesungguhan, ketelitian, dan mencari informasi.

b. Menanya

Dalam kegiatan menanya, guru membuka kesempatan secara luas kepada peserta didik untuk bertanya mengenai apa yang sudah dilihat, disimak, dibaca atau dilihat. Guru perlu membimbing peserta didik untuk dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang hasil pengamatan objek yang konkrit sampai kepada yang abstrak berkenaan dengan fakta, konsep, prosedur, atau pun hal lain yang lebih abstrak. Pertanyaan yang bersifat faktual sampai kepada pertanyaan yang bersifat hipotetik. Pada situasi tertentu, mungkin siswa belum mampu mengemukakan pertanyaan, maka sangat dibutuhkan bantuan guru untuk mengajukan pertanyaan hingga peserta didik mampu mengajukan pertanyaan secara mandiri. Dari kegiatan kedua dihasilkan sejumlah pertanyaan. Melalui kegiatan bertanya dikembangkan rasa ingin tahu peserta didik. Semakin terlatih dalam bertanya maka rasa ingin tahu semakin dapat dikembangkan. Pertanyaan tersebut menjadi dasar untuk mencari informasi yang lebih lanjut dan beragam dari sumber yang ditentukan guru sampai yang ditentukan peserta didik, dari sumber yang tunggal sampai sumber yang beragam. Adapun kompetensi yang diharapkan dalam kegiatan ini adalah mengembangkan kreativitas, rasa ingin tahu, kemampuan merumuskan pertanyaan untuk membentuk pikiran kritis yang perlu untuk hidup cerdas dan belajar sepanjang hayat.

c. Mengumpulkan Informasi

Kegiatan “mengumpulkan informasi” merupakan tindak lanjut dari bertanya. Kegiatan ini dilakukan dengan menggali dan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber melalui berbagai cara. Untuk itu peserta didik dapat membaca buku yang lebih banyak, memperhatikan fenomena atau objek yang lebih teliti, atau bahkan melakukan eksperimen. Dari kegiatan tersebut terkumpul sejumlah informasi. Aktivitas mengumpulkan informasi dilakukan melalui eksperimen, membaca sumber lain selain buku teks, mengamati objek/kejadian, aktivitas wawancara dengan narasumber dan sebagainya. Adapun kompetensi yang diharapkan adalah mengembangkan sikap teliti, jujur, sopan, menghargai pendapat orang lain, kemampuan berkomunikasi, menerapkan kemampuan mengumpulkan informasi melalui berbagai cara yang dipelajari, mengembangkan kebiasaan belajar dan belajar sepanjang hayat.

d. Menalar

Kegiatan menalar adalah memproses informasi yang sudah dikumpulkan baik dari hasil kegiatan mengumpulkan/eksperimen maupun hasil dari kegiatan mengamati dan kegiatan mengumpulkan informasi. Pengolahan informasi yang dikumpulkan dari yang bersifat menambah keluasan dan kedalaman sampai kepada pengolahan informasi yang bersifat mencari solusi dari berbagai sumber yang memiliki pendapat yang berbeda sampai kepada yang bertentangan. Kegiatan ini dilakukan untuk menemukan keterkaitan satu informasi dengan informasi lainnya, menemukan pola dari keterkaitan informasi tersebut. Adapun kompetensi yang diharapkan adalah mengembangkan sikap jujur, teliti, disiplin, taat aturan, kerja keras, kemampuan menerapkan prosedur dan kemampuan berpikir induktif serta deduktif dalam menyimpulkan.

Aktivitas menalar dalam konteks pembelajaran pada Kurikulum 2013 dengan pendekatan ilmiah banyak merujuk pada teori belajar asosiasi atau pembelajaran asosiatif. Istilah asosiasi dalam pembelajaran merujuk pada kemampuan mengelompokkan beragam ide dan mengasosiasikan beragam peristiwa untuk kemudian memasukannya menjadi penggalan memori. Selama mentransfer peristiwa-peristiwa khusus ke otak, pengalaman tersimpan dalam referensi dengan peristiwa lain. Pengalaman-pengalaman yang sudah tersimpan di memori otak berelasi dan berinteraksi dengan pengalaman sebelumnya yang sudah tersedia.

e. Mengkomunikasikan

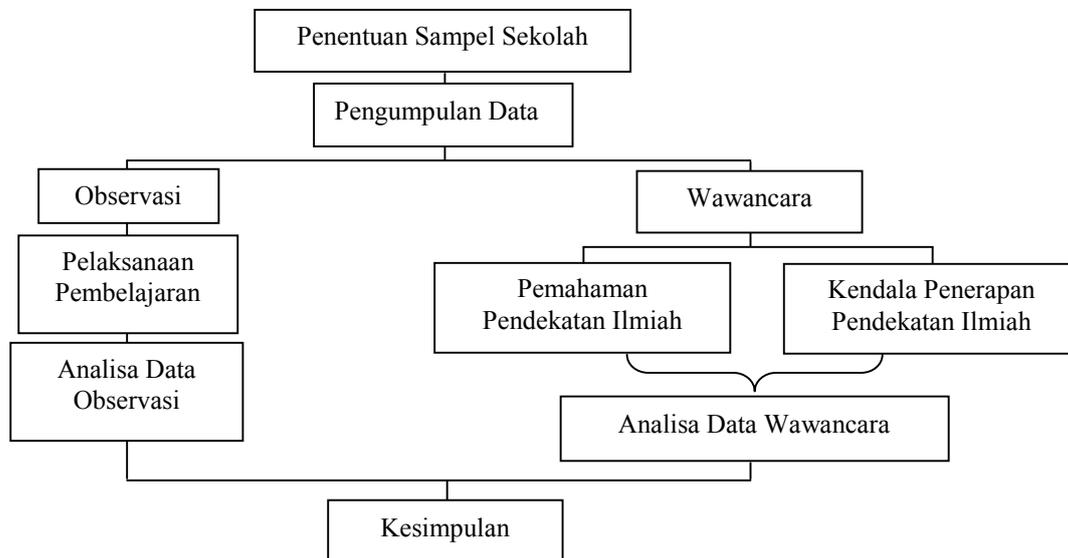
Pada pendekatan ilmiah guru diharapkan memberi kesempatan kepada peserta didik untuk mengkomunikasikan apa yang telah mereka pelajari. Kegiatan ini dapat dilakukan melalui menuliskan atau menceritakan apa yang ditemukan dalam kegiatan mencari informasi, mengasosiasikan dan menemukan pola. Hasil tersebut disampaikan di kelas dan dinilai oleh guru sebagai hasil belajar peserta didik atau kelompok peserta didik tersebut. Kegiatan “mengkomunikasikan” dalam kegiatan pembelajaran adalah menyampaikan hasil pengamatan, kesimpulan berdasarkan hasil analisis secara lisan, tertulis, atau media lainnya.

METODE

Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis studi kasus yang menerapkan analisa kualitatif. Creswell (2012: 465) memaparkan bahwa penelitian studi kasus adalah untuk menjelaskan dan mengungkapkan kasus secara keseluruhan dan komprehensif. Dengan demikian, kasus

dapat didefinisikan secara praktis sebagai suatu fenomena yang harus diteliti dan diinterpretasikan sebagai satu kesatuan yang utuh dan komprehensif pada setiap variabel informasi yang terdapat di dalamnya. Alur penelitian yang digunakan sebagai berikut:



Lokasi dan Sumber Data Penelitian

Penelitian ini dilakukan di 2 (dua) sekolah SMP Negeri di Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Dalam penelitian ini, sumber data dibagi dalam dua kategori, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari guru-guru yang mengajar Bahasa Inggris di kedua SMP tersebut. Guru yang dijadikan sebagai sumber primer adalah sepuluh (10) guru Bahasa Inggris yang telah mengajar paling sedikit selama 10 tahun (guru senior). Sedangkan data sekunder merupakan data kelengkapan dari data primer yaitu rancangan pelaksanaan pembelajaran (RPP) guru Bahasa Inggris yang berbasis Kurikulum 2013, materi pelajaran, dan buku pelajaran yang digunakan di kelas.

Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data terkait penerapan pendekatan ilmiah dalam pengajaran (masalah penelitian no. 2), peneliti menggunakan teknik observasi non partisipatif yaitu untuk menjaga keaslian data, maka peneliti tidak akan ikut berpartisipasi didalam kelas melainkan dengan menggunakan handycam untuk merekam keseluruhan proses pengajaran yang dilakukan guru di kelas. Dari

10 guru yang menjadi subjek penelitian ini, hanya 5 orang guru yang bersedia untuk direkam pada saat proses pembelajaran berlangsung, 5 orang lagi tidak bersedia.

Sementara untuk data tentang pemahaman dan kendala yang dihadapi guru terhadap penerapan pendekatan ilmiah (masalah penelitian no. 1 dan 3), teknik yang digunakan adalah pengisian angket terbuka (*open ended questionnaire*) oleh para guru. Seluruh subjek (10 orang guru) bersedia untuk mengisi angket ini.

Teknik Analisa Data

Setelah data dikumpulkan, peneliti menganalisa data tersebut dengan mengikuti prosedur yang diusulkan oleh Miles and Huberman (1994: 10) sebagai berikut:

- a) Mereduksi data
 - Membaca keseluruhan informasi
 - Memberi kode (mengklasifikasikan) pada data penelitian
- b) Menampilkan dan mendeskripsikan data
 - Membuat suatu uraian terperinci mengenai data observasi dan angket
 - Menetapkan pola pengajaran dan mencari hubungan antara data observasi dan angket
- c) Membuat kesimpulan

- Melakukan interpretasi dan mengembangkan generalisasi natural dari kasus

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemahaman Guru terhadap Pendekatan Sainifik

Berdasarkan data angket, beberapa guru sudah cukup mampu menjelaskan masing-masing kegiatan dalam pendekatan saintifik secara terpisah, namun secara utuh konsep pendekatan saintifik tersebut belum dipahami. Proses pembelajaran yang mereka rumuskan tidak terkait antara satu kegiatan dengan kegiatan lainnya. Beberapa fakta yang ditemukan dari angket adalah sebagai berikut:

- 5 dari 10 guru menyatakan bahwa pada saat kegiatan mengamati, siswa melakukan *role play* (bermain peran) dan mengerjakan tugas sesuai format. Hal ini sangat bertentangan dengan konsep mengamati yang sebenarnya dimana siswa seharusnya diberikan kesempatan secara mandiri menggunakan panca inderanya untuk mengamati sehingga menimbulkan rasa ingin tahu terhadap materi pelajaran. Kegiatan *role play* sebaiknya dilakukan pada saat mengkomunikasikan, dan mengerjakan tugas pada saat kegiatan menalar.
- 7 dari 10 guru memiliki pemahaman bahwa di fase menanya yang menjadi penanya adalah guru bukan siswa, sementara siswa berperan untuk menjawab pertanyaan yang diajukannya. Konsep menanya yang dimaksudkan dalam

pendekatan ilmiah adalah berhubungan dengan mengamati. Berdasarkan apa yang diamati maka akan timbul berbagai pertanyaan di alam pikir siswa. Hal inilah yang harus dimotivasi guru sehingga siswa berani dan percaya diri mengemukakan apa yang ada di dalam pikiran mereka.

- Seluruh guru yang menjadi responden angket menyatakan bahwa dalam kegiatan mengumpulkan informasi, siswa diberi kesempatan untuk mencari data terkait pengucapan yang benar maupun teks tulisan dari buku baik buku paket maupun sumber lain.
- Hanya 4 dari 10 guru yang memahami kegiatan menalar dengan tepat, yaitu membimbing atau mendampingi siswa dalam mengolah informasi yang telah mereka temukan di kegiatan sebelumnya melalui kegiatan mengelompokkan ataupun membandingkan data.
- 9 dari 10 guru menyatakan bahwa siswa diberi kesempatan untuk menyajikan hasil diskusi dalam bentuk presentasi, bermain peran, ataupun mengumpulkan hasil tulisan.
- Dari uraian kelima kegiatan yang mereka rumuskan, tidak satupun yang menunjukkan keterkaitan antara kegiatan mengamati hingga mengkomunikasikan.

Penerapan Pendekatan Sainifik dalam Proses Pembelajaran

Secara umum, deskripsi pola pengajaran yang diterapkan guru pada saat pembelajaran berlangsung adalah sebagai berikut:

| Tahap Pembelajaran | Kegiatan Guru | Kegiatan Siswa |
|--------------------|---|---|
| Pembuka | Menyapa siswa | Menyapa guru |
| Inti | 1. Menjelaskan materi | 1. Mendengarkan penjelasan guru |
| | 2. Melatih pengucapan | 2. Meniru pengucapan |
| | 3. Mengajukan pertanyaan secara lisan | 3. Menjawab pertanyaan secara lisan |
| | 4. Memberikan tugas secara individu atau kelompok | 4. Mengerjakan tugas secara individu ataupun kelompok |
| | 5. Menyuruh siswa bermain peran mempraktekkan sebuah dialog | 5. Bermain peran di depan kelas dengan membaca teks |
| Penutup | Memberi tugas rumah | Mencatat tugas |
| | Menyuruh salah seorang siswa menutup dengan doa | Berdoa |

a. Tahap Pembuka

Pada tahap pembuka, guru menyapa siswa dan direspon dengan sapaan oleh siswa.

b. Tahap Inti

Berdasarkan hasil pengamatan melalui rekaman video, model pembelajaran yang diterapkan guru bukanlah pendekatan ilmiah melainkan pembelajaran konvensional dimana guru lebih banyak menggunakan alokasi waktu pembelajaran. Keberadaan siswa dalam proses pembelajaran di kelas lebih pasif dibanding guru.

Beberapa guru telah menggunakan media slide yang ditampilkan dari in-focus pada saat menjelaskan materi. Penjelasan guru tersebut sesekali diiringi dengan melatih pengucapan siswa terhadap sebuah kosa kata yang sukar diucapkan. Pertanyaan juga diajukan pada saat guru menjelaskan. Dalam hal ini guru yang bertanya dan siswa menjawab pertanyaan yang diajukan guru tersebut.

Pada saat siswa mengerjakan tugas secara individu maupun kelompok, guru terkesan membiarkan siswa belajar sendiri bahkan ada yang meninggalkan kelas pada saat siswanya berdiskusi sehingga kelas menjadi ribut. Siswa, sebelum kelas berakhir, diminta untuk mempraktekkan dialog yang sesuai materi dengan cara bermain peran (*role play*). Dalam kegiatan mempraktekkan ini, siswa membaca percakapan yang telah mereka tuliskan di buku sebelumnya, bukan dengan berdialog langsung.

c. Tahap Penutup

Setelah pengajaran selesai, guru memberikan tugas rumah dan meminta salah seorang siswa untuk menutup pelajaran dengan doa.

Berdasarkan hasil pengamatan melalui rekaman video, model pembelajaran yang diterapkan guru bukanlah pendekatan ilmiah melainkan pembelajaran konvensional, dimana guru lebih banyak menggunakan alokasi waktu pembelajaran. Keberadaan siswa dalam proses pembelajaran di kelas lebih pasif dibanding guru.

Beberapa guru telah menggunakan media slide yang ditampilkan dari in-focus pada saat menjelaskan materi. Penjelasan guru tersebut sesekali diiringi dengan melatih pengucapan siswa terhadap sebuah kosa kata yang sukar diucapkan. Pertanyaan juga diajukan pada saat guru menjelaskan. Dalam hal ini guru yang bertanya dan siswa menjawab pertanyaan yang diajukan guru tersebut.

Pada saat siswa mengerjakan tugas secara individu maupun kelompok, guru terkesan membiarkan siswa belajar sendiri bahkan ada

yang meninggalkan kelas pada saat siswanya berdiskusi sehingga kelas menjadi ribut.

Siswa, sebelum kelas berakhir, diminta untuk mempraktekkan dialog yang sesuai materi dengan cara bermain peran (*role play*). Dalam kegiatan mempraktekkan ini, siswa membaca percakapan yang telah mereka tuliskan di buku sebelumnya, bukan dengan berdialog langsung.

Kendala yang Dihadapi Guru

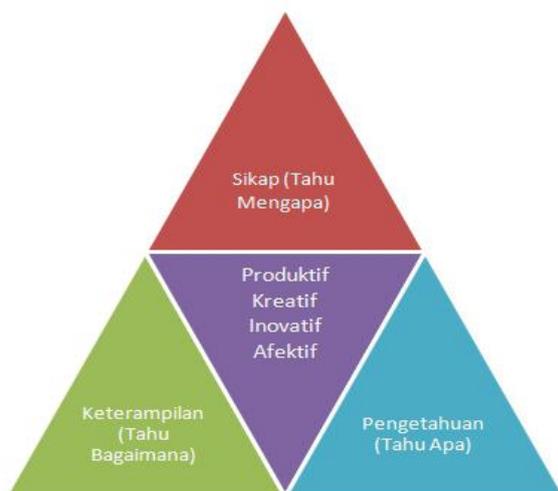
Berdasarkan hasil angket, kendala yang dihadapi guru pada saat penerapan pendekatan saintifik adalah sebagai berikut:

1. Waktu yang dialokasikan untuk bahasa Inggris tidak cukup efisien untuk menerapkan kelima langkah pendekatan ilmiah.
2. Kurangnya fasilitas pendukung belajar siswa di sekolah. Fasilitas tersebut berupa buku-buku pendamping buku paket seperti LKS, kamus, maupun buku teks lainnya yang berbahasa Inggris.
3. Kemauan siswa untuk belajar masih minim. Kebanyakan siswa menunggu jawaban dari guru daripada berusaha mencari jawaban dari tugas yang diberikan. Masih banyak siswa yang tidak percaya diri untuk mengemukakan pertanyaan atau pendapat.

Pemahaman guru yang tidak menyeluruh terhadap pendekatan saintifik ini dapat menyebabkan siswa tidak dapat merekonstruksi materi yang mereka pelajari menjadi sebuah pengetahuan yang dapat mereka terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang telah diungkapkan pada bab sebelumnya bahwa proses pembelajaran dalam pendekatan ilmiah bertitik tolak dari rasa ingin tahu siswa terhadap sebuah materi sehingga menghasilkan berbagai pertanyaan yang harus diprosesnya menjadi sebuah pengetahuan baru bagi siswa tersebut. Kegiatan diskusi kelompok yang sering diterapkan pada saat pembelajaran harus didampingi oleh guru agar kegiatan tersebut dapat membuahkan hasil yang bermanfaat bagi anak didiknya. Timbulnya berbagai masalah yang dihadapi siswa pada saat berdiskusi seharusnya menjadi fokus tugas guru yang utama.

Proses pembelajaran inti harus menyentuh tiga ranah, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dalam proses pembelajaran berbasis pendekatan ilmiah, ranah sikap menggamit transformasi substansi atau materi ajar agar peserta didik tahu tentang

“mengapa”. Ranah keterampilan menggamit transformasi substansi atau materi ajar agar peserta didik tahu tentang “bagaimana”. Ranah pengetahuan menggamit transformasi substansi atau materi ajar agar peserta didik tahu tentang “apa”. Hasil akhirnya adalah peningkatan dan keseimbangan antara kemampuan untuk menjadi manusia yang baik (*soft skills*) dan manusia yang memiliki kecakapan dan pengetahuan untuk hidup secara layak (*hard skills*) dari peserta didik yang meliputi aspek kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan.



Gambar: Integrasi Keterampilan, Pengetahuan, dan Sikap

Dengan proses pembelajaran yang demikian maka diharapkan hasil belajar melahirkan peserta didik yang produktif, kreatif, inovatif, dan afektif melalui penguatan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang terintegrasi.

KESIMPULAN

Kesimpulan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Masih banyak guru yang tidak memahami secara utuh konsep dasar pendekatan saintifik walaupun telah mengikuti pelatihan dari pemerintah.
2. Proses pembelajaran dikelas masih didominasi oleh guru. Siswa lebih berperan sebagai pendengar dan peniru. Siswa belajar bukan karena ingin tahu melainkan karena disuruh guru.
3. Pemahaman dan penerapan pendekatan saintifik dalam pembelajaran Bahasa Inggris tidak sinergis. Beberapa guru memahami prosedur penerapan pendekatan tersebut

namun tidak menerapkannya dalam proses pembelajaran di kelas. Hal ini disebabkan berbagai kendala yang dihadapi guru di kelas terkait efisiensi waktu, kelengkapan peralatan belajar, maupun kesiapan siswa untuk belajar.

SARAN

1. Agar pendekatan ilmiah dapat diterapkan dengan efektif di kelas, maka perlu dirumuskan sebuah strategi penerapan melalui penelitian *grounded theory* sehingga hasilnya dapat disosialisasikan melalui pelatihan mendalam kepada para guru Bahasa Inggris khususnya di Pematangsiantar.
2. Kepala sekolah, *stakeholder* maupun pemerintah setempat sebaiknya menyediakan fasilitas pendukung pembelajaran Bahasa Inggris dengan pendekatan ilmiah seperti :
 - Pengadaan infokus permanen di setiap kelas sehingga guru dapat menggunakannya untuk menampilkan gambar dan video sebagai pemicu munculnya rasa ingin tahu dan semangat belajar siswa.
 - Pengadaan buku-buku teks Bahasa Inggris pendamping buku pegangan siswa, berupa buku cerita, ensiklopedia, kamus, dan buku teks lainnya. Dalam melaksanakan kegiatan mengumpulkan informasi dan menalar, keberadaan buku pendamping tersebut akan sangat membantu siswa belajar.
 - Pengadaan jaringan *wifi* yang dilengkapi dengan sistem *firewall* di sekolah agar dapat digunakan guru dan siswa khususnya saat mengumpulkan informasi yang terkait sebagai perbandingan dengan materi yang diajarkan. Dengan adanya jaringan *wifi*, maka sebaiknya larangan penggunaan gadget saat belajar dihapuskan. Untuk mencegah penggunaan yang tidak sesuai, maka guru diharapkan harus mampu memonitor kerja siswa pada saat menggunakan akses internet.

DAFTAR PUSTAKA

Atsnan, M. F. & R. Y. Gazali. 2013. Penerapan pendekatan scientific dalam pembelajaran Matematika SMP kelas VII materi bilangan (pecahan). *Prosiding Seminar Nasional Matematika dan Pendidikan Matematika UNY*, Yogyakarta.

- Azizah, S. 2015. Implementasi pendekatan scientific dalam pengajaran Bahasa Inggris Kurikulum 2013 di SMPN 1 Pamekasan. *OKARA*, 2 : 181-200.
- Bernard, R. B. 1995. *Research Methods in Anthropology: Qualitative and Quantitative Approaches*. 2nd edition. Walnut Creek, CA: Altamira Press.
- Brown, H. D. 2007. *Principles of Language Learning and Teaching*. 5th Edition. New York : Pearson Education.
- Budianto, D.E. 2014. Teacher's pedagogical competence in the implementation of 2013 English Curriculum (Abstract). *Paper presented in International Postgraduate Colloquium of Research in Education (IPCORE)*. Bandung.
- Creswell, J. W. 2012. *Educational Research: Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative and Qualitative Research*. 4th edition. Boston : Pearson Education.
- Komariah, E. 2016. The implementation of scientific approach in teaching writing: Teacher's teaching performance and classroom activities. *Proceedings of the 1st EEIC in conjunction with the 2nd RGRS-CAPEU between Sultan Idris Education University and Syiah Kuala University*. Banda Aceh. Hal : 164-168
- Larsen-Freeman, D. 2000. *Techniques and Principles in Language Teaching*. 2nd Edition. Oxford : Oxford University Press.
- Miles, M. B., and Huberman, A. M. 1994. *Qualitative data analysis : An expanded sourcebook*. London: SAGE
- Moleong, L. J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses Kurikulum 2013.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81A Tahun 2013 lampiran IV tentang Implementasi Kurikulum Pedoman Umum Pembelajaran.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pembelajaran pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.
- Richards, J. C., & Rodgers, T. S. 2001. *Approaches and Methods in Language Teaching*. 2nd Edition. Cambridge : Cambridge University Press.
- Suharyadi. 2013. Exploring "scientific approach" in English language teaching. *Prosiding 2 Seminar Nasional Exchange of Experiences TEQIP*. Malang. Hal : 1348-1355
- Wahyudin, A. Y. & D. Sukyadi. 2015. A closer look at the implementation of the curriculum 2013 in Indonesia : Should the scientific approach be used in EFL classroom? *RJES*. 2 (2) : 56-70.
- Zaim, M. 2017. Implementing scientific approach to teach English at senior high school in Indonesia. *Asian Social Science*. 13 (2) : 33-40

This page is intentionally left blank

MANAJEMEN PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA PEMATANGSIANTAR

(WASTE MANAGEMENT IN PEMATANGSIANTAR)

Ira Modifa

Staf Pengajar Pascasarjana Universitas Simalungun
Jl. Sisingamangaraja, No. 9 Pematangsiantar
iramodifa@yahoo.com

Diterima : 5 Oktober 2018; Direvisi 21 November 2018; Disetujui 4 Desember 2018

ABSTRAK

Sampah secara umum didefinisikan sebagai sisa kegiatan manusia sehari-hari dan/atau proses alam yang berbentuk padat maupun cairan. Sampah merupakan tempat kehidupan berbagai mikroorganisme penyebab penyakit dan juga sebagai media pemindah dan penyebar penyakit (vektor). Karenanya, sampah harus dikelola dengan baik agar tidak mengganggu atau mengancam kesehatan lingkungan dan masyarakat. Pengelolaan sampah seharusnya meliputi pengumpulan, pengangkutan sampai dengan pemusnahan atau pengolahan sampah sedemikian rupa sehingga sampah tidak lagi mengganggu kesehatan masyarakat dan lingkungan hidup. Pengelolaan sampah di Kota Pematangsiantar juga masih bertumpu pada pendekatan akhir (end-of-pipe), dimana sampah dikumpulkan, diangkut dan dibuang ke tempat pemrosesan akhir sampah (TPA). Kondisi TPA Tanjung Pinggir saat ini sudah dapat dikatakan memprihatinkan dan buruk secara lingkungan. Kajian ini dijalankan dengan mempelajari faktor-faktor penyebab dan pendukung tata kelola sampah di Kota Pematangsiantar kepada subjek atau pelaku langsung dari pengelolaan sampah Kota Pematangsiantar. Metode penelitian yang akan dilakukan terdiri dari metode kepustakaan (*library research*), studi lapangan (*field research*), studi kasus (*case research*), dan analisis SWOT pengelolaan sampah di Kota Pematangsiantar. Diharapkan dengan penelitian ini Pengelolaan sampah akan terintegrasi dan dapat menstimulasi kreativitas dan inovasi dari masyarakat sehingga meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan warga. Ditemukan potensi-potensi dan cara-cara inovatif lainnya untuk mendorong tata kelola sampah yang lebih baik dimasa yang akan datang sehingga Kota Pematangsiantar bisa mencapai salah satu kota dengan predikat Zero Waste City.

Kata kunci : sampah, 3R, kesadaran lingkungan, inovasi dan zero waste city.

ABSTRACT

Waste Management is defined as remains produced by human daily activities and/or natural process in the form of solid/compact and liquids. Waste is known as a life-home of microorganism that may cause some diseases and create a disease intermediary and vector. Therefore, waste has to be well-managed in order to not causing and threatening social sanitary measures. Waste Management in Pematangsiantar is still focusing on end-of-pipe, in which waste is collected, transported to and disposed in a landfill. Prerequisite of Tanjung Pinggir as a landfill is still concerning and disappointing. This study is trying to find causing and supporting factors directly from subjects and actors who deal with waste management in Pematangsiantar. Library research, field research, case study and SWOT are the methods applied in this study. This research is expected to produce an integrated waste management and to stimulate innovation and inspiration from society on how to manage waste properly. Consequently, social welfare and social sanitation is achievable target for waste management. Creative manner and innovation in dealing with waste hopefully could be identified in order to generate Pematangsiantar as a Zero Waste City.

Keywords : *waste, 3R, environmental awareness, innovation and zero waste city*

PENDAHULUAN

Salah satu yang menjadi permasalahan ialah masalah penurunan kualitas lingkungan khususnya akibat sampah. Sampah dewasa ini masih menjadi permasalahan yang sulit dipecahkan akibat besarnya volume sampah, meningkatnya standar pola hidup masyarakat, keterbatasan lahan untuk pembuangan akhir, teknik pengelolaan sampah yang masih konvensional dan rendahnya prioritas pemerintah untuk pengelolaan sampah. Selain itu, perubahan pola hidup masyarakat dewasa ini juga mempengaruhi timbulan sampah kota yang semakin sulit dikendalikan. Pola dan gaya hidup makanan cepat saji instan seringkali menghasilkan sampah namun tidak diikuti dengan keinginan untuk mengelola atau memanfaatkan kembali sampah yang ada. Masyarakat cenderung egois dan merasa bahwa sampah bukan merupakan tanggung jawab bersama.

Gambaran kondisi permasalahan sampah di atas juga merupakan gambaran statistik sampah di Kota Pematangsiantar. Pengelolaan sampah pada saat ini di Pematangsiantar boleh dikatakan belum optimal. Dinas Lingkungan Hidup Kota Pematangsiantar sudah memiliki dan menjalankan berbagai program yang cukup baik dan terencana ditengah keterbatasan sarana dan penunjang serta anggaran yang ada.

Permasalahan sampah telah menjadi permasalahan nasional dan daerah, khususnya Kota Pematangsiantar. Perlu adanya sistem pengelolaan yang dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir. Selain itu diperlukan kepastian hukum, kejelasan tanggungjawab dan kewenangan pemerintah, baik pemerintah daerah, serta peran serta masyarakat. Sehubungan dengan itu perlu dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana potensi sampah dapat dikurangi di Kota Pematangsiantar.
2. Bagaimana keefektifan program sosialisasi dan edukasi tentang pengelolaan sampah yang dilakukan Pemerintah Kota Pematangsiantar.
3. Bagaimana partisipasi masyarakat tentang Pengelolaan Sampah berbasis ramah lingkungan di Kota Pematangsiantar.
4. Metoda atau inovasi apa yang bisa diaplikasikan di Kota Pematangsiantar di

dalam menangani dan mengelola sampah kota untuk mencapai status Zero waste city.

Menurut istilah lingkungan, sampah adalah bahan yang tidak mempunyai nilai atau tidak berharga untuk maksud biasa dan utama dalam pembuatan atau pemakaian barang (Hendargo, 1994). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2008 mendefinisikan sampah adalah sisa kegiatan manusia sehari-hari dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Lebih jauh dijelaskan bahwa pengelolaan sampah didefinisikan sebagai kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah dimana kegiatan pengurangan meliputi pembatasan timbulan sampah, daur ulang sampah dan pemanfaatan kembali sampah. Sejalan dengan kebijakan Pemerintah dalam menangani masalah persampahan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/PRT/M/2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Pengelolaan Persampahan terutama yang berkaitan dengan kebijakan pengurangan sampah sejak dari sumbernya dengan program unggulan 3R. Dengan demikian maka perlu dilakukan analisis dalam pengolahan sampah di Kota Pematangsiantar dengan menggunakan sistem 3R, yaitu :

1. Reduce (R1)

Reduce atau reduksi sampah merupakan upaya untuk mengurangi timbulan sampah di lingkungan sumber dan bahkan dapat dilakukan sejak sebelum sampah dihasilkan.

2. Reuse (R2)

Reuse berarti menggunakan kembali bahan atau material agar tidak menjadi sampah (tanpa melalui proses pengolahan).

3. Recycle (R3)

Recycle berarti mendaur ulang suatu bahan yang sudah tidak berguna (sampah) menjadi bahan lain setelah melalui proses pengolahan.

Dengan segala permasalahannya, pembangunan kota tidak hanya memberikan dampak positif namun juga dampak negatif salah satunya kepada lingkungan. Berbagai tragedi dan bencana lingkungan akibat kelalaian manusia memaksa manusia untuk bersikap arif dan bijaksana dalam memanfaatkan lingkungan. Dari isu-isu perkotaan muncul suatu proses

penciptaan lingkungan perkotaan yang baik merupakan upaya penerapan prinsip-prinsip berkelanjutan dalam perencanaan lingkungan perkotaan.

- Kota berkelanjutan (*sustainable city*). Menurut Salim (1986), pembangunan kota berkelanjutan adalah suatu proses dinamis yang berlangsung secara terus menerus dan merupakan respon terhadap tekanan perubahan ekonomi, lingkungan dan sosial. Proses dan kebijakannya tidak sama pada setiap kota.
- Kota hijau (*green city*). Kota yang didesain dengan mempertimbangkan dampak terhadap lingkungan, dihuni oleh orang-orang yang memiliki kesadaran untuk meminimalisir penggunaan energi, air, makanan dan pembuangan limbah/sampah. Kota hijau juga menjamin kesehatan lingkungan, mensinergikan lingkungan alami dan buatan berdasarkan perancangan kota yang berpihak kepada lingkungan. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyatakan kota hijau merupakan kota yang dibangun dengan tidak mengikis atau mengorbankan asset kota, melainkan terus memupuk semua kelompok asset meliputi manusia, lingkungan, sumber daya alam, dan kualitas sarana perkotaan.

METODE

Metode penelitian ini didasarkan pada penelitian yang akan dilakukan terdiri dari :

1. Penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang berdasarkan acuan teori yang berkaitan dengan Sampah dan pengelolaannya yang diambil dari buku-buku, jurnal-jurnal, artikel maupun data-data pendukung dari dinas terkait.
2. Studi lapangan (*field research*), yaitu penelitian langsung ke objek penelitian, sumber data dan informasi, masyarakat baik secara survey, quistioner, wawancara dan dilengkapi dengan bukti visual yang diambil dibeberapa sampel penelitian yang berfungsi untuk menguatkan hasil penelitian.
3. Studi kasus (*case research*), yaitu studi terhadap penelitian sejenis baik secara literatur maupun studi lapangan.
4. Analisis SWOT pengelolaan sampah di Kota Pematangsiantar.
SWOT adalah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan (*strengths*), kelemahan

(*weaknesses*), peluang (*opportunities*), dan ancaman (*threats*) dalam suatu kajian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kota Pematangsiantar merupakan kota perantara dari berbagai daerah sekitarnya. Hal ini menjadi catatan penting bahwa pembangunan Kota Pematangsiantar harus memperhatikan faktor estetis, kebersihan dan kenyamanan sehingga posisi yang strategis sebagai gerbang antar kabupaten bisa membawa dampak yang positif bagi kota maupun masyarakatnya.

Pertumbuhan penduduk Kota Pematangsiantar setiap tahunnya diperkirakan sekitar 2,2 % dengan kepadatan 2.96 kk/km². Seiring dengan pertumbuhan penduduk itu, maka aktivitas manusia juga meningkat dengan sendirinya. Adanya kegiatan sosial, perdagangan, pendidikan, kesehatan, pertanian dan bahkan industri tentu saja berdampak besar pada lingkungan dan berdampak pada konflik pemanfaatan ruang kota antar sektor.

Selain lonjakan penduduk dan perkembangan aktifitas yang mengikutinya, pola hidup bersih dan sehat belum menjadi gaya hidup mayoritas Kota Pematangsiantar. Masyarakat belum menunjukkan kepedulian yang tinggi terhadap lingkungan. Produksi sampah kegiatan masyarakat yang terus meningkat tidak sejalan dengan pengetahuan dan keinginan masyarakat untuk melakukan pengolahan sampah secara swadaya.

Pemanfaatan alam dan sumber-sumbernya sering sekali tidak dibarengi dengan kepedulian untuk menjaga keasrian dan keindahan lingkungan yang ada di seputar Kota Pematangsiantar. Oleh sebab itu, sejalan dengan tujuan dan sasaran pemerintah pusat dan provinsi yang termuat dalam Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi serta RPJMD Kota Pematangsiantar, maka Dinas Lingkungan Hidup Kota Pematangsiantar mempunyai visi “Kota Pematangsiantar Bersih dan Hijau Tahun 2022”.

1. Proyeksi Timbulan Sampah dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pengelolaan di Pematangsiantar

| Kecamatan | Keterangan | Standard | Jumlah Penduduk (jiwa) | | | | |
|------------------|--|--------------------|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | 2018 | 2022 | 2027 | 2032 | 2037 |
| Siantar Marihat | Jumlah Jiwa | | 19.534 | 20.981 | 22.536 | 24.205 | 25.998 |
| | Domestik | 2 L/Org/Hari | 39.068 | 41.962 | 45.072 | 48.410 | 51.996 |
| | Sarana Umum/Sosial | 0.5 L/Org/Hari | 9.767 | 10.491 | 11.268 | 12.103 | 12.999 |
| | Komersial/lain-lain | 0.25 L/Org/Hari | 4.884 | 5.245 | 5.634 | 6.051 | 6.500 |
| | Jumlah Timbulan Sampah (L/hari) | | 53.719 | 57.698 | 61.974 | 66.564 | 71.495 |
| | | | Kebutuhan Sarana (Unit) | | | | |
| | Keb. Bak/Tong Sampah | 1 Unit/50l | 1.074 | 1.154 | 1.239 | 1.331 | 1.430 |
| | Keb. Gerobak Sampah | 1 Unit/1,2m3 | 45 | 48 | 52 | 55 | 60 |
| | Kebutuhan TPSS | 1 Unit/1m3 | 54 | 58 | 62 | 67 | 71 |
| | Kebutuhan Truk Sampah | 1 Unit/6m3 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 |
| Siantar Marimbun | Jumlah Jiwa | | 15.961 | 17.120 | 18.363 | 19.697 | 21.127 |
| | Domestik | 2 L/Org/Hari | 31.922 | 34.240 | 36.726 | 39.394 | 42.254 |
| | Sarana Umum/Sosial | 0.5 L/Org/Hari | 7.981 | 8.560 | 9.182 | 9.849 | 10.564 |
| | Komersial/lain-lain | 0.25 L/Org/Hari | 3.990 | 4.280 | 4.591 | 4.924 | 5.282 |
| | Jumlah Timbulan Sampah | | 43.893 | 47.080 | 50.498 | 54.167 | 58.099 |
| | | | Kebutuhan Sarana (Unit) | | | | |
| | Keb. Bak/Tong Sampah | 1 Unit/50l | 878 | 942 | 1.010 | 1.083 | 1.162 |
| | Keb. Gerobak Sampah | 1 Unit/1,2m3 | 37 | 39 | 42 | 45 | 48 |
| | Kebutuhan TPSS | 1 Unit/1m3 | 44 | 47 | 50 | 54 | 58 |
| | Kebutuhan Truk Sampah | 1 Unit/6m3 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 |
| Siantar Selatan | Jumlah Jiwa | | 18.233 | 19.390 | 20.620 | 21.928 | 23.319 |
| | Domestik | 2 L/Org/Hari | 36.466 | 38.780 | 41.240 | 43.856 | 46.638 |
| | Sarana Umum/Sosial | 0.5 L/Org/Hari | 9.117 | 9.695 | 10.310 | 10.964 | 11.660 |
| | Komersial/lain-lain | 0.25 L/Org/Hari | 4.558 | 4.848 | 5.155 | 5.482 | 5.830 |
| | Jumlah Timbulan Sampah | | 50.141 | 53.323 | 56.705 | 60.302 | 64.127 |
| | | | Kebutuhan Sarana (Unit) | | | | |
| | Keb. Bak/Tong Sampah | 1 Unit/50l | 1.003 | 1.066 | 1.134 | 1.206 | 1.283 |

| Kecamatan | Keterangan | Standard | Jumlah Penduduk (jiwa) | | | | |
|---------------|-------------------------------|--------------------|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 2018 | 2022 | 2027 | 2032 | 2037 |
| | Keb. Gerobak Sampah | 1 Unit/1,2m3 | 42 | 44 | 47 | 50 | 53 |
| | Kebutuhan TPSS | 1 Unit/1m3 | 50 | 53 | 57 | 60 | 64 |
| | Kebutuhan Truk Sampah | 1 Unit/6m3 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 |
| Siantar Barat | Jumlah Jiwa | | 37.951 | 40.619 | 43.474 | 46.530 | 49.800 |
| | Domestik | 2 L/Org/Hari | 75.902 | 81.238 | 86.948 | 93.060 | 99.600 |
| | Sarana Umum/Sosial | 0.5 L/Org/Hari | 18.976 | 20.310 | 21.737 | 23.265 | 24.900 |
| | Komersial/lain-lain | 0.25 L/Org/Hari | 9.488 | 10.155 | 10.869 | 11.633 | 12.450 |
| | Jumlah Timbulan Sampah | | 104.365 | 111.702 | 119.554 | 127.958 | 136.950 |
| | | | Kebutuhan Sarana (Unit) | | | | |
| | Keb. Bak/Tong Sampah | 1 Unit/50l | 2.087 | 812 | 869 | 931 | 996 |
| | Keb. Gerobak Sampah | 1 Unit/1,2m3 | 87 | 34 | 36 | 39 | 42 |
| | Kebutuhan TPSS | 1 Unit/1m3 | 104 | 112 | 120 | 128 | 137 |
| | Kebutuhan Truk Sampah | 1 Unit/6m3 | 17 | 19 | 20 | 21 | 23 |
| Siantar Utara | Jumlah Jiwa | | 49.556 | 52.699 | 56.041 | 59.595 | 63.374 |
| | Domestik | 2 L/Org/Hari | 99.112 | 105.398 | 112.082 | 119.190 | 126.748 |
| | Sarana Umum/Sosial | 0.5 L/Org/Hari | 24.778 | 26.350 | 28.021 | 29.798 | 31.687 |
| | Komersial/lain-lain | 0.25 L/Org/Hari | 12.389 | 13.175 | 14.010 | 14.899 | 15.844 |
| | Jumlah Timbulan Sampah | | 136.279 | 144.922 | 154.113 | 163.886 | 174.279 |
| | | | Kebutuhan Sarana (Unit) | | | | |
| | Keb. Bak/Tong Sampah | 1 Unit/50l | 2.726 | 2.898 | 3.082 | 3.278 | 3.486 |
| | Keb. Gerobak Sampah | 1 Unit/1,2m3 | 114 | 121 | 128 | 137 | 145 |
| | Kebutuhan TPSS | 1 Unit/1m3 | 136 | 145 | 154 | 164 | 174 |
| | Kebutuhan Truk Sampah | 1 Unit/6m3 | 23 | 24 | 26 | 27 | 29 |
| Siantar Timur | Jumlah Jiwa | | 41.042 | 43.636 | 46.393 | 49.325 | 52.442 |
| | Domestik | 2 L/Org/Hari | 82.084 | 87.272 | 92.786 | 98.650 | 104.884 |
| | Sarana Umum/Sosial | 0.5 L/Org/Hari | 20.521 | 21.818 | 23.197 | 24.663 | 26.221 |
| | Komersial/lain-lain | 0.25 L/Org/Hari | 10.261 | 10.909 | 11.598 | 12.331 | 13.111 |
| | Jumlah Timbulan Sampah | | 112.866 | 119.999 | 127.581 | 135.644 | 144.216 |

| Kecamatan | Keterangan | Standard | Jumlah Penduduk (jiwa) | | | | |
|--------------------|-------------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 2018 | 2022 | 2027 | 2032 | 2037 |
| | | | Kebutuhan Sarana (Unit) | | | | |
| | Keb. Bak/Tong Sampah | 1 Unit/50l | 2.257 | 2.400 | 2.552 | 2.713 | 2.884 |
| | Keb. Gerobak Sampah | 1 Unit/1,2m3 | 94 | 100 | 106 | 113 | 120 |
| | Kebutuhan TPSS | 1 Unit/1m3 | 113 | 120 | 128 | 136 | 144 |
| | Kebutuhan Truk Sampah | 1 Unit/6m3 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 |
| Siantar Martoba | Jumlah Jiwa | | 41.343 | 44.121 | 47.086 | 50.250 | 53.626 |
| | Domestik | 2 L/Org/Hari | 82.686 | 88.242 | 94.172 | 100.500 | 107.252 |
| | Sarana Umum/Sosial | 0.5 L/Org/Hari | 20.672 | 22.061 | 23.543 | 25.125 | 26.813 |
| | Komersial/lain-lain | 0.25 L/Org/Hari | 10.336 | 11.030 | 11.772 | 12.563 | 13.407 |
| | Jumlah Timbulan Sampah | | 113.693 | 121.333 | 129.487 | 138.188 | 147.472 |
| | | | Kebutuhan Sarana (Unit) | | | | |
| | Keb. Bak/Tong Sampah | 1 Unit/50l | 2.274 | 2.427 | 2.590 | 2.764 | 2.949 |
| | Keb. Gerobak Sampah | 1 Unit/1,2m3 | 95 | 101 | 108 | 115 | 123 |
| | Kebutuhan TPSS | 1 Unit/1m3 | 114 | 121 | 129 | 138 | 147 |
| | Kebutuhan Truk Sampah | 1 Unit/6m3 | 19 | 20 | 22 | 23 | 25 |
| Siantar Sitalasari | Jumlah Jiwa | | 29.143 | 31.143 | 33.280 | 35.563 | 38.004 |
| | Domestik | 2 L/Org/Hari | 58.286 | 62.286 | 66.560 | 71.126 | 76.008 |
| | Sarana Umum/Sosial | 0.5 L/Org/Hari | 14.572 | 15.572 | 16.640 | 17.782 | 19.002 |
| | Komersial/lain-lain | 0.25 L/Org/Hari | 7.286 | 7.786 | 8.320 | 8.891 | 9.501 |
| | Jumlah Timbulan Sampah | | 80.143 | 85.643 | 91.520 | 97.798 | 104.511 |
| | | | Kebutuhan Sarana (Unit) | | | | |
| | Keb. Bak/Tong Sampah | 1 Unit/50l | 1.603 | 1.713 | 1.830 | 1.956 | 2.090 |
| | Keb. Gerobak Sampah | 1 Unit/1,2m3 | 67 | 71 | 76 | 81 | 87 |
| | Kebutuhan TPSS | 1 Unit/1m3 | 80 | 86 | 92 | 98 | 105 |
| | Kebutuhan Truk Sampah | 1 Unit/6m3 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

Sumber : Masterplan Sampah Kota Pematangsiantar, 2017

2. Analisis SWOT Pengelolaan Sampah Kota Pematangsiantar

2.1. Dinas Lingkungan Hidup Kota Pematangsiantar

| Kekuatan (Strength – S) | Kelemahan (Weakness – W) |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan per Undang-Undang mengenai Lingkungan Hidup dan pengelolaan sampah berbasis ramah lingkungan. 2. Visi, Misi dan Target Pemerintah Kota Pematangsiantar bahwa 2020, Kota Pematangsiantar akan bebas sampah 3. Prestasi Adipura yang beberapa kali sudah diperoleh dan sedang dalam proses untuk mendapat kategori lebih tinggi. 4. Program kerja dari DLH Pematangsiantar yang sudah cukup baik dan hampir sudah memenuhi syarat-syarat yang diatur didalam per undang-undangan. 5. Letak geografis Pematangsiantar yang berada di posisi strategis kabupaten dan kota sekitarnya, sangat berpotensi untuk produksi hasil olahan sampah yaitu kompos maupun olahan daur ulang lainnya. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Lemahnya penegakan hukum terhadap peraturan per Undang-Undang lingkungan hidup, sehingga para pihak yang menjadi produsen sampah kurang disiplin dan bertanggung jawab terhadap sampahnya. Penegakan hukum terhadap pelaku pembuangan sampah dan limbah secara tidak bertanggung jawab sebenarnya sudah diatur didalam per Undang-Undang dan hukuman atas pelanggaran cukup berat. 2. Rencana kerja strategis tahunan Pemerintah Kota Pematangsiantar sering kali tidak berafiliasi dengan program perbaikan lingkungan. Komitmen dan usaha dari para pihak untuk mengkampanyekan target Zero waste city 2020 nampak masih jauh dari maksimal. 3. Beberapa tahun terakhir ini, kategori Adipura yang diperoleh Kota Pematangsiantar belum kategori terbaik dikarenakan beberapa persyaratan penting mencakup program, sarana dan prasarana pengelolaan lingkungan hidup dan pelaksanaannya masih belum memenuhi standar. 4. Dari hasil pengamatan, masih banyak kelemahan yang terjadi di tata kelola organisasi maupun program dari Dinas Lingkungan Hidup. Diantaranya adalah: <ol style="list-style-type: none"> a. kompetensi staff/petugas masih belum sesuai dengan tupoksi jabatan sehingga menyebabkan ketidaktahuan ataupun kurangnya pemahaman untuk melakukan program lebih baik. b. Program-program yang diciptakan dengan prematur tanpa pembelajaran dan persiapan yang baik. Contohnya program Bank Sampah. Delapan Bank sampah didirikan mulai tahun 2014 dengan APBD yang tidak sedikit. Namun akibat kurangnya pemahaman dan komitmen pendampingan, maka sekarang bank sampah yang ada kebanyakan tidak berfungsi ataupun belum maksimal. 5. Belum memadainya anggaran APBD Kota Pematangsiantar untuk program-program perbaikan lingkungan khususnya program Manajemen pengelolaan sampah yang lebih baik berakibat minimnya sarana dan prasarana pengelolaan sampah tersebut. |

| Peluang (Opportunities – O) | Ancaman (Threats – T) |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Pertumbuhan Ekonomi Kota Pematangsiantar Semakin Baik. 2. Sektor Perdagangan dan Jasa Masih Mendominasi Struktur Ekonomi Kota Pematangsiantar. 3. Pola sosial budaya kekerabatan dan pendidikan masyarakat Kota Pematangsiantar juga menjadi peluang lebih mudahnya edukasi pengelolaan sampah yang lebih baik dikalangan masyarakat. 4. Adanya berbagai pusat kegiatan seperti pendidikan, perdagangan, jasa, perbankan dan kesehatan berpeluang untuk terjalannya program-program kerjasama didalam perbaikan lingkungan khususnya di dalam program pengelolaan sampah. 5. Pematangsiantar sekarang ini berada ditengah kota/kabupaten yang akan sangat berkembang dari sisi ekonomi maupun pariwisata. Pembangunan pelabuhan Sei Mangke dan ditetapkannya Toba the Monaco of Asia merupakan kekuatan sekaligus kelemahan bagi Pematangsiantar. Sebagai kota perantara, bila pemerintah Kota Pematangsiantar tanggap akan potensi ini, perlu diadakan pembenahan program-program kerja yang benar-benar strategis termasuk penataan wilayah yang berbasis perbaikan lingkungan sehingga bisa menghasilkan kemajuan untuk Pematangsiantar. Namun sebaliknya bila pemerintah kurang tanggap dan melihat potensi pengembangan, maka Kota Pematangsiantar tidak tertutup kemungkinan menjadi kota singgah saja tanpa adanya sumbangan pendapatan yang berarti. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat Inflasi Yang Fluktuatif 2. Sektor perdagangan dan jasa seringkali menjadi produsen sampah kota. Bila tidak diberlakukannya peraturan Per Undang-Undang dengan ketat, maka hasil produksi perdagangan dan jasa bisa menjadi ancaman timbulan sampah seperti apa yang terjadi selama ini. 3. Ciri hidup kekotaan yang cenderung egois dan tidak peduli sudah mulai menghinggapi sosial masyarakat Kota Pematangsiantar. Terlebih perubahan gaya hidup masyarakat yang mengarah pada pola instan menyebabkan pertumbuhan timbulan sampah yang cukup mengancam lingkungan Kota Pematangsiantar. 4. Minimnya anggaran dan pengembangan kapasitas dari pelaku pendampingan masyarakat membuat banyak program yang baik dari pengelolaan sampah menjadi tidak efektif. Ketidakmaksimalan peran serta ini malah bisa menimbulkan kerugian yang buruk. 5. Pemerintah Kota Pematangsiantar perlu menggandeng para pihak untuk memperbaiki lingkungan. Ancamannya, bila pemerintah justru sangat permisif terhadap pelaku usaha untuk merusak lingkungan maka pengelolaan lingkungan hidup khususnya penanganan sampah Kota Pematangsiantar akan semakin sulit dilakukan. |

Sumber : Data Primer (Diolah)

2.2. Kecamatan & Kelurahan

| Kekuatan (Strength – S) | Kelemahan (Weakness – W) |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Ada 11 bank sampah di masing-masing kecamatan dengan peralatan yang awalnya cukup baik yang merupakan anggaran program pengelolaan sampah mulai tahun 2014 – sekarang. 2. Adanya anggaran langsung ke kecamatan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Bank sampah yang ada banyak yang tidak aktif akibat berbagai faktor. Kondisi gedung dan peralatan yang sudah dihibahkan, menurut pengamatan peneliti banyak yang sudah tidak lagi optimal dan berfungsi dengan baik akibat kerusakan dan bahkan tidak difungsikan. |

| | |
|--|---|
| <p>dan kelurahan untuk pengangkutan dari sumber pertama sampah (warga, industri, dagang, dll) ke TPSS sehingga pengangkutan bisa dilakukan setiap hari.</p> <p>3. Sudah terbentuknya 10 orang per kelurahan sebagai tenaga penerak masyarakat yang sudah dilatih untuk bekerja mendampingi masyarakat didalam program-program perbaikan lingkungan khususnya dalam pengelolaan sampah. Perlunya edukasi, motivasi dan reward yang baik akan mendorong Fasilitator masyarakat ini lebih bergairah untuk mendampingi masyarakat didalam program perbaikan lingkungan.</p> <p>4. Program 3R sudah beberapa kali disampaikan dan diberi pelatihan kepada warga sehingga bila program diulang dan dikemas dengan lebih baik, maka akan memudahkan pengelolaan sampah yang lebih baik dimasa yang akan datang.</p> | <p>2. Rendahnya kesadaran warga akan lingkungan dan pengelolaan sampah sehingga sering ditemukan sampah-sampah yang sembarangan dibuang.</p> <p>3. Rendahnya keinginan masyarakat untuk mengelola sampah menjadi pupuk atau olahan yang bermanfaat demi mengurangi timbulan sampah kota.</p> <p>4. Kondisi TPSS yang sangat minim dan mayoritas sudah tidak lagi utuh akibat dirusak secara sengaja ataupun kurang pemeliharaan.</p> <p>5. Minimnya anggaran untuk program-program inovatif dan menarik yang bisa menarik minat masyarakat untuk mulai mengolah sampah dari sumbernya.</p> <p>6. Minimnya sarana dan prasarana untuk manajemen pengelolaan sampah di tingkat kecamatan.</p> |
|--|---|

| Peluang (Opportunities – O) | Ancaman (Threats – T) |
|--|---|
| <p>1. Bank sampah induk yang merupakan program pengembangan dan percontohan, dapat menjadi peluang baik bagi kecamatan-kecamatan lainnya untuk kembali menghidupkan bank sampah yang sudah tidak lagi aktif.</p> <p>2. Kerjasama dengan para pihak antara lain investor, perbankan, universitas dan lain-lain dapat diberdayakan untuk membuat program-program inovatif baik dari sisi penguatan, penyediaan sarana-prasarana maupun program-program pendanaan yang mampu menarik minat masyarakat untuk mengolah sampah dari tingkat sumber atau warga.</p> | <p>1. Timbulan sampah yang diangkut setiap hari oleh petugas kecamatan, jumlahnya semakin meningkat setiap hari. Perubahan gaya hidup dan peningkatan jumlah penduduk akan berbanding lurus dengan timbulan sampah sehingga hal ini bisa menjadi ancaman serius bagi kerusakan lingkungan dan kesehatan masyarakat.</p> |

Sumber : Hasil diskusi, Data Primer (Diolah)

2.3. Pemulung dan Pengusaha Barang Bekas

| Kekuatan (Strength – S) | Kelemahan (Weakness – W) |
|---|---|
| <p>1. Visi, Misi dan Target Pemerintah Pematangsiantar bahwa 2020, Kota Pematangsiantar akan bebas sampah.</p> <p>2. Faktanya, dengan memulung sampah, 55% responden menjadikan kegiatan memulung sebagai sumber utama kehidupan sementara 45% lainnya menjadikan kegiatan memulung sebagai</p> | <p>1. Kondisi TPA Tanjung Pinggir Pematangsiantar saat ini bisa dikatakan sangat tercemar. Tingkat pencemaran udara, air dan darat terlihat sangat massive. Perlu dilakukan tindakan yang serius untuk mengurai timbunan sampah yang tidak terkontrol lagi. Bila melihat kondisi timbulan sampah yang ada dan minimnya program untuk mengelola sampah</p> |

| | |
|--|--|
| <p>tambahan pencaharian ekonomi keluarga.</p> <p>3. Asumsi sederhana bahwa pengelolaan sampah masih mampu memberikan penghasilan tambahan bagi sebahagian orang. Memilah barang-barang yang masih layak jual kepada pengepul, menjadi harapan hidup bagi para pemulung.</p> <p>Namun dari analisa sederhana sebelumnya, didapati pemilahan dan pengolahan lebih lanjut dari sampah sebenarnya mampu memberikan pendapatan ekonomi yang jauh lebih baik.</p> <p>4. Rata-rata hasil pilahan sampah oleh pemulung masih ditampung oleh pengepul untuk dapat dijual kembali ke kota besar atau pabrik yang mendaur ulang atau mengolah kembali sampah tersebut. Misalnya sampah plastik akan diolah kembali menjadi biji plastik, dan lain-lain.</p> <p>5. 100 % pemulung bersedia untuk diberikan penyuluhan dan pelatihan untuk memanfaatkan sampah dan mengolahnya dengan metode 3R. Bila 100 % pemulung yang ada juga sudah bersedia untuk mengolah sampah menjadi lebih bernilai, maka tidak mustahil dimasa akan datang timbulan sampah akan semakin berkurang bahkan target Pematangsiantar Zero waste 2020 dapat tercapai. Diperlukan respond yang positif untuk melanjutkan kajian ini menjadi Rencana Kerja Pemerintah Kota Pematangsiantar dan memasukkan anggaran daerah untuk kegiatan ini.</p> | <p>dengan lebih baik, mustahil Pematangsiantar mencapai Zero waste 2020.</p> <p>2. Angka responden yang mengantungkan harapan hidup utama dari kegiatan memulung sampah sekaligus menjadi kelemahan yang menggambarkan betapa sulitnya kehidupan masyarakat.</p> <p>3. Akibat kurangnya edukasi dan pemahaman potensi pengelolaan sampah, pemulung mayoritas hanya mampu mengurai 10 % dari total sampah yang masuk setiap hari. Mereka hanya mengambil apa yang layak jual tanpa diolah kembali, misalnya kertas, buku-buku, kardus, botol minuman, kaca, ban dan besi. Sebaliknya meninggalkan sampah basah seperti sampah rumah tangga dan restoran sebab tidak melihat nilai ekonomis dari sampah jenis organik tersebut.</p> <p>4. Hanya 10 % yang pernah mendengar tentang sampah yang dapat diolah kembali misalnya menjadi kompos, atau hasil daur ulang kembali. Walaupun begitu, hanya responden tersebut yang mengatakan memanfaatkan sampah organik untuk makan ternak ataupun diambil untuk menjadi pupuk. Sisanya 90% mengatakan belum pernah mendengar tentang potensi pengolahan 3R untuk menambah penghasilan keluarga mereka. Hal ini disebutkan karena mereka belum pernah mendengar sosialisasi tersebut oleh pihak terkait.</p> <p>5. Diperlukan komitmen, kegigihan dan usaha tanpa lelah untuk mampu mengedukasi masyarakat khususnya kalangan pemulung untuk mau terlibat didalam proses pemilahan dan memanfaatkan sampah 3R.</p> |
|--|--|

| Peluang (Opportunities – O) | Ancaman (Threats – T) |
|---|--|
| <p>1. Sudah terbentuknya 10 orang per kelurahan sebagai tenaga penggerak masyarakat yang sudah dilatih untuk bekerja mendampingi masyarakat didalam program-program perbaikan lingkungan khususnya dalam pengelolaan sampah. Perlunya edukasi, motivasi dan reward yang baik akan mendorong Fasilitator masyarakat ini lebih bergairah untuk mendampingi masyarakat didalam program perbaikan lingkungan.</p> <p>2. Penggunaan kompos sebagai pupuk</p> | <p>1. Kegiatan pembuangan sampah di TPA sungguh merupakan ancaman kesehatan dan polusi bagi mahluk hidup. Studi terhadap dampak TPA bagi lingkungan sekitarnya, bukanlah studi yang jarang dilakukan. Hampir semua penelitian membuktikan bahwa mahluk hidup khususnya manusia yang sehari-hari mencari nafkah atau hidup disekitar TPA, akan mengalami masalah kesehatan dan penurunan daya tahan. Dibutuhkan kerjasama dan bantuan kesehatan bagi masyarakat yang hidup disekitar TPA.</p> |

| | |
|--|--|
| <p>organik berpeluang besar untuk menjadi pilihan terbaik tanaman masyarakat maupun perkebunan. Penggunaan pupuk kimia dewasa ini semakin dihindari sebab mengandung berbagai bahan yang membahayakan manusia. Selain itu dampak terhadap tanah dan lingkungan akibat pemakaian pupuk kimia bisa sangat merugikan. Sebaliknya, gaya hidup sehat dewasa ini sedang menjadi trend. Masyarakat sudah semakin peduli dengan kesehatan dan cenderung mengkonsumsi makanan yang lebih sehat. Oleh sebab itu sayuran, buah dan makanan organik lainnya sedang menjadi gaya hidup yang sangat baik dijadikan peluang bisnis.</p> <p>Hasil penjualan kompos organik baik padat maupun cairan, bila dilakukan dengan dukungan produksi dan pemasaran yang baik, akan mampu menjadi peluang emas bagi pengelolanya. Sementara hasil penjualan bahan makanan menggunakan pupuk organik, biasanya jauh lebih mahal dan dicari dibanding yang menggunakan pupuk kimia.</p> | <p>2. Setiap program yang dibuat khususnya untuk kegiatan pemulung sampah, perlu mempertimbangkan keberlangsungannya. Sebab bila sifatnya hanya dadakan dan tergesa-gesa, justru akan menjadi kerugian material yang besar. Contoh kasus adalah gagalnya beberapa proyek bank sampah yang dibuat oleh Pemerintah Kota Pematangsiantar.</p> |
|--|--|

KESIMPULAN

Berdasarkan data-data, observasi, survey, wawancara maupun analisa terhadap berbagai faktor dan para pihak yang terlibat maka dari penelitian Manajemen Pengelolaan Sampah di Kota Pematangsiantar dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kota Pematangsiantar sebagai kota yang pernah menerima penghargaan Adipura beberapa tahun ini mengalami kemunduran dalam pengelolaan kebersihan dan kesehatan lingkungan. Perkembangan kota dan peningkatan jumlah penduduk, tidak sebanding dengan pembangunan infrastruktur kota, sehingga dengan semakin padatnya masyarakat di suatu wilayah Infrastruktur yang ada tidak lagi mampu dalam mendukung pengelolaan kebersihan kesehatan lingkungan. Hal tersebut menyebabkan berbagai persoalan-persoalan lingkungan dan kebersihan yang cukup mengganggu.
2. Pertumbuhan penduduk, perubahan gaya hidup masyarakat yang mengarah kepada gaya hidup cepat saji ataupun instan serta kemunduran nilai-nilai hidup bermasyarakat, dibuktikan telah mempengaruhi tingkat polusi dan timbulan

sampah kota. Masyarakat semakin tidak peduli dan egois untuk melihat persoalan sampah di sekitarnya dan menganggap sampah bukan menjadi tanggung jawab masyarakat melainkan tanggung jawab pemerintah. Hal ini tentu menjadi persepsi atau pandangan yang salah. Kebersihan lingkungan dan kota seharusnya adalah merupakan tanggung jawab masyarakat sebagai produsen sampah dengan pemerintah sebagai pengelolala. Di berbagai literatur dan contoh studi, telah dibuktikan hanya ketika masyarakat bisa berperan aktif dan peduli akan persoalan sampah kota, maka manajemen pengelolaan sampah kota akan terselesaikan.

3. Pemerintah sebagai pengelola utama manajemen sampah Kota Pematangsiantar, sudah memiliki berbagai program yang cukup baik. Namun alokasi dana sumber daya manusia yang kompeten dibidang persampahan, serta program-program yang interaktif masih sangat minim.

SARAN

Dalam rangka mendukung Visi Kota Pematangsiantar yaitu “Mewujudkan Kota Pematangsiantar Mantap, Maju, dan Jaya”

maka berikut saran dan usulan kegiatan yang berkaitan dengan Manajemen Pengelolaan Sampah di Kota Pematangsiantar:

1. Dinas Lingkungan Hidup Kota Pematangsiantar

a. Struktur Organisasi

- Diperlukan staf yang paham dan sesuai dengan bidang pendidikan dan pengalaman dibidang lingkungan hidup khususnya dalam pengelolaan sampah.
- Diperlukan staf khusus yang menangani pemberdayaan Bank Sampah bekerja sama dengan para pihak, khususnya mendorong masyarakat paham akan manfaat bank sampah dan memilah sampahnya dari rumah tangga maupun sumber langsung lainnya.
- Penghargaan yang lebih bagi petugas lapangan pengelolaan sampah Kota Pematangsiantar. Belajar dari pengalaman DKI Jakarta yang menciptakan pasukan pembersih sampah dan memberi reward serta penghargaan yang lebih dari biasanya, ternyata mampu menimbulkan semangat dan kebanggaan bagi tenaga lapangan pengelolaan sampah.

b. Anggaran

- Bila ingin mencapai target Zero waste 2020, Pemerintah Kota Pematangsiantar harus bisa mengalokasikan dana yang lebih besar bagi investasi usaha-usaha pengelolaan sampah berkelanjutan.
- Berafiliasi ataupun menjalin kerjasama dengan pengusaha, perkebunan, dunia pendidikan maupun perbankan untuk menciptakan program-program hibah ataupun program kerjasama lainnya yang memberi manfaat ekonomi dan jangka panjang dalam upaya pengelolaan sampah Kota Pematangsiantar.
- Menganggarkan sarana pewadahan dan pengangkutan sampah yang lebih baik. Hasil pengamatan selama kajian ini berlangsung, didapati sarana dan prasarana serta armada angkutan sampah Kota Pematangsiantar masih jauh dari baik. Tanpa sarana dan prasarana yang baik, program Zero Waste 2020 tentu sulit dilakukan.

c. Peraturan Per Undang-Undang

Undang-Undang lingkungan hidup sebenarnya sudah cukup komprehensif untuk diimplementasikan, namun sesuai dengan hasil penelitian yang dijalankan ini, didapati penegakan hukum atas pelanggaran Undang-Undang Lingkungan Hidup sering diabaikan.

2. Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

Menurut studi literatur, beberapa kota atau bahkan negara yang sukses di dalam penanganan sampah kota yang lebih baik ialah menciptakan kantong-kantong pembuangan sampah terpadu. TPST sendiri sebenarnya fungsinya hampir mirip dengan bank sampah. Fungsi TPST ialah mengurai sampah terlebih dahulu supaya timbulan sampah di TPA menurun jumlahnya. Di Kota Pematangsiantar, disarankan pemerintah kota dapat menggandeng kecamatan-kecamatan untuk membuat TPST atau mengaktifkan kembali bank sampah.

Untuk TPA sendiri rencana pengembangan TPA Kota Pematangsiantar disesuaikan dengan lokasi yang telah ditetapkan di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pematangsiantar yaitu di Kecamatan Siantar Martoba yaitu bekas lahan PTP III dengan sistem *sanitary controll landfill* seluas 5 Ha. Dimana perlu adanya peningkatan kualitas sarana dan prasarana operasional TPA karena pembangunannya belum mencapai 100%.

TPA di beberapa daerah bahkan didesain menjadi tempat edukasi, tempat wisata dan lain-lain, sehingga TPA tidak lagi menjadi momok lingkungan atau penyakit. Bukan hanya perbaikan TPA sesuai teknis/standar kelayakan yang sesuai dengan Undang-Undang, juga yang diperlukan inovasi-inovasi untuk merubah TPA.

3. Bank Sampah dan Kegiatan Memulung Sampah di TPA

Dari hasil kajian baik secara literatur, studi kasus maupun observasi langsung, dapat disimpulkan rencana pengembangan dan pembangunan terhadap Bank Sampah yang ada di Kota Pematangsiantar adalah sebagai berikut:

- a. Menggandeng pihak pengelola bank sampah untuk bekerjasama dalam upaya pengurangan timbulan sampah.
- b. Melakukan sosialisasi awal bersama pengelola bank sampah untuk memberikan pengenalan dan pengetahuan dasar mengenai bank sampah kepada masyarakat.

Wacana yang disampaikan antara lain tentang bank sampah sebagai program nasional, pengertian bank sampah dan sistem bagi hasil dalam sistem bank sampah. Penjelasan harus menonjolkan berbagai sisi positif sistem bank sampah, sehingga warga tergerak untuk ikut berpartisipasi dalam melaksanakan bank sampah.

- c. Setelah warga sepakat untuk melaksanakan sistem bank sampah, maka perlu dilakukan pertemuan lanjutan. Tujuannya untuk memberi penjelasan detail tentang standarisasi sistem bank sampah, mekanisme kerja bank sampah dan keuntungan sistem bank sampah.
- d. Pengesahan bank sampah sebagai badan yang sah, dan memberikan Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) dari Kecamatan. Tujuannya agar bank sampah yang sudah mengantongi surat izin IUMK bisa mendapat bantuan berbentuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) maupun pembiayaan dari LPDB (Lembaga Pembiayaan Dana Bergulir) dari Kementerian Koperasi dan UKM.
- e. Bersama menghadapi tantangan yang mungkin muncul saat penerapan bank sampah, organisasi masyarakat maupun pemerintah kota harus tetap melakukan pendampingan selama sistem berjalan.
- f. Membuat rencana jangka panjang dalam mengembangkan bank sampah berupa unit simpan pinjam, unit usaha sembako, koperasi, pinjaman usaha dan pengembangan kerjasama antar instansi guna pemanfaatan dan pemasaran hasil pengomposan dan kerajinan tangan. Perluasan fungsi bank sampah ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.
- g. Memberikan penyuluhan kesehatan dan mendorong masyarakat untuk tidak hidup disekitar TPA dan mendorong pemulung untuk tidak hanya memanfaatkan sampah anorganik melainkan juga turut terlibat di dalam usaha pengolahan sampah organik.

DAFTAR PUSTAKA

Akhtar, H. dan Soetjipto H. P, 2014. Peran Sikap dalam Memediasi Pengaruh Pengetahuan Terhadap Perilaku Minimisasi Sampah Pada Masyarakat Terban, Yogyakarta. *Jurnal Manusia dan Lingkungan*, 21 (3) : 386-392.

Asteria, Donna dan Heruman, Heru. Bank sampah sebagai alternatif strategi pengelolaan

sampah berbasis masyarakat di Tasikmalaya *Jurnal manusia dan lingkungan*, Vol . 23, No.1, Maret 2016 : 136-141

Keraf, A. Sonny, 2006. *Etika Lingkungan*. Penerbit buku Kompas, Jakarta.

Purba, H.D, Meidiana, C, dan Adrianto, D.W, 2014. Waste Management Scenario through Community Based Waste Bank: A Case Study of Kepanjen District, Malang Regency, Indonesia. *International Journal of Environmental Science and Development*, 5 (2) : 212-216.

Sugandy, DR. Ir Aca dan Hakim, Ir Rustam. 2007. *Prinsip Dasar kebijakan pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan*. Penerbit Bumi aksara, Jakarta.

Zulkifli, Arif, 2014. *Pengelolaan kota berkelanjutan*. Penerbit Graha Ilmu, Yogyakarta.

This page is intentionally left blank

ANALISIS KEBERADAAN RUANG TERBUKA PUBLIK TERHADAP PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT DI KOTA PEMATANGSIANTAR

(Studi Kasus Ruang Terbuka Publik Lapangan H. Adam Malik, Taman
Bunga/Lapangan Merdeka dan Siantar Square)

*(AN ANALYSIS IN THE EXISTENCE OF PUBLIC SPHERE TO
SOCIAL ECONOMIC GROWTH IN PEMATANGSIANTAR)*

*(H. Adam Malik Public and Taman Bunga/Merdeka and Siantar Square Public Sphere
Case Study)*

Pinondang Nainggolan

Staf Pengajar Pascasarjana Universitas Simalungun
Jl. Sisingamangaraja No. 9 Pematangsiantar
pinondangnainggolan@gmail.com

Diterima : 9 Oktober 2018; Direvisi 22 November 2018; Disetujui 4 Desember 2018

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keberadaan ruang terbuka publik dan pengaruh ruang terbuka publik terhadap peningkatan ekonomi masyarakat di Kota Pematangsiantar dengan studi kasus pada RTP Lapangan H. Adsam Malik, RTP Taman Bunga/Lapangan Merdeka dan RTP Siantar Square. Jumlah sampel yang digunakan sebanyak 90 orang yang terdiri dari 60 orang responden pedagang dan 30 orang responden pengunjung atau konsumen. Model yang digunakan untuk analisis data adalah metode deskriptif dan metode kuantitatif dengan persamaan regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan ruang terbuka publik Lapangan H. Adam Malik dan RTP Siantar Square belum tertata dengan baik, sehingga pengunjung kurang merasa puas. Sedangkan RTP Taman Bunga/Lapangan Merdeka sudah lebih baik. Keberadaan RTP pada tiga zona dapat meningkatkan ekonomi masyarakat. Jenis produk, waktu buka usaha setiap hari berpengaruh signifikan terhadap pendapatan masyarakat pengelola usaha kuliner, sedangkan lama pengalaman berusaha tidak signifikan. Pemerintah Kota Pematangsiantar perlu menerbitkan peraturan baru tentang penggunaan ruang terbuka publik, melakukan penataan ruang terbuka publik serta pembinaan terhadap para pedagang kuliner sehingga dapat lebih profesional dalam mengelola usaha sekaligus sebagai sumber utama penghasilan masyarakat.

Kata kunci : keberadaan ruang terbuka publik, aktivitas ekonomi dan pendapatan masyarakat.

ABSTRACT

The purpose of this research is to analyze the existence of Public Sphere and its influence to the growth of social economy in Pematangsiantar, with Haji Adam Malik, Taman Bunga/Merdeka and Siantar Square Public Sphere as case studies. There are 90 people as sample, consists of 60 traders and 30 visitors. Data analysis model applied in this research is descriptive and quantitative methods with double linier regression. The result of this research shows that the existence of Adam Malik and Siantar Square Public Sphere is not well-managed and as a result visitors have not yet been satisfied. However, Taman Bunga/Lapangan Merdeka Public Sphere is better than the other two mentioned earlier. The existence of public sphere in the three zones may increase social economy. Variety of products and opening hours significantly influence to the income of culinary business. On the other hand, business experience does not give significant

influence. Pematangsiantar Local Government is required to enact new regulation regarding public sphere practices and functions, well-managed public sphere and advancement of culinary business and trades. As a result, the policies may increase professionalism in management and generate income growth to the business sectors.

Keywords : *existence public sphere, economic activity and people's income.*

PENDAHULUAN

Perkembangan kota ditandai dengan perkembangan penduduk yang semakin pesat serta aktivitas ekonomi yang semakin banyak dan beraneka ragam. Perkembangan kemajuan ekonomi perkotaan dapat dilihat dari munculnya gedung-gedung bertingkat, pasar swalayan yang besar (mall/plaza), juga pasar skala menengah seperti mini market yang menawarkan berbagai jenis produk dengan menerapkan media online (*e-electronic system*), yang tentunya hal ini mengakibatkan ruang terbuka publik semakin sempit.

Pesatnya perkembangan penduduk dikota akan menimbulkan persoalan baru yaitu persoalan yang menyangkut tingkat persaingan ekonomi antar masyarakat, persaingan lokasi, persaingan usaha, persaingan kualitas yang pada akhirnya berdampak kepada persoalan pendapatan.

Begitu pula dengan pembangunan gedung yang semakin pesat di kota, akan membuat suatu kota terasa semakin sesak, sementara luas wilayah suatu kota sudah tertentu (terbatas), kenyataan serupa itu mengakibatkan masyarakat sering atau terpaksa memanfaatkan ruang terbuka publik untuk melaksanakan aktivitas ekonomi terutama pedagang kecil kuliner. Van dalam Rahmiati, dkk (2013), ruang terbuka publik merupakan unsur yang penting suatu kota karena mempunyai fungsi-fungsi penting yang menjadi kebutuhan suatu kota yaitu memberikan kontribusi penting dalam meningkatkan kualitas lingkungan, sebagai tempat rekreasi yang berbarengan dengan ruang terbuka hijau, sebagai tempat olah raga (*jogging track*), sarana bersosialisasi, tetapi juga berfungsi sebagai tempat peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat terutama usaha mikro kecil (UMK).

Aktivitas ekonomi dengan memanfaatkan ruang terbuka publik di Kota Pematangsiantar mengalami perkembangan yang pesat. Pengamatan pendahuluan pada Lapangan H. Adam Malik, Taman Bunga dan Siantar Sqare memperlihatkan di sekitar ruang terbuka publik di Kota Pematangsiantar, usaha skala kecil dengan berbagai jenis produk yang ditawarkan

cukup banyak dan setiap tahun semakin bertambah. Begitu pula masyarakat pengunjung yang menikmati layanan tersebut juga cukup ramai sambil menikmati alam bebas yang segar, bersosialisasi serta aktifitas olah raga. Oleh karena begitu antusiasnya warga masyarakat untuk menikmati ruang terbuka publik dengan segala aktivitas yang ada didalamnya, maka keberadaan pedagang kecil pada ruang terbuka publik tidak terelakkan dan bahkan sangat dibutuhkan karena usaha tersebut dapat membantu perekonomian masyarakat kecil sebagai sumber utama penghasilan dan sekaligus sebagai lapangan pekerjaan serta memberikan pelayanan kepada para pengunjung. Meskipun keberadaan pedagang kecil sering menimbulkan masalah kemacetan jalan dan juga masalah kebersihan lingkungan kota, namun karena tidak ada tempat lain yang tersedia bagi mereka maka pemanfaatan ruang terbuka publik merupakan alternatif yang dianggap lebih tepat.

Stephen Carr, dkk (1992) melihat ruang terbuka publik sebagai ruang bersama, tempat masyarakat melakukan aktivitas fungsional dan ritualnya dalam suatu ikatan komunitas, baik kehidupan sehari-hari maupun dalam perayaan berkala yang telah ditetapkan sebagai sesuatu yang terbuka, tempat masyarakat melakukan aktivitas pribadi dan kelompok.

Sementara Van (1983) mengatakan bahwa ruang terbuka publik merupakan fasilitas yang memberikan kontribusi penting dalam meningkatkan kualitas lingkungan pemukiman dan merupakan unsur yang sangat penting dalam kegiatan rekreasi. Dari beberapa pendapat diatas dapat diambil kesimpulan bahwa ruang terbuka publik merupakan ruang kota yang dapat digunakan sebagai tempat melaksanakan aktivitas masyarakat, baik aktivitas ekonomi, aktivitas sosial, rekreasi maupun olahraga serta aktivitas lainnya yang berguna bagi masyarakat.

Penyediaan ruang terbuka publik mempunyai makna bagi keberadaan suatu kota serta penduduk yang berdiam didalamnya. Makna aktivitas pada pada suatu ruang

(Gehl,1987) dapat dibagi kedalam 3 macam kegiatan, yaitu:

- a. Aktivitas utama (*necessary activities*), yaitu kegiatan rutin yang dilakukan karena keharusan untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Lingkungan yang baik adalah lingkungan yang dapat menampung dan mewadahi semua kegiatan yang dibutuhkan.
- b. Aktivitas pilihan (*optional activities*), yaitu kegiatan yang dilakukan ketika ada kesempatan atau waktu yang tepat. Biasanya kegiatan ini dilakukan pada situasi lingkungan yang cukup menyenangkan dan tidak ada aktivitas yang lain yang lebih mendesak.
- c. Aktivitas sosial (*social activities*), yaitu kegiatan yang melibatkan interaksi dengan pihak lain disekitarnya. Kegiatan ini cenderung tidak terencana dalam pelaksanaannya karena adanya aktifitas utama dan aktivitas pilihan.

Secara umum, tujuan ruang terbuka publik (Carr, dkk, 1992) adalah:

- a. Kesejahteraan rakyat
- b. Peningkatan visual (*visual enhancement*)
- c. Keberadaan ruang terbuka publik disuatu kota akan meningkatkan kualitas visual kota menjadi lebih manusiawi, harmonis dan indah.
- d. Peningkatan lingkungan (*environmental enhancement*)
- e. Penghijauan pada suatu ruang terbuka publik sebagai sebuah nilai estetika juga paru-paru kota yang memberikan udara segar ditengah-tengah polusi.
- f. Pengembangan ekonomi (*economic development*) adalah tujuan yang umum dalam penciptaan dan pengembangan ruang terbuka publik.
- g. Peningkatan kesan (*image enhancement*)

Ruang terbuka publik umumnya mempunyai kondisi fisik fungsional, yang mempengaruhi interaksi sosial, kenyamanan dan keamanan, yang pada akhirnya dapat menarik orang untuk berkunjung ke setting area terbuka (Lang, 2003). Interaksi sosial melalui terbentuknya pengguna ruang publik, intensifnya pengguna ruang dan adanya aktivitas yang beragam baik aktivitas ekonomi maupun aktivitas sosial dapat menjelaskan bagaimana ruang publik bermakna bagi masyarakat.

Caar (1992), tipe dan karakter ruang terbuka publik, yaitu:

- a. Taman Umum (*Public Park*): taman nasional (*National Park*), taman pusat kota (*downtown park*), Taman lingkungan (*neighbornhood*), taman kecil (*mini park*).
- b. Lapangan dan Plaza (*Squares and Plaza*): lapangan pusat kota (*central squares*), plaza pengikat (*corporate plaza*), peringatan (*memorial*).
- c. Pasar (*markets*)
- d. Jalan (*streets*): pedestrian sisi jalan (*pedestrian sidewalk*), mall pedestrian (*Pedestrian Mall*), Mall transit (*transit Mall*), jalur lambat (*Traffict restricted*), gang kecil kota (*town trail*).
- e. Tempat bermain (*play ground*): Tempat bermain (*play ground*), halaman sekolah (*school yard*).
- f. Ruang komunitas (*Community sapace*)
- g. Jalan hijau dan jalan taman (*Green ways & park ways*)
- h. Atrium/pasar didalam ruang (*Atrium indoor market place*): atrium, pasar/pusat perbelanjaan didalam kota (*market place/ Downtown shopping ceter*)
- i. Ruang dilingkungan rumah (*found/ neighborhood space*)

Ruang terbuka publik adalah ruang tidak terbangun yang memiliki berbagai macam fungsi bila dipandang dari beberapa aspek (Amelia, 2012), yaitu:

- a. Aspek Sosial, ruang terbuka publik berfungsi sebagai sarana interaksi sosial masyarakat dengan lingkungan sosial sekitarnya dan sebagai tempat masyarakat untuk menampung wadah aktivitas dalam bersosialisasi satu sama lain baik sama kerabat bahkan orang yang tidak dikenal.
- b. Aspek Ekonomi, ruang terbuka publik dapat berfungsi sebagai lahan penjualan bagi pedagang-pedagang dikarenakan ramainya aktivitas yang ada diruang terbuka publik yang mampu menampung aktivitas-aktivitas dagang yang banyak disekitarnya.
- c. Aspek Budaya, ruang terbuka publik yang dapat menampung acara-acara yang menonjolkan kebudayaan.
- d. Aspek Politik, ruang terbuka publik sebagai tempat pergelaran acara-cara negara serta menyampaikan aspirasi masyarakat seperti pemilu dan demonstrasi.
- e. Aspek Ekologis, ruang terbuka publik sebagai sarana untuk menciptakan kebersihan, kesehatan, keserasian, maupun keindahan lingkungan. Selain itu berfungsi

juga tempat untuk mendapatkan udara segar dan menyerap air hujan.

- f. Aspek Arsitektural, ruang terbuka publik berfungsi sebagai sarana penghubung suatu tempat dengan tempat yang lainnya dan berfungsi sebagai pembatas diantara massa bangunan, pelembut arsitektur bangunan.

Usaha kecil, menurut Undang-Undang Nomor 9 tahun 1995, didefinisikan sebagai kegiatan ekonomi rakyat yang memiliki hasil penjualan tahunan maksimal Rp.1.000.000.000,- dan memiliki kekayaan bersih, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha paling banyak Rp. 200.000.000,- Sedangkan menurut Badan Pusat Statistik (BPS), usaha kecil identik dengan industri kecil dan industri rumah tangga. Selanjutnya dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, bahwa yang dimaksud dengan usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

Usaha kecil (termasuk pedagang kaki lima) merupakan sektor usaha yang telah membuktikan mampu bertahan dalam kondisi krisis. Hal ini disebabkan antara lain kemampuan beradaptasi dengan perubahan lingkungan yang terjadi dengan relatif tinggi. Selain itu kemampuan bertahan usaha kecil juga disebabkan tingginya kandungan lokal pada faktor produksi, baik pada penggunaan bahan baku maupun permodalan, dan disamping itu juga, usaha kecil berbasis pada kebutuhan dasar masyarakat (Ryskayanto dan Sulistiowaty, 2008). Usaha kecil tidak kalah pentingnya karena kemampuan usaha kecil dalam menyerap tenaga kerja, meningkatkan jumlah unit usaha, dan mendukung pendapatan rumah tangga. Oleh karena kedudukan usaha kecil ditengah-tengah kehidupan iklim usaha telah mendapat tempat yang mantap. Selain banyak menyerap tenaga kerja dan ikut memperlancar kegiatan perekonomian negara dan usaha kecil mampu berdampingan dengan usaha besar. Usaha kecil dapat juga berfungsi sebagai ujung tombak bagi usaha besar dengan menyalurkan dan menjual hasil usaha besar kepada konsumen.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana keberadaan ruang terbuka publik di Kota Pematangsiantar dan bagaimana pengaruh keberadaan ruang terbuka

publik terhadap ekonomi masyarakat di Kota Pematangsiantar.

METODE

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif dengan studi kasus pada tiga lokasi yaitu RTP sekitar Lapangan H. Adam Malik, RTP sekitar Taman Bunga/Lapangan Merdeka dan RTP Siantar Square. Jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan kuantitatif baik bersifat primer maupun sekunder. Data kualitatif, yaitu data tentang lokasi, jenis aktivitas, jenis usaha, kebijakan pemerintah dalam pengelolaan ruang terbuka publik serta data lainnya yang dianggap berhubungan. Data kuantitatif, yaitu data penghasilan pedagang, waktu, harga, jenis produk. Teknik pengumpulan data dalam memperoleh data yang terkait dengan penelitian ini digunakan teknik observasi, wawancara, dan kuisioner serta studi kepustakaan.

Adapun jenis variabel yang akan yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 1). Keberadaan ruang terbuka publik, yang meliputi lokasi, jenis kegiatan; 2). Perkembangan usaha meliputi jenis produk yang ditawarkan (unit); 3). Lama berusaha setiap hari (jam); 4). Lama/pengalaman sebagai pengelola usaha di RTP (tahun), 5). Penghasilan atau pendapatan dari usaha (Rp); 6). Biaya produksi (Rp). Metode pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan *Purposive Random Sampling*, dan berstrata (*tratified random sampling*) yaitu teknik pengambilan sampel yang dilakukan secara sengaja dan dipilih berdasarkan tujuan penelitian. Jumlah sampel yang diambil sebanyak 90 orang yang terbagi atas 60 responden untuk pelaku usaha dan 30 responden untuk konsumen.

Untuk menganalisis data sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian ini digunakan :

1. Metode analisis deskriptif

Metode analisis data dengan metode deskriptif yaitu dengan cara mentabulasikan data baik kualitatif maupun kuantitatif sehingga dapat memberikan gambaran umum (mendeskripsikan) tentang objek yang sedang diteliti.

2. Metode analisis kuantitatif

Metode analisis kuantitatif yaitu metode regresi berganda. Model awal yang merupakan fungsi produksi :

$$Y = f (X_1, X_2, X_3, \dots, X_n)$$

Model persamaan regresi berganda:

$$Y = a_0 + b_1 X_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3$$

Dengan, Y = pengasilan usaha ekonomi pada ruang terbuka publik (Rp./hari); X1 = jenis/macam dagangan yang ditawarkan (unit); X2 = lama waktu jam per hari mengelola usaha (jam); X3 = masa/periode menggeluti usaha (tahun); b1, b2, b3 = koefisien regresi; a0 = konstanta.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berhubung karena begitu luasnya ruang terbuka publik di Kota Pematangsiantar, maka yang menjadi objek penelitian ini adalah ruang terbuka publik sekitar Lapangan H. Adam Malik, Lapangan Merdeka sekitarnya dan ruang terbuka publik Siantar Square.

Analisis Deskriptif Ruang Terbuka Publik Sekitar Lapangan H. Adam Malik

- Analisis Keberadaan RTP Sekitar Lapangan H. Adam Malik

Lokasi RTP Lapangan H. Adam Malik sebagai fungsi pedestrian cukup strategis, berada di inti kota dan mudah terjangkau oleh masyarakat, baik dengan menggunakan kendaraan umum kendaraan pribadi (mobil dan sepeda motor), ataupun berjalan kaki. Kemudahan menjangkau lokasi ini membuat masyarakat banyak berkunjung untuk

menikmati udara bebas, besantai, dan olahraga. Lapangan H. Adam Malik dapat diakses dengan cepat melalui jalan M. H. Sitorus, jalan H. Adam Malik, jalan Kartini, jalan Sutomo, jalan Merdeka maupun jalan Sudirman.

Dari pengamatan dilokasi, bahwa Lapangan H. Adam Malik sebagai fungsi pedestrian kurang terawat, dimana rumput banyak yang mati, tanaman pohon kurang terurus, ruang Harungguan kurang terawat. Ketersediaan sarana dan prasarana relatif kurang, diantaranya tempat duduk jumlahnya sangat terbatas, kamar mandi dan toilet untuk pengunjung tidak ada, dan meskipun ada pada ruang Harungguan, namun tidak dibuka setiap hari untuk umum. Begitu pula dengan kebersihan lokasi yang kurang dimana diberbagai lokasi selalu dijumpai sampah elastik. Dari aspek penggunaan di sekitar Lapangan H. Adam Malik sangat kurang tertata, pedagang sering bebas memasuki lapangan, trotoar jalan yang digunakan untuk usaha dagang seperti dagang jagung bakar dan minuman, tempat parkir di depan kantor DPRD digunakan untuk usaha kuliner dengan kondisi yang kurang mendukung keindahan kota, dan jalan digunakan untuk tempat mainan anak-anak (odong-odong). Kenyataan serupa ini mengakibatkan terganggunya para pejalan kaki untuk menikmati aktivitasnya.

Tabel 1 : Jawaban Responden Tentang Keberadaan Ruang Terbuka Publik Lokasi Lapangan H. Adam Malik

| Pendapat konsumen | Frekuensi | % |
|-------------------|-----------|-----|
| Memuaskan | 2 | 20 |
| Sedang | 2 | 20 |
| Kurang memuaskan | 6 | 60 |
| Jumlah | 10 | 100 |

Sumber : Hasil Wawancara dengan Responden, Lapangan H. Adam Malik

Data pada tabel 1. menunjukkan bahwa 60 % responden merasa kurang puas atas keberadaan ruang terbuka publik disekitar Lapangan H. Adam Malik, 20 % responden merasa sedang dan 20 % responden merasa puas. Terkait dengan permasalahan yang sudah disebutkan, maka pihak Pemerintah Kota Pematangsiantar perlu membuat peraturan yang jelas tentang pemakaian ruang terbuka publik di sekitar Lapangan H. Adam Malik, dan juga mencari lokasi yang lebih tepat bagi para pedagang kuliner sekaligus memberikan pembinaan kepada para pelaku usaha .

- Analisis Ekonomi RTP Sekitar Lapangan H. Adam Malik

Aktivitas ekonomi disekitar RTP Lapangan H. Adam Malik adalah usaha dagang skala kecil seperti usaha kecil kuliner, jagung bakar, permainan odong-odong dan sebagian pedagang mainan anak-anak. Usaha Kuliner yang mengambil tempat di sisi Lapangan H. Adam Malik, tepatnya di depan kantor DPRD Kota Pematangsiantar melaksanakan aktivitasnya pada sore-malam hari bahkan sampai dini hari, dari jam 18.00-3.00 pagi. Kios tempat usaha mereka adalah kios darurat

bertutup/beratap plastik seadanya sehingga merusak keindahan Kota Pematangsiantar. Masalah yang sering mereka alami adalah apabila cuaca yang buruk, dimana jika musim turun hujan maka kios mereka basah diterpa hujan dan membuat para pengunjung tidak nyaman. Namun dengan lokasi yang cukup strategis dan ramai dikunjungi masyarakat maka hasil penjualan mereka cukup lumayan untuk membiayai keluarga.

Hasil wawancara dengan salah seorang responden, bahwa rata-rata hasil usaha kuliner perhari mencapai Rp. 664.000,- dengan biaya yang dikeluarkan sebesar Rp. 376.500,- sehingga mereka mempunyai penghasilan

sebesar Rp. 287.500,- perhari. Penghasilan dari usaha kuliner sangat dipengaruhi jenis produk makanan dan minuman yang ditawarkan, lama waktu berdagang serta pengalaman berdagang. Dilihat dari kualitas produk makanan-minuman yang disajikan, masih tergolong kualitas rendah (tidak ada yang istimewa) karena diproses dengan seadanya, sehingga kepuasan konsumen atas produk relatif rendah. Sistem pemasaran dengan manual dan belum menggunakan teknologi digital (online). Namun demikian bahwa usaha kuliner di RTP Lapangan H. Adam Malik dapat meningkatkan penghasilan dan sekaligus lapangan pekerjaan.

Tabel 2 : Pendapat Responden Pelaku Usaha Tentang Peningkatan Pendapatan

| Pendapatan | Frekuensi (F) | % |
|------------|---------------|----|
| Meningkat | 8 | 80 |
| Biasa saja | 2 | 20 |

Sumber : Data Primer, diolah

Data pada tabel 2. memperlihatkan bahwa 80 % responden pedagang pada RTP sekitar Lapangan H. Adam Malik menyatakan penghasilannya meningkat, sedangkan 20 % mengatakan biasa saja.

Dengan melihat kenyataan ini Pemerintah Kota Pematangsiantar perlu melakukan pembinaan terhadap para pelaku usaha kuliner untuk dapat lebih profesional dalam menawarkan produk yang lebih baik, penataan lokasi dengan menjaga kebersihan lingkungan. Hal yang lebih penting adalah demi keindahan Kota Pematangsiantar pemerintah kota perlu mencari tempat yang baru bagi usaha kuliner yang disertai pemberian kartu ijin berdagang.

Analisis Deskriptif Ruang Terbuka Publik Sekitar Taman Bunga/Lapangan Merdeka.

- Analisis Keberadaan RTP Taman Bunga/Lapangan Merdeka

Area Taman Bunga/Lapangan Merdeka Kota Pematangsiantar yang merupakan Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP) adalah merupakan bahagian dari RTP, lokasinya berdampingan dengan RTP Lapangan H. Adam Malik. Lokasi yang strategis yang berada disekitar jalan Merdeka – jalan Sudirman dan Siantar Hotel, mudah ditempuh dengan kendaraan bis kota, mobil, sepeda motor maupun dengan jalan kaki. Taman Bunga sebagai ruang pedestrian dipenuhi dengan

berbagai jenis pohon yang rindang membuat udara yang sejuk, begitu pula dengan tempat olah raga yang didalamnya tersedia jalan melintang, batu pijak refleksi, lampu penerangan yang cukup serta tempat duduk dari semen. Ketersediaan sarana dan prasarana serupa itu digunakan untuk tempat bersantai sambil menghirup angin segar di inti kota, tempat olahraga dan tempat becengkerama dengan keluarga maupun kerabat (fungsi pedestrian). Pengunjung ke Taman Bunga/Lapangan Merdeka cukup ramai terutama pada sore hari dan hari libur untuk melaksanakan aktivitas olah raga. Jumlah pengunjung yang lebih ramai adalah pada hari Sabtu dan hari Minggu serta hari-hari libur umum. Seiring dengan jumlah pengunjung yang cukup banyak pada RTH Taman Bunga/Lapangan Merdeka mendorong para pedagang kecil memasuki tempat ini dengan cara menjajakan barang dagangannya seperti makanan-minuman maupun mainan anak-anak dengan tempat yang berpindah-pindah. Hasil penelitian menunjukkan 70 % responden puas dengan keberadaa RTP Taman Bunga, 30 % merasa sedang.

Tabel 3 : Jawaban Responden Atas Keberadaan Ruang Terbuka Publik Taman Bunga/Lapangan Merdeka

| Pendapat konsumen | Frekuensi | % |
|--------------------------|------------------|----------|
| Memuaskan | 7 | 70 |
| Sedang | 3 | 30 |
| Kurang memuaskan | - | - |
| Jumlah | 10 | 100 |

Sumber : Hasil Wawancara dengan Responden

Akan tetapi dilihat dari pengelolaan, RTP Taman Bunga/Lapangan Merdeka tergolong masih kurang. Sebagian infrastruktur sudah mulai rusak dan tidak terawat, pepohonan dan bunga kurang terawat. Kebersihan lokasi kurang terjaga atau jorok, hal ini disebabkan seringnya masuk para pedagang asongan untuk menjajakan barang dagangannya untuk melayani para pengunjung tanpa memperhatikan kebersihan taman yang mengakibatkan terjadinya perserakan sampah. Pedagang kecil yang sering menempatkan dagangannya pada pinggir jalan membuat areal parkir tidak teratur dan meimbulkan kemacetan. Selain itu, ada dari pengunjung yang menggunakan areal taman untuk membentangkan tikar sambil duduk-duduk bahkan tidur diatas tikar meskipun hal itu dilarang pihak pengelola taman mengakibatkan pemandangan kurang baik/kurang nyaman.

Terkait dengan situasi pada RTP Taman Bunga/Lapangan Merdeka, demi menjamin keindahan taman sebagai ruang terbuka hijau, kenyamanan pengunjung maka pihak Pemerintah Kota Pematangsiantar perlu menerbitkan peraturan baru tentang pemanfaatan ruang terbuka hijau publik, penataan taman dan sekaligus penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan pengunjung, seperti tempat sampah yang cukup, kamar mandi dan toilet yang tidak jauh serta tempat parkir yang aman.

- Analisis Ekonomi RTP Taman Bunga/Lapangan Merdeka

Aktivitas ekonomi pada RTP Taman Bunga/Lapangan Merdeka adalah usaha kuliner dan sebaaian pedagang mainan anak-anak. Sebagian pedagang kecil ada yang mengambil tempat pada pinggiran jalan atau pinggiran taman dan ada yang memasuki taman dengan cara menjajakan barang dagangannya dengan tempat yang berpindah-pindah, meskipun hal ini tidak mendapat ijin (dilarang). Namun usaha ini terpaksa dilakukan demi kebutuhan keluarga.

Jumlah pengunjung yang cukup banyak merupakan konsumen atas produk makanan-minuman yang ditawarkan pedagang kecil. Hal ini menunjukkan bahwa pedagang kecil cukup dibutuhkan pada ruang terbuka publik. Hasil penjualan yang cukup lumayan membuat para pedagang kecil bertahan dan malah semakin bertambah.

Hal yang berbeda dengan para pedagang usaha kuliner disepanjang jalan Merdeka dalam, tepatnya kios yang berhadapan dengan Gedung Juang dan Gedung Perpustakaan Umum, dimana kios yang mereka tempati merupakan tempat yang permanen meskipun mereka belum mendapat kartu ijin berjualan (KIB). Tempat cukup strategis untuk berdagang karena terletak diantara Siantar Hotel dan jalan Merdeka dan berdampingan dengan Taman Bunga, sehingga jumlah pengunjung relatif ramai terutama pada saat hari libur atau sore hingga malam hari. Lokasi yang relatif bersih dan area relatif luas serta penataan tempat yang relatif tertata dan tidak dilewati para pengendara sepeda motor membuat tempat ini nyaman bagi para pengunjung sehingga merasa betah dan nyaman untuk menikmati hidangan yang ditawarkan dengan harga yang terjangkau.

Hasil wawancara dengan salah seorang pedagang, bawa produk makanan-minuman yang ditawarkan beraneka jenis hingga 16 jenis, dan waktu berdagang setiap hari rata-rata 10 jam (11.00-21.00). Penghasilan rata-rata setiap hari mencapai Rp.763.000,- dengan tingkat keuntungan sebesar Rp.331.500,-. Tingkat keuntungan sebesar rata-rata Rp. 331.500,- per hari, meskipun relatif terbatas, namun menurut pengakuan pedagang sudah dapat menutupi kehidupan keluarga. Nilai penjualan adalah dipengaruhi jenis produk yang ditawarkan, lama melaksanakan aktivitas, serta pengalaman melaksanakan aktivitas yang sama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 70 % responden pedagang kuliner pada RTP Taman Bunga dapat meningkatkan penghasilan sedangkan 30 % mengaku biasa saja.

Tabel 4 : Pendapat Responden Pelaku Usaha Tentang Peningkatan Pendapatan

| Pendapatan | Frekuensi | % |
|-------------------|------------------|----------|
| Meningkat | 7 | 70 |
| Biasa saja | 3 | 30 |

Sumber : Data Primer, diolah.

Selain penghasilan dalam bentuk materi, dampak positif lain yang dapat diterima masyarakat dari keberadaan RTP adalah adanya lapangan kerja baru yang dapat menyerap tenaga kerja sehingga dapat memberikan peningkatan pendapatan bagi masyarakat.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa keberadaan ruang terbuka publik disekitar Taman Bunga/Langan Merdeka dapat memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dilihat dari pendapatan pedagang maupun kesempatan kerja.

Analisis Deskriptif Ruang Terbuka Publik Siantar Square

- Analisis Keberadaan RTP Siantar Square

Siantar Square berada pada jalan Vihara merupakan tempat yang cukup strategis karena berada diantara jalan Sutomo dengan jalan Pane yang merupakan jalan yang cukup ramai dilewati orang sepanjang hari, berdekatan dengan Pasar Horas Jaya dan berdekatan juga rumah sakit umum dr. Djasamen Saragih serta

jalan menuju Vihara Avalokitesvara di jalan Pane dan dekat dengan inti kota.

Di lokasi ini telah tersedia beberapa fasilitas yang disediakan pemerintah yaitu kios tempat para pedagang kuliner, jalan yang cukup lebar sekitar 15 meter yang terbagi dua dengan trotoar tengah jalan untuk tanaman pohon dan bunga, lampu penerangan jalan yang cukup terang. Akan tetapi pengamatan di lapangan bahwa kondisi jalan yang sudah mulai berlobang serta trotoar tengah jalan sudah rusak membuat lokasi kurang kondusif. Kondisi bangunan kios sudah semakin buruk sementara para pengguna kios kurang merawat, misalnya mencat bangunan sehingga kelihatan kumuh. Pedagang semakin memperluas lokasi dagang dengan cara menempatkan meja didepan kios sehingga jalan semakin sempit. Kamar mandi dan wc/toilet yang terbatas dan hanya ada satu dan jaraknya cukup jauh. Keadaan seperti itu membuat pengunjung kurang puas atas keberadaan ruang terbuka publik pada Siantar Square.

Tabel 5 : Jawaban Konsumen Atas Keberadaan Ruang Terbuka Publik Siantar Square

| Pendapat konsumen | Frekuensi | % |
|--------------------------|------------------|----------|
| Memuaskan | 3 | 30 |
| Sedang | 5 | 50 |
| Kurang memuaskan | 2 | 20 |
| Jumlah | 10 | 100 |

Sumber : Hasil Wawancara dengan Responden

Tabel 5. memperlihatkan bahwa 30 % responden konsumen yang berkunjung ke ruang terbuka publik Siantar Square merasa puas atas keberadaan ruang terbuka publik Siantar Square, 50 % menyatakan sedang dan 20 % menyatakan kurang memuaskan. Jumlah pengunjung ke lokasi Siantar Square cukup ramai, terutama pada hari Sabtu dan hari Minggu atau pada hari libur umum, hal ini menunjukkan masyarakat sangat membutuhkan lokasi untuk bisa duduk santai bersama keluarga atau kerabat sambil menikmati makanan-minuman dengan situasi yang nyaman.

- Analisa Ekonomi Pada RTP Siantar Square

Aktivitas ekonomi pada RTP Siantar Square umumnya adalah pedagang kuliner. Pedagang kuliner menempati kios yang dibangun pemerintah sebanyak 180 kios. Pedagang telah memperoleh Alas Hak atas lokasi dan telah memperoleh Kartu Ijin Berdagang (KIB). Perolehan Alas Hak dan kartu ijin berusaha (KIB) membuat pedagang lebih nyaman mengelola usahanya karena ijin KIB cukup lama yaitu 30 tahun.

Para pedagang menawarkan berbagai jenis makanan dan minuman dengan harga yang terjangkau. Ketersediaan berbagai jenis makanan mulai dari nasi dengan berbagai jenis, ikan dengan berbagai jenis, makanan mie dengan berbagai jenis, buah-buahan maupun

berbagai jenis minuman menjadi daya tarik tersendiri bagi konsumen karena dapat memilih jenis kebutuhannya sesuai selera. Dari aspek penghasilan, berdasarkan wawancara dengan responden pengelola usaha, bahwa usaha dagang di RTP Siantar Square merupakan sumber penghasilan yang cukup menjanjikan bagi para pedagang kecil dan menjadi sumber utama penghasilan keluarga.

Hasil wawancara dengan salah seorang responden pedagang kuliner bahwa rata-rata penjualan per hari pada usaha kuliner RTP Siantar Square sebesar Rp. 1.562.000,- dengan laba yang diterima pedagang sebesar

Rp.520.500,- per hari. Besarnya penerimaan pedagang sebenarnya bervariasi setiap hari atau tidak sama, apalagi pada hari Sabtu dan hari Minggu. Jenis produk yang ditawarkan ada sebanyak 16 jenis dengan waktu berjualan 12 jam. Penghasilan pedagang kuliner, meskipun belum tergolong tinggi, tetapi sudah cukup memadai memenuhi kebutuhan rumah tangga atau dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga sekaligus sebagai penampung tenaga kerja. Hasil penelitian menemukan bahwa 90 % pedagang kuliner RTP Siantar Square menyatakan penghasilannya meningkat dan hanya 10% responden mengatakan biasa saja.

Tabel 6 : Pendapat Responden Pelaku Usaha Tentang Peningkatan Pendapatan

| Pendapatan | Frekuensi | % |
|------------|-----------|----|
| Meningkat | 9 | 90 |
| Biasa saja | 1 | 10 |

Sumber : Data Primer, diolah.

Dibalik jumlah pengunjung yang ramai, namun pengunjung di RTP Siantar Square sering menimbulkan masalah terutama tentang kebersihan lingkungan. Sebagian para pengunjung kurang memperhatikan kebersihan lingkungan dengan membuang sampah sembarangan, sementara tempat pembuangan sampah tidak tersedia dengan cukup. Begitu pula dengan penataan kios serta kebersihannya yang kurang diperhatikan para pedagang sehingga keadaan ini akan mengurangi tingkat kepuasan konsumen. Jalan semakin sempit akibat usaha yang semakin mengambil bagian jalan keluar membuat pengunjung kurang nyaman. Sebagai tempat yang cukup ramai mendapat kunjungan dari masyarakat, juga para pedagang yang silih berganti menghampiri para pendatang/para pengunjung, membuat suasana sering kurang kondusif dan merasa terganggu. Begitu pula kendaraan yang bebas masuk lokasi dengan menelusuri jalan yang semakin sempit membuat suasana kurang

nyaman dan kurang mendukung atas fungsi utama ruang terbuka publik.

Analisis Kuantitatif

Data hasil kuisioner dari 60 responden pada tiga lokasi studi kasus, selanjutnya data diolah dengan metode analisis regresi berganda.

Dengan menggunakan program SPSS 2.1 dapat diketahui pengaruh usaha pada Ruang Terbuka Publik dengan variabel jenis produk (X1), lama (jam) buka usaha dalam satu hari (X2), tahun lama usaha (X3) terhadap pendapatan masyarakat pengelola usaha (Y), sebagaimana :

- Analisis Kuantitatif Pengaruh RTP Terhadap Peningkatan Ekonomi Rakyat.

Dengan menggunakan program SPSS 2.1 diperoleh hasil analisis regresi berganda untuk mengetahui pengaruh variabel jenis produk (X1), lama (jam) dalam satu hari (X2), tahun lama usaha/pengalaman (X3) terhadap pendapatan masyarakat pengelola usaha (Y), sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 7. Perhitungan Regresi Berganda Coefficients

| Model | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | T | Sig. |
|------------|-----------------------------|------------|---------------------------|--------|------|
| | B | Std. Error | Beta | | |
| (Constant) | -283073,008 | 136931,169 | | -2,067 | ,043 |
| Jenis | 68457,605 | 14425,535 | ,539 | 4,746 | ,000 |
| Waktu | 53293,448 | 23692,658 | ,247 | 2,249 | ,028 |
| Lama | 26665,912 | 13966,878 | ,165 | 1,909 | ,061 |

Dependent Variable: Hasil

Model Summary

| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
|-------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|
| 1 | ,847 ^a | ,717 | ,702 | 308946,19188 |

a. Predictors: (Constant), Lama, Waktu, Jenis

ANOVA^a

| Model | Sum of Squares | Df | Mean Square | F | Sig. |
|--------------|--------------------|----|-------------------|--------|-------------------|
| 1 Regression | 13554778362513,717 | 3 | 4518259454171,238 | 47,338 | ,000 ^b |
| Residual | 5345073970819,608 | 56 | 95447749478,922 | | |
| Total | 18899852333333,324 | 59 | | | |

a. Dependent Variable: Hasil

b. Predictors: (Constant), Lama, Waktu, Jenis

Berdasarkan tabel 7. diperoleh persamaan regresi, sebagai berikut :

$$Y = -283073,008 + 68457,605 X_1 + 53293,448 X_2 + 26665 X_3$$

$$Thit : (-2,067) \quad (4,746) \quad (2,249) \quad (1,909)$$

$$R^2 = 0,717$$

$$Fhit : 47,338$$

Persamaan regresi menginformasikan bahwa:

- Secara parsial terdapat pengaruh yang positif dan signifikan jenis produk yang ditawarkan dengan pendapatan pelaku usaha kuliner pada ruang terbuka publik di Kota Pematangsiantar ($\text{sig} < 0,05$). Artinya apabila produk yang ditawarkan semakin beraneka jenis maka pendapatan masyarakat pelaku usaha meningkat.
- Secara parsial lama jam kerja (waktu melaksanakan usaha) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan masyarakat pelaku usaha bisnis ($\text{sig} < 0,05$), artinya apabila jam waktu buka usaha ditingkatkan maka pendapatan pelaku usaha akan meningkat.
- Secara parsial terdapat pengaruh yang positif antara lama tahun usaha terhadap pendapatan pelaku usaha pada Ruang Terbuka Publik namun tidak signifikan ($\text{sig} > 0,05$).
- Secara simultan bahwa secara bersama-sama variabel banyak jenis produk yang ditawarkan (X_1), lama jam buka usaha (X_2) dan Lama tahun berusaha (X_3) berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pelaku usaha, dimana $Fhit = 47,338$ dengan signifikan, $\text{Sig } 0,000 < 0,05$.
- Koefisien determinasi (R^2) = $0,717 \times 100 \% = 71,7 \%$, artinya sebesar 71,7 % variasi banyak jenis produk (X_1), jam lama buka usaha perhari (X_2) dan tahun lama berusaha (X_3) dapat menjelaskan variasi pendapatan pelaku usaha pada Ruang Terbuka Publik di

Kota Pematangsiantar, selebihnya 28,3 % dipengaruhi variabel lain yang tidak ikut diteliti.

Hasil analisis regresi yang menunjukkan bahwa jenis produk yang ditawarkan pedagang berpengaruh positif terhadap pendapatan, dimana setiap adanya tambahan jenis produk yang ditawarkan diharapkan dapat meningkatkan pendapatan pedagang dengan catatan harus sesuai dengan kebutuhan konsumen. Untuk ini pedagang harus jeli untuk membuat kajian akan produk yang disukai masyarakat seperti misalnya berbagai jenis makanan dari ikan laut (seafood).

Hasil pengamatan dilokasi, bahwa jumlah jenis produk dan kualitas produk makanan-minuman di tiga lokasi studi kasus, ternyata tidak sama. Pada lokasi sekitar Lapangan H. Adam Malik pedagang menawarkan makanan-minuman yang jenisnya lebih sedikit dan kualitas produknya relatif lebih rendah jika dibandingkan dengan yang ditawarkan pada lokasi RTP di sekitar Taman Bunga/Lapangan Merdeka maupun di Siantar Square. Pedagang kuliner pada RTP Lapangan H. Adam Malik kurang profesional ditambah dengan kios yang sederhana (kereta dorong) dengan atap dari plastik) serta tempat yang tidak permanen, sehingga kurang sesuai dengan kriteria ruang terbuka pulik. Begitu pula dengan waktu, karena lokasi yang ditempati merupakan areal parkir depan kantor DPRD dan sebagian dengan menggunakan trotoar jalan, pedagang kuliner menggunakan waktu

dari sore jam 18.00 hingga larut malam jam 1.00-3.00. Keadaan ini mempengaruhi tingkat pendapatan pedagang. Hal yang berbeda dengan pedagang kuliner pada ruang terbuka publik sekitar Taman Bunga/Lapangan Merdeka yang sudah mendapat tempat permanen yang merupakan kios yang disediakan pemerintah. Pedagang menawarkan berbagai jenis makanan-minuman yang dikerjakan secara baik. Dan juga waktu melakukan aktivitas dagang lebih lama dari siang, sore hingga malam hari dan bahkan sebagian sampai dini hari. Jenis produk yang lebih banyak dan dikelola dengan lebih baik ditambah dengan waktu yang lebih lama berdampak terhadap penghasilan para pedagang.

Disamping faktor jenis produk, waktu jam melakukan aktivitas berjualan adalah hal yang sangat penting, karena semakin banyak waktu untuk berjualan melayani para pengunjung maka tingkat penghasilan juga akan semakin besar. Hasil olahan data yang menunjukkan bahwa lama waktu bejualan per hari, berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghasilan pelaku usaha kuliner. Para pengunjung kelokasi ruang terbuka publik di tiga kasus penelitian menggunakan waktu yang panjang, sebagian pedagang melakukan aktifitas hingga 12 jam, dan sebagian antara 10-12 jam. Waktu yang panjang untuk beroperasi membuat ruang terbuka publik Kota Pematangsiantar lebih hidup.

Dilihat dari lama mengelola usaha (pengalaman berusaha), bahwa dengan semakin lama tahun mengelola suatu usaha, maka kemampuan untuk mengembangkan usaha semakin kuat. Namun pengalaman tidak menjadi suatu jaminan untuk memajukan suatu usaha sehingga memperoleh hasil yang lebih besar. Hasil olahan data memperlihatkan bahwa lama mengelola usaha kuliner tidak berpengaruh signifikan terhadap penghasilan pedagang. Lama usaha tanpa diikuti dengan peningkatan sumberdaya manusia maupun modal usaha maka tidak akan membuat perubahan yang lebih baik, untuk itu perlu dilakukan pelatihan kewirausahaan bagi pelaku ekonomi/usaha kuliner yang berada pada ruang terbuka publik, agar menjadi wirausahaan yang mampu berinovasi.

Meskipun ada perbedaan yang nyata antara pedagang kuliner di ketiga lokasi, namun hasil analisis regresi menunjukkan bahwa jenis produk, waktu melakukan aktivitas setiap hari

berpengaruh signifikan terhadap penghasilan pedagang kuliner di tiga lokasi pengamatan, akan tetapi lama/pengalaman tidak signifikan terhadap penghasilan. Guna untuk meningkatkan pendapatan pedagang kecil kuliner pada ruang terbuka publik, para pedagang sebaiknya berbenah diri untuk lebih profesional dalam mengelola usahanya dengan menerapkan konsep strategi pemasaran 4P (Kotler, 2000), sehingga usaha serupa ini dapat semakin berkembang dan menjadi kebanggaan Kota Pematangsiantar.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Ruang terbuka publik di Kota Pematangsiantar terutama pada ruang terbuka publik sekitar Lapangan H. Adam Malik, Taman Bunga/Lapangan Merdeka dan Siantar Square merupakan ruang yang cukup berarti bagi kehidupan masyarakat untuk melaksanakan berbagai aktivitas sosial maupun aktivitas ekonomi, namun keberadaannya belum cukup memuaskan masyarakat. Hal itu dapat dilihat dari fasilitas yang kurang, lokasi tempat yang kurang terawat, kebersihan yang kurang, kamar mandi dan wc/toilet yang tidak tersedia, mengakibatkan pengunjung kurang mendapat kenyamanan akan keberadaan ruang terbuka publik.
2. Dari aspek ekonomi, bahwa keberadaan RTP di tiga lokasi yaitu RTP sekitar Lapangan H. Adam Malik, Taman Bunga/Lapangan Merdeka dan Siantar Square dapat meningkatkan ekonomi masyarakat khususnya pedagang kuliner yang menawarkan aneka jenis produk makanan dan minuman dengan harga yang terjangkau masyarakat pengunjung.
3. Bahwa variabel jenis produk, maupun waktu/lama melaksanakan aktivitas perdagangan setiap hari mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan ekonomi pedagang kuliner. Sementara lama pedagang untuk mengelola usaha dagang tidak berpengaruh signifikan terhadap peningkatan ekonomi masyarakat.

SARAN

Guna untuk meningkatkan kualitas keberadaan ruang terbuka publik dan pengaruhnya terhadap ekonomi masyarakat di

Kota Pematangsiantar, diberikan beberapa saran kebijakan, yaitu:

1. Bagi Pemerintah Kota Pematangsiantar:
 - a. Pemerintah Kota Pematangsiantar perlu berkolaborasi dengan DPRD kota untuk menyusun aturan (regulasi) yang menjadi acuan tentang pemanfaatan ruang terbuka publik terutama para pedagang sehingga keberadaan ruang menciptakan keindahan kota, menarik, dan nyaman bagi masyarakat.
 - b. Pemerintah perlu mencari tempat baru serta membangunnya sebagai pengembangan ruang terbuka publik ke daerah yang lebih pinggir di kecamatan-kecamatan, dan juga pada pinggiran aliran sungai yang dapat menjadi destinasi wisata air di Kota Pematangsiantar.
 - c. Pemerintah bekerjasama dengan masyarakat pedagang perlu memperbaiki fasilitas publik yang sudah rusak diantaranya jalan dan trotoar jalan yang sudah rusak, kamar mandi dan toilet yang tumpat dan jorok, tong sampah, serta tempat duduk.
 - d. Perlu membangun dan menambah fasilitas kebutuhan publik yaitu Kamar mandi dan toilet, menambah tempat duduk dilokasi terbuka, membangun tempat peneduh yang berkanopi sebagai tempat peneduh pada saat hujan.
 - e. Pemerintah bekerja sama dengan pendidikan tinggi perlu melakukan pembinaan yang rutin terhadap para pedagang pada ruang terbuka publik, terutama dalam kaitannya dengan *marketing mix (product, price, promotion, place)* agar mereka menjadi berjiwa *entrepreneurs* untuk mengembangkan usahanya yang berdampak kepada peningkatan penghasilan.
2. Bagi Pelaku Usaha Ekonomi:
 - a. Perlu menata kios dan lokasi tempat usaha terutama kebersihan, sehingga menjadi lokasi yang menarik bagi para konsumen dan nyaman untuk menikmatinya.
 - b. Perlu menjaga sekaligus meningkatkan kualitas menu makanan-minuman yang beraneka jenis untuk ditawarkan kepada pihak konsumen/pengunjung dengan menerapkan konsep bauran pemasaran (*Marketing Mix*), sehingga menjadi

faktor penentu terhadap peningkatan pendapatan.

- c. Oleh karena jam berkunjung ke lokasi adalah sepanjang hari, maka para pedagang perlu mengatur jam kerja (lama waktu beroperasi) pada pagi, siang, sore dan malam hari untuk melayani konsumen, demi untuk meningkatkan penghasilan masyarakat pelaku usaha.
- d. Keramahan, kesopanan, dan kerapian pelaku usaha (pedagang) perlu diperhatikan sebagai faktor penarik bagi konsumen, sebab ruang terbuka publik adalah bagian dari objek wisata.

DAFTAR PUSTAKA

Amelia, Herdini dkk, (2012). *Tingkat Keberhasilan Ruang Terbuka Publik pada Perumahan Setia Budi Indah, Kesuksesan Ruang Terbuka, Medan*, Departemen Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara.

Badan Pusat Statistik (BPS). Kota Pematangsiantar, Berbagai Edisi.

Carr, stephen, dkk. (1992). *Public space*. Australia : *cambridge university*.

Carr, S, dkk,(1992) *Environment and Behavior Series*, Public Space, Australia. Press Syndicate of Univercity of Camberra

Carr,S. (1992). *Public Space*. New York: *Cambridge University Press*

Carmona dkk, (2003). *Public Space Urban Space: The Dimension of Urban Design*, Arcitedtural Press ; London

Chris D. Prasetijaningsih (2014), *Inovasi Kota*, Penerbit: Graha Ilmu

Christaller. Daidjoeni (1992).*Teori Central Place and Urban Base*. Bandung : Penerbit Alumni

Darmawan, E. (2005).*Analisa Ruang Publik Arsitektur Kota*. Semarang : Penerbit Universitas Dipenogoro

Desti Rahmiati. (2013). *Pengaruh Perubahan Fungsi Ruang Terbuka Publik Terhadap Kualitas Kawasan Permukiman Di Sekitarnya*. Jurnal Arsitektur Universitas Bandar Lampung.

Gehl, J (1987). *Life Between Buildings: Using Public Space*. New York : Van Nostrand Reinhold.

Grey, G.W (1996). *The Urban Forest: The Comprehensive Mangement*. New York : John Wiley & son.

H. Rahardjo Adisasmita, (2005). *Dasa-Dasar Ekonomi Wilayah*. Penerbit: Graha Ilmu, Yogyakarta.

Krier, R. (1979). *Urban Space*. New York : Rizzoli

Lang, J. (1987):*The Built Environment Social Behavior: Architecture Determinism Rexamined Viair*. Cambridge : The WIT Press.

Singgih Wibowo (2008). *Pedoman Mengelola Usaha Kecil*. Edisi Revisi, Penerbit : Penebar Swadaya, Jakarta

Philip Kotler dan Amstrong (2000), *Dasar-Dasar Pemasaran*, Terjemahan Alexander Sindoro, Prehallindo, Jakarta,

Lynch, K, 1990, *The Image of the City*, Cambridge : MIT Press, MA

Undang–Undang RI Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Dirjen Penataan Ruang. Jakarta.

Rooden, F.C. Van,1983, *Greenspace in Cities, landscape*, Butterworrrths, London

Riskayanto dan Sulistiowaty (2008). *Dererminan Penyaluran Kredit Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Melalui BPR*.

This page is intentionally left blank

EFISIENSI DAN DAMPAK TRANSPORTASI ONLINE TERHADAP KESEMPATAN KERJA, PENDAPATAN DAN KEBIJAKAN KOTA PEMATANGSIANTAR

(ONLINE TRANSPORTATION EFFICIENCY AND IMPACT ON JOB OPPORTUNITIES, INCOMES AND POLICIES IN PEMATANGSIANTAR)

Binsar Tison Gultom

Staf Pengajar Universitas EFARINA Pematangsiantar
Jl. Sudirman No. 8 Pematangsiantar
binsargltm@yahoo.com

Diterima : 12 Oktober 2018; Direvisi 23 November 2018; Disetujui 4 Desember 2018

ABSTRAK

Munculnya transportasi online telah menjadi suatu fenomena baru saat ini hampir di seluruh kota di Indonesia termasuk Kota Pematangsiantar. Hal tersebut dikarenakan transportasi online mempunyai keunggulan baik dari segi biaya perjalanan, waktu tempuh perjalanan dan kemudahan untuk memperoleh akses pengemudi. Transportasi *online* memberikan dampak positif dengan mempermudah masyarakat Kota Pematangsiantar dalam mobilitas perjalanan, mengurangi pengeluaran masyarakat pada biaya transportasi, serta menambah lowongan pekerjaan bagi masyarakat Kota Pematangsiantar yang menganggur untuk bekerja sebagai pengemudi ojek online. Namun kehadiran transportasi online tersebut di Kota Pematangsiantar pada dasarnya mendapat penolakan dari pemilik transportasi konvensional yang sebelumnya telah ada sebelum kehadiran transportasi online. Untuk itulah sebagai sebuah trend baru dalam dunia transportasi Indonesia khususnya di Kota Pematangsiantar, peneliti tertarik untuk menemukan sejauhmana efisiensi dan dampak transportasi online terhadap kesempatan kerja, pendapatan dan kebijakan Kota Pematangsiantar. Penelitian ini merupakan penelitian yang menerapkan analisa kualitatif. Creswell (2012: 465) memaparkan bahwa penelitian studi kasus adalah untuk menjelaskan dan mengungkapkan kasus secara keseluruhan dan komprehensif. Pada dasarnya dari serangkaian studi dan analisa kehadiran transportasi online telah memberikan dampak yang positif dan memberikan kemudahan kepada masyarakat Kota Pematangsiantar. Transportasi online juga telah mengurangi tingkat pengangguran di masyarakat dan menambah pendapatan masyarakat di Kota Pematangsiantar. Oleh karena itulah diperlukan adanya kebijakan atau regulasi untuk mengatur keseluruhan transportasi konvensional dan transportasi online sehingga saling terintegrasi dan dapat mengurangi konflik yang terjadi.

Kata kunci : transportasi online, transportasi konvensional, kesempatan kerja dan kebijakan

ABSTRACT

The emerge of online transportation is an interesting and actual event that occurs in every part of Indonesia particularly in Pematangsiantar. The reason behind the phenomenon is that online transportations have outstanding quality in terms of expenses, time endurance and easy access. Online transportation contributes to positive impact on providing people in Pematangsiantar an easy-travel mobility, reducing transportation cost and increasing job opportunities. Basically, online transportation had a rejection from the owners of conventional transportations, the existing regulated mode of public transportation. As a new trend in transportation industry, the researcher is interested to investigate online transportation's efficiency and impact on job opportunities, incomes and policies in Pematangsiantar. Qualitative Analysis is conducted during the research. Creswell (2012:465) stated that case study may be able to explain and reveal the

case study comprehensively. Basically, a series of study and analysis on the emerge of online transportation conclude that online transportation may give positive impact and easy-accessed transportation to the people in Pematangsiantar. Online transportation is not only reducing unemployment rate but also increasing social income. Therefore, there is an immediate need to enact policies or regulations that are able to arrange both conventional and online transportation in order to get cross-integrated and reduce conflicts.

Keywords : *online transportation, conventional transportation, job opportunities and policies*

PENDAHULUAN

Transportasi online menjadi sebuah fenomena baru pada masyarakat dan menjadi *tren*. Transportasi online memberikan kemudahan kepada masyarakat Kota Pematangsiantar dalam melakukan mobilitas perjalanan. Transportasi online yang hadir di Kota Pematangsiantar seperti taksi online dan ojek online. Selain memberikan kemudahan dan keuntungan kepada masyarakat hadirnya transportasi online semenjak akhir tahun 2017 memberikan sebuah permasalahan baru di masyarakat khususnya dibidang usaha transportasi (angkutan).

Transportasi online yang ada di Indonesia termasuk ke dalam *Transportation Network Companies (TNC)*. TNC adalah sebuah perusahaan yang menyediakan jasa transportasi dengan bermitra ataupun sebagai pemilik tunggal dengan menggunakan aplikasi *online enabled* dengan bekerja menghubungkan penumpang dengan pengemudi. Pengemudi menggunakan kendaraan pribadi. TNC adalah model bisnis *sharing economy* yaitu mempertemukan konsumen yang memiliki sumber daya kendaraan pribadi serta memiliki ketrampilan mengemudi dengan konsumen yang membutuhkan jasa transportasi untuk menghantarkan konsumen (manusia dan barang) dengan biaya transaksi yang lebih ekonomis.

Transportasi online mempunyai keunggulan baik dari segi biaya perjalanan, transparansi biaya perjalanan, waktu tempuh perjalanan dan kemudahan untuk memperoleh akses pengemudi. Transportasi *online* memberikan dampak positif yaitu Pertama, mempermudah masyarakat Pematangsiantar dalam mobilitas perjalanan. Kedua, mengurangi pengeluaran masyarakat pada biaya transportasi. Ketiga, menambah lowongan pekerjaan bagi masyarakat Kota Pematangsiantar yang menganggur untuk bekerja sebagai pengemudi ojek online.

Di lain sisi, penolakan juga terjadi di masyarakat dengan hadirnya transportasi online

terkhusus sopir angkutan dan para pemilik (pengusaha) transportasi konvensional. Adapun beberapa dasar penolakan yaitu tidak mengikuti peraturan ketika masuk dalam pasar jasa transportasi (uji KIR, pemasangan stiker, penggunaan SIM A Umum), kedua transportasi online memonopoli pasar jasa transportasi dikarenakan tidak memiliki trayek, ketiga tidak mendapatkan keuntungan terhadap pendapatan daerah karena terbebas dari pembayaran pajak.

Untuk mengkaji permasalahan di atas dibutuhkan kajian Efisiensi dan Dampak Transportasi Online Terhadap Kesempatan Kerja, Pendapatan dan Kebijakan Kota Pematangsiantar.

Berdasarkan uraian masalah di atas Kajian penelitian ini merumuskan masalah, sebagai berikut :

1. Bagaimana tingkat efisien transportasi online dibandingkan dengan angkutan konvensional ?
2. Bagaimana dampak transportasi online terhadap pengurangan pengangguran di Kota Pematangsiantar ?
3. Bagaimana tingkat pendapatan masyarakat terkhusus pengemudi transportasi online ?
4. Bagaimana kebijakan Pemerintah Kota Pematangsiantar menyikapi perkembangan transportasi online ?

Transportation Network Companies (TNC)

Transportation Network Companies (TNC) menerapkan sistem *sharing economy* dalam proses bisnis operasionalnya. *Sharing economy* adalah mempertemukan pihak yang memiliki sumber daya (kendaraan pribadi serta keterampilan mengemudi) dengan konsumen yang membutuhkan pelayanan transportasi dengan biaya yang lebih murah dan ekonomis. *Sharing economy* memiliki prinsip efisiensi, dan menumbuhkan lapangan kerja.

Sharing economy menjadikan sumber daya yang awalnya tidak produktif menjadi produktif dengan memberikan pendapatan kepada pemilik kendaraan. Menurut Wallsten (2015) *sharing economy* mengubah fenomena

asset individu yang tidak terpakai menjadi sumber daya yang produktif.

Dengan *sharing economy* memungkinkan setiap orang dapat menikmati sebuah layanan kendaraan walaupun orang tersebut tidak memiliki kendaraan pribadi melalui penyewaan. Secara ekonomis asset yang awalnya tidak menghasilkan pendapatan menjadi memberikan keuntungan dan konsumen mendapatkan jasa dari pengelolaan asset pribadi (kendaraan).

Selanjutnya *sharing economy* menjadikan masyarakat yang menganggur dan setengah menganggur dapat berkurang dengan memanfaatkan kemampuan asset untuk mengemudi kendaraan dalam transportasi online. *Sharing economy* menghasilkan nilai yaitu upah dari konsumen dengan bersedia membayar dari pemanfaatan asset yang tidak produktif.

Kemunculan Transportasi online telah memberikan respon dari jasa penggunaan transportasi lainnya yang beroperasi secara konvensional. Seharusnya yang dilakukan transportasi konvensional adalah meningkatkan kualitas pelayanan baik dari segi kenyamanan dan keamanan.

Ride Sharing

Ride Sharing ialah sebuah perjalanan tunggal atau berulang dengan jadwal yang tidak tetap, yang diselenggarakan dalam satu waktu, dengan pengkonfirmasi perjalanan beberapa menit sebelum berangkat atau jauh sebelum perjalanan dijadwalkan.

Ride sharing sebenarnya sudah menjadi salah satu solusi untuk mengatasi permasalahan transportasi di banyak kota besar (Rogers, 2015; Fraiberger & Sundararajan, 2015). *Ride sharing* adalah konsep yang menekankan pada *sharing* atau berbagi kendaraan dengan orang lain dengan tujuan untuk mendapatkan cara yang lebih ekonomis dalam bepergian (Ride Hunt, 2015).

Untuk mendukung berjalannya *Ride Sharing* teknologi yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Alat komunikasi Smartphone.
2. Koneksi jaringan internet yang terus terhubung dengan pengemudi yang menjalin komunikasi pada saat penjemputan user (pemakai) dan sampai kepada user berada pada tujuan yang dituju.
3. *Global Positioning System (GPS)* mendukung penetapan lokasi penjemputan dan arah tujuan pengantaran.

4. Penyimpanan data user (konsumen) dan pengemudi, menyimpan data catatan pengemudi dan data pengemudi (jenis dan nomor kendaraan serta nama dan foto pengemudi).
5. Penilaian, memungkinkan konsumen untuk mengevaluasi pengemudi sehingga dapat meningkatkan pelayanan kepada konsumen.
6. Transaksi keuangan dapat berupa cash dan non tunai.

Kualitas Layanan

- a. Reliabilitas (*reliability*), meliputi dua aspek utama, yaitu konsistensi kinerja (*performance*) dan sifat dapat dipercaya (*dependability*). Hal ini berarti perusahaan mampu menyampaikan jasanya secara benar sejak awal (*right the first time*), memenuhi janjinya secara akurat dan andal (misalnya, menyampaikan jasa sesuai dengan jadwal yang disepakati), menyimpan data (*record*) secara tepat dan mengirimkan tagihan yang akurat.
- b. Responsivitas atau daya tanggap (*responsiveness*), yaitu kesiapan dan para karyawan untuk membantu para pelanggan dan menyampaikan jasa secara cepat. Beberapa contoh diantaranya: ketepatan waktu layanan, pengiriman slip transaksi secepatnya, kecepatan menghubungi kembali pelanggan, dan penyampaian layanan secara cepat.
- c. Kompetensi (*competency*), yaitu penguasaan keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan agar dapat menyampaikan jasa sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Termasuk di dalamnya adalah pengetahuan dan keterampilan karyawan kontak, pengetahuan dan keterampilan personil dukungan operasional, dan kapabilitas riset organisasi.
- d. Akses (*access*), yaitu meliputi kemudahan untuk dihubungi atau ditemui (*approachability*) dan kemudahan kontak. Hal ini berarti lokasi fasilitas jasa mudah dijangkau, waktu mengantri atau menunggu tidak terlalu lama, saluran komunikasi perusahaan mudah dihubungi (contohnya telepon, surat, e-mail, fax, dan seterusnya), dan jam operasi nyaman.
- e. Kesopanan (*courtesy*), yaitu meliputi sikap santun, respek, atensi, dan keramahan para karyawan kontak (seperti resepsionis, operator telepon, bell person, teller bank dan lain-lain.)

- f. Komunikasi (*communication*), artinya menyampaikan informasi kepada para pelanggan dalam bahasa yang mudah mereka pahami, serta selalu mendengarkan saran dan keluhan pelanggan. Termasuk didalamnya adalah penjelasan mengenai jasa/layanan yang ditawarkan.
- g. Kredibilitas (*credibility*), yaitu sifat jujur dan dapat dipercaya. Kredibilitas mencakup nama perusahaan, reputasi perusahaan, karakter pribadi karyawan kontak, dan interaksi dengan pelanggan (*hard selling versus soft selling approach*).

Perluasan Kesempatan Kerja

Pengertian angkatan kerja adalah penduduk yang telah memasuki usia kerja. Baik seseorang itu telah bekerja, belum bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Berdasarkan ketentuan pemerintah Indonesia, penduduk yang telah berusia minimal 15 tahun hingga 65 tahun termasuk penduduk yang sudah memasuki usia kerja.

- a. Bukan angkatan kerja, bukan angkatan kerja adalah penduduk usia produktif yang tidak bersedia bekerja atau belum bekerja. Misal, pelajar dan mahasiswa yang masih bersekolah.
- b. Angkatan kerja, angkatan kerja adalah penduduk usia produktif yang sudah mempunyai pekerjaan atau sedang mencari pekerjaan.

Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. Untuk mengetahui banyaknya jumlah angkatan kerja yang dapat diserap oleh pasar kerja, biasanya dipakai suatu ukuran yang dinamakan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK). Besarnya TPAK dapat dihitung menggunakan rumus berikut.

$$\text{TPAK} = \frac{\text{jumlah angkatan kerja}}{\text{jumlah tenaga kerja}} \times 100\%$$

TPAK dinyatakan dalam ukuran persen. Untuk kepentingan analisis lebih lanjut, TPAK dapat dipilah berdasarkan kepentingannya. Misalnya, berdasarkan jenis kelamin, kelompok usia, dan lapangan pekerjaan.

Kesempatan kerja dapat diartikan sebagai permintaan tenaga kerja, yaitu suatu keadaan yang menggambarkan adanya kesempatan kerja yang siap diisi oleh penawar kerja (pencari

kerja). Oleh karena itu, terjadi hubungan antara permintaan tenaga kerja dan penawaran tenaga kerja di pasar tenaga kerja. Di Indonesia, jumlah penduduk yang besar mengakibatkan kelebihan tenaga kerja (pencari pekerjaan) yang tidak sesuai dengan permintaannya. Kesempatan kerja yang tidak seimbang dengan angkatan kerja menyebabkan terjadinya pengangguran.

Pengangguran adalah angkatan kerja yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Pengangguran akan merugikan negara dan akan memberatkan keluarga karena kebutuhannya menjadi beban keluarga yang sudah bekerja. Indikator beban ini disebut Dependency Ratio, yang dihitung dengan cara:

$$\text{Dependency Ratio (DR)} = \frac{\text{penduduk luar usia kerja}}{\text{penduduk usia kerja}}$$

Makin tinggi tingkat Dependency Ratio (DR), makin buruk tingkat beban yang harus ditanggung setiap penduduk produktif.

Fungsi permintaan tenaga kerja didasarkan pada teori bahwa berapa penambahan tenaga kerja dari setiap penambahan usaha baru yang dinamakan marjinal. Dengan adanya penambahan tenaga kerja maka menghasilkan penambahan penerimaan marjinal atau *marjinal revenue* (MR).

$$\text{MR} = \text{VMPPL} = \text{MPPL} \cdot P$$

Penerimaan marjinal merupakan besarnya tambahan hasil dikalikan dengan harga per unit.

Elastisitas Tenaga Kerja

Elastisitas permintaan tenaga kerja yaitu persentase perubahan kesempatan kerja dalam jangka pendek karena perubahan satu persen tingkat upah. Permintaan tenaga kerja di atas bersifat elastis karena memiliki elastisitas lebih dari satu dalam nilai absolut. Besar kecilnya elastisitas permintaan tergantung dari substitusi tenaga kerja dengan faktor produksi lain, elastisitas permintaan terhadap barang yang dihasilkan, proporsi biaya tenaga kerja terhadap seluruh biaya produksi, dan elastisitas penawaran dari faktor produksi pelengkap lainnya.

Penduduk yang bekerja terserap dan tersebar diberbagai sektor seperti pertanian, keuangan, perdagangan dan lain sebagainya. Tiap sektor mengalami laju pertumbuhan yang

berbeda. Laju pertumbuhan yang berbeda tersebut mengakibatkan dua hal. Pertama, terdapat perbedaan laju peningkatan produktivitas kerja di masing-masing sektor. Kedua, secara berangsur-angsur terjadi perubahan sektoral, baik dalam penyerapan tenaga kerja maupun dalam kontribusinya terhadap pendapatan nasional. Perbedaan laju pertumbuhan pendapatan regional dan kesempatan kerja tersebut, juga menunjukkan perbedaan elastisitas masing-masing sektor untuk penyerapan tenaga kerja. Elastisitas kesempatan kerja (E) yaitu perbandingan laju pertumbuhan kesempatan kerja $\Delta N/N$ dengan laju pertumbuhan ekonomi $\Delta Y/Y$. Elastisitas tersebut dapat dinyatakan untuk keseluruhan perekonomian atau masing-masing sektor atau subsektor.

Perubahan pendapatan dalam suatu sektor perekonomian akan berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja. Hubungan antara pertumbuhan pendapatan dengan penyerapan tenaga kerja dinyatakan dengan elastisitas permintaan tenaga kerja.

Analisis Kebijakan

Analisis kebijakan dikemukakan oleh Dunn (2000:44), yang menyatakan bahwa secara umum analisis kebijakan dapat dikatakan sebagai suatu aktivitas intelektual dan praktis yang ditujukan untuk menciptakan, secara kritis menilai dan mengkomunikasikan pengetahuan tentang dan di dalam proses kebijakan.

"An approach and methodology for design and identification of preceable alternatives in respect to complex policy issues" (suatu pendekatan dan metodologi untuk mendesain dan menemukan alternatif-alternatif yang dikehendaki berkenaan dengan sejumlah isu yang kompleks).

"That kind of systematic, analytical, scholarly, creative study whose primary motivation is to produce well-supported recommendation for action dealing with concrete problems" (sejenis studi yang sistematis, berdisiplin, analitis, cerdas, dan kreatif yang dilakukan dengan maksud untuk menghasilkan rekomendasi yang andal berupa tindakan-tindakan dalam memecah masalah yang kongkrit).

METODE

Penelitian ini dilakukan di Kota Pematangsiantar, dimana Kota Pematangsiantar merupakan salah satu wilayah yang perkembangan transportasi onlinenya terus berkembang baik pengemudi dan pemakainya (konsumen).

Penelitian ini dilakukan dengan metode survey maka data utama yang dilakukan diambil dari data primer dan sebagai pendukung tambahan adalah studi literatur publikasi jurnal terkait, data BPS Kota Pematangsiantar, Dinas Perhubungan, Text book dan Jurnal Ilmiah. Data primer dikumpulkan dari responden wawancara yaitu pengemudi transportasi online dan konsumen serta dari hasil pengamatan simulasi yang dilakukan peneliti.

Metode penarikan sampel adalah *purposive (judgement) sampling* yaitu pemilihan sampel berdasarkan beberapa karakteristik yang cocok untuk menjawab tujuan penelitian. Sampel yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah pengemudi ojek online dan konsumen. Metode *purposive sampling* dilakukan dengan memegang prinsip representasi dari setiap populasi.

Tabel 1. Jumlah Sampel Penelitian

| No | Sampel | Jumlah (Orang) | Tujuan Analisis |
|----|------------------|----------------|-----------------------------------|
| 1 | Pengemudi Gojek | 20 | Analisis efisiensi dan pendapatan |
| 2 | Pengemudi Grab | 10 | Analisis Pendapatan |
| 3 | Pengemudi Angkot | 5 | Kontrol dalam analisis efisiensi |
| 4 | OPD | 3 | Analisis Kebijakan |

Analisis rata-rata waktu perjalanan, rata-rata waktu tunggu dan biaya perjalanan. Untuk dapat mengukur tingkat efisiensi gojek online dalam transportasi umum, maka dilakukan dengan mengobservasi dan membandingkan kinerja atau tingkat efisiensi gojek online

dengan Angkot. Indikator kinerja atau tingkat efisiensi tersebut diukur dengan :

- a. kecepatan perjalanan antara gojek dengan angkot yang ditinjau berdasarkan kecepatan rata-rata kendaraan dari tempat penjemputan

- konsumen hingga ke tujuan, hal ini juga dikenal sebagai observasi waktu perjalanan
- b. keunggulan, yang mengacu pada rata-rata waktu menunggu dan
 - c. beban penumpang yang mengacu pada ongkos/biaya perjalanan.

1. Analisis Elastisitas Tenaga Kerja terhadap TNC
Apabila nilai elastisitas lebih besar dari satu berarti laju permintaan tenaga kerja lebih besar dari laju pertumbuhan ojek online sehingga kesempatan kerja menjadi bertambah.

$$\text{Elastisitas} = \frac{\text{Persentase perubahan jumlah permintaan tenaga kerja}}{\text{Persentase perubahan jumlah TNC Transportasi Online}}$$

2. Rank Spearman
Untuk melihat kuat atau tidak hubungan antara pertumbuhan TNC ojek online dengan permintaan tenaga kerja dilakukan perhitungan Rank Spearman. Adapun perhitungan korelasi Rank Spearman, adalah sebagai berikut :

$$r_s = 1 - \frac{6 \sum_{i=1}^n d_i^2}{n(n^2 - 1)}$$

3. Analisis Pendapatan Pengemudi Sebelum dan Sesudah Menjadi Pengemudi Transportasi Online.

Analisis ini bertujuan untuk melihat kesejahteraan yang didapatkan oleh tenaga kerja setelah menjadi pengemudi ojek online dengan menghitung dan membandingkan pendapatan sebelum dan sesudah menjadi pengemudi ojek online. Pendapatan dari ojek online ialah penerimaan yang diterima dari penumpang ditambah bonus yang diperoleh dari perusahaan TNC kemudian dikurangi biaya total

$$Pd = (TR + B) - TC$$

4. Analisis Kebijakan
Setiap jenis analisis harus menyajikan dan menginformasikan data yang menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan. Analisis kebijakan digunakan menguji kebijaksanaan dengan pemecahan masalah ke dalam komponen-komponen serta mensintesis atas alternatif-alternatif yang baru. Aktivitas meliputi wawancara terhadap problem atau isu dengan mengevaluasi program yang sudah selesai.

Tabel 2. Tiga Pendekatan Analisis Kebijakan

| Pendekatan | Pertanyaan Pokok | Tipe Informasi |
|------------------|---------------------------------------|----------------|
| Empiris | Apakah sesuatu itu ada? (fakta-fakta) | Penandaan |
| Evaluatif | Berapa nilai sesuatu ? (nilai-nilai) | Evaluatif |
| Normatif | Apa yang harus dilakukan ? (tindakan) | Anjuran |

Sumber : Analisis Kebijakan, William N. Dunn (2000)

HASIL DAN PEMBAHASAN

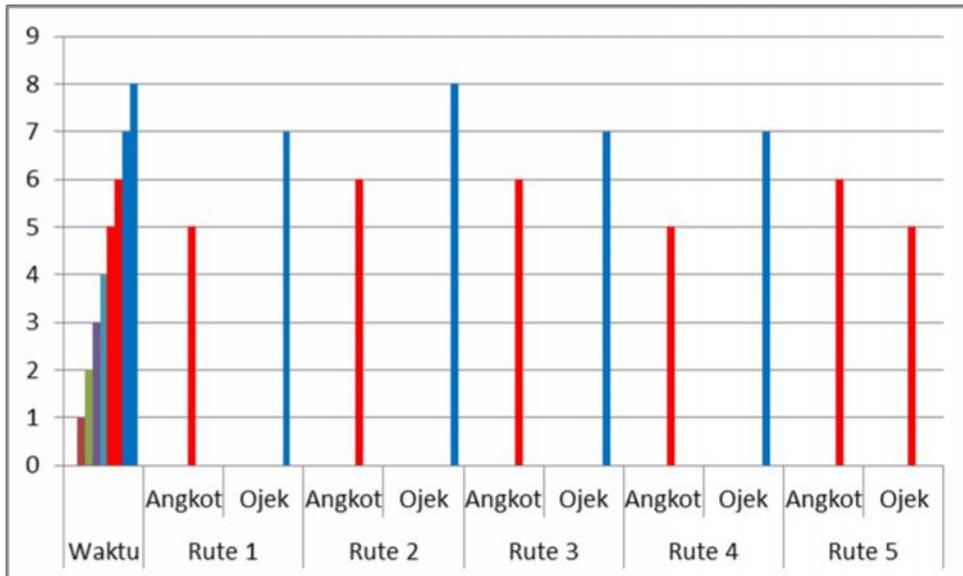
Efisiensi Transportasi Online dan Transportasi Umum

Setelah dilakukan 5 rute dalam analisis yang menggambarkan perjalanan mengelilingi Kota Pematangsiantar dengan menggunakan transportasi online dan Angkutan Kota (Angkot) dengan waktu yang bersamaan. Simulasi dilakukan untuk membandingkan indikator kinerja transportasi online dengan Angkot antara lain lama waktu menunggu, lama waktu perjalanan, dan biaya perjalanan.

- Lama Waktu Menunggu

Pengamatan dari perhitungan lama waktu menunggu dilakukan secara bersamaan yaitu mulai dari pemesanan transportasi online melalui aplikasi di smartphone dan lama waktu menunggu Angkot pada titik (lokasi) yang sama. Perhitungan dimulai sampai transportasi online dan Angkutan Kota (Angkot) tiba pada titik (lokasi) penjemputan.

Gambar 1. Grafik Lama Waktu Menunggu



Dari hasil perhitungan lama waktu menunggu penjemputan transportasi online lebih lama jika dibandingkan dengan Angkot. Disebabkan karena dalam memilih pengemudi pada transportasi online ditentukan oleh server/sistem yang bekerja. Server bekerja secara acak. Ketika penumpang mendapatkan pengemudi melalui server, dibutuhkan lagi waktu dalam komunikasi (telephone) menentukan titik (lokasi) jemput penumpang. Sedangkan penumpang Angkot selalu mendapatkan kendaraan yang lebih dekat.

Berdasarkan hasil observasi dari 5 (lima) rute tersebut, rata-rata lama waktu menunggu ojek *online* sebesar 7.6 menit dengan lama waktu menunggu paling singkat sebesar 5.3 menit. Kesimpulan terhadap perhitungan lama waktu menunggu antara ojek online dengan Angkutan Kota (Angkot) ialah bahwa Angkutan

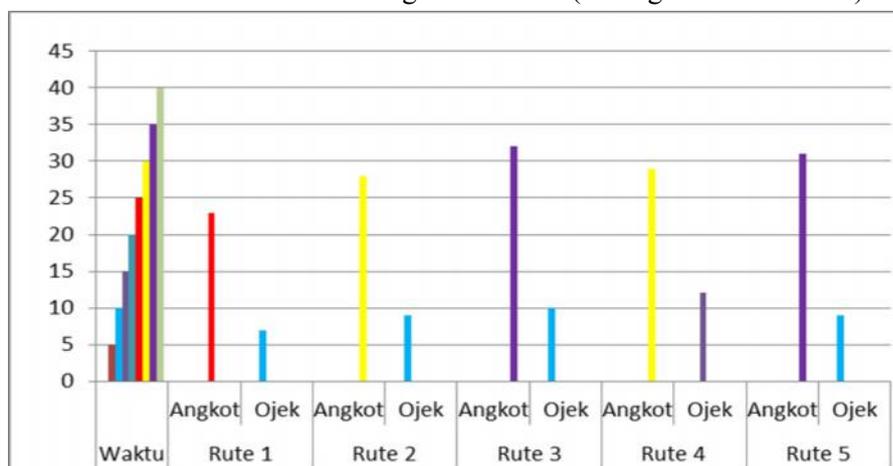
Kota (Angkot) 150 % lebih singkat/cepat dari pada ojek *online*.

- Lama Waktu Perjalanan

Perhitungan lama waktu perjalanan ojek *online* dan Angkot dilakukan secara bersamaan. Perhitungan tersebut dimulai ketika pengamat mulai melakukan perjalanan dari titik lokasi menunggu atau penjemputan. Setelah melakukan pemesanan maka perhitungan lama waktu perjalanan ojek *online* dan Angkot dimulai hingga ojek *online* dan Angkutan Kota (Angkot) tiba dititik lokasi tujuan atau pemberhentian.

Berdasarkan perhitungan lama waktu perjalanan di 5 (lima) rute yang telah ditentukan maka dapat ditunjukkan ojek *online* memiliki lama waktu perjalanan yang lebih singkat atau cepat jika dibandingkan dengan Angkutan Kota (Angkutan Kota).

Gambar 2. Lama Waktu Yang Dibutuhkan (Hitungan Dalam Menit)



Lama waktu perjalanan oleh Angkutan Kota kepada penumpang lebih panjang jika dibandingkan dengan ojek *online* karena ojek *online* dapat menghindari kemacetan di jalanan Kota Pematangsiantar. Sedangkan, Angkutan Kota (Angkot) tidak dapat menghindar dari kemacetan di jalanan Kota Pematangsiantar. Kemudian, berdasarkan hasil observasi, peneliti menemukan empat alasan penyebab mengapa Angkot memiliki lama waktu perjalanan yang lebih panjang dibandingkan dengan ojek *online* yaitu:

Pertama, ditengah perjalanan Angkot akan berhenti di SPBU untuk mengisi bahan bakar hal ini juga mengakibatkan memperpanjang lama waktu perjalanan. Kedua, Angkot berhenti ditengah perjalanan untuk mencari penumpang sehingga memperpanjang lama waktu perjalanan. Ketiga, penumpang dipaksa untuk pindah Angkot karena supir Angkot beralasan bahwa penumpang hanya sedikit dan akan merugikan pemilik angkot sehingga supir akan kembali berputar ketitik awal untuk mencari penumpang yang lebih banyak. Keempat, Angkutan kota berhenti di setiap pull angkutan kota (pemberhentian).

- Biaya Perjalanan.

Perhitungan biaya perjalanan ojek *online* dan Angkot dilakukan secara berbeda. Keunggulan dari ojek *online* ialah konsumen dapat melihat biaya perjalanan dari titik awal hingga titik akhir pemberhentian langsung pada aplikasi ojek *online* yang terdapat dalam smartphone setelah melakukan proses

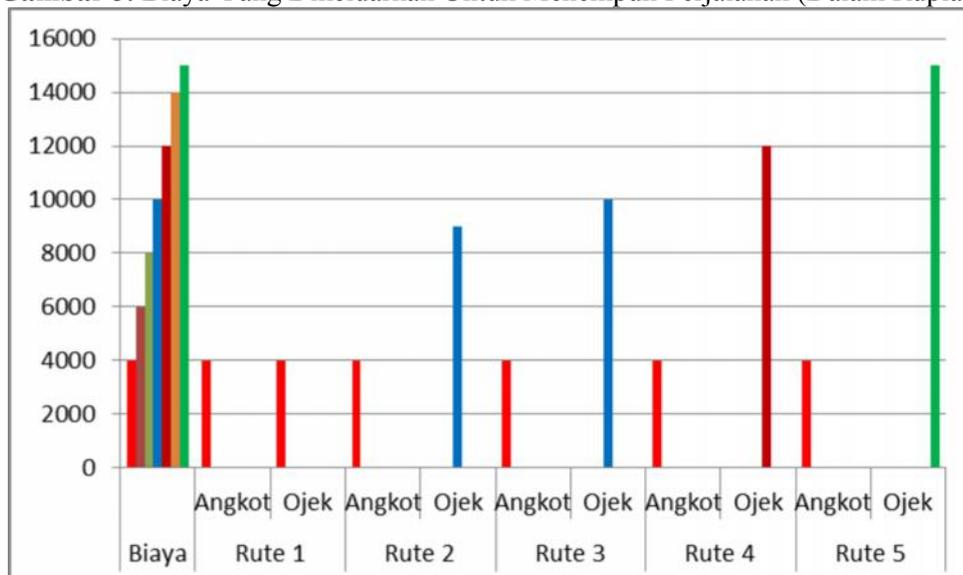
pemesanan, sehingga konsumen memiliki pilihan melanjutkan perjalanan atau mengganti layanan ojek *online* ke TNC lain yang lebih murah.

Konsumen tidak mengetahui berapa total biaya perjalanan Angkutan Kota (Angkot) dari titik awal hingga titik akhir pemberhentian yang harus dikeluarkan, karena transparansi biaya tidak diberitahukan oleh supir/pengemudi Angkutan Kota (Angkot). Kemudian, konsumen juga tidak mengetahui total biaya perjalanan karena untuk sampai ke titik akhir pemberhentian harus menaiki lebih dari satu Angkutan Kota (Angkot) sehingga total biaya perjalanan tidak bisa diduga sebelumnya.

Pembayaran total biaya perjalanan ojek *online* dilakukan setelah konsumen telah sampai pada titik akhir pemberhentian dan total biaya perjalanan sesuai dengan nilai yang telah tercantum pada saat proses pemesanan. Kemudian, selain pembayaran secara cash konsumen juga dapat melakukan pembayaran total biaya perjalanan ojek *online* secara debit menggunakan kartu rekening atau saldo yang telah disimpan sebelumnya yang sering disebut GoPay.

Pembayaran biaya perjalanan Angkutan kota dilakukan setelah pemberhentian sebelum melanjutkan menaiki Angkutan Kota (Angkot) lainnya untuk sampai ke titik akhir pemberhentian. Kemudian, pembayaran biaya perjalanan Angkutan Kota (Angkot) dilakukan secara cash dan tidak dapat dilakukan secara debit.

Gambar 3. Biaya Yang Dikeluarkan Untuk Menempuh Perjalanan (Dalam Rupiah)



Biaya rata-rata perjalanan mengelilingi Kota Pematangsiantar menggunakan Angkutan Kota (Angkot) berdasarkan hasil observasi yaitu sebesar Rp. 4.000,-. Dengan menggunakan *ojek online* biaya perjalanan paling murah sebesar Rp. 4.000,- dan biaya perjalanan paling mahal sebesar Rp. 15.000,-

- Dampak Ojek Online Terhadap Kesempatan Kerja.

Transportation Network Companies (TNC) *ojek online* dalam pengoperasian usahanya membutuhkan tenaga kerja sebagai pengemudi sehingga dengan adanya *TNC* *ojek online* di Kota Pematangsiantar tercipta lapangan kerja baru bagi penduduk Kota Pematangsiantar. *TNC* *ojek online* pertama yang hadir di Kota Pematangsiantar yaitu Gojek telah mampu menyerap tenaga kerja sebesar rata-rata 900-1000 tenaga kerja, per hari. (Sumber : Greenlight Kantor Gojek Pematangsiantar).

Dari hasil perhitungan menjelaskan bahwa peningkatan pertumbuhan *TNC* *ojek online* di Kota Pematangsiantar sebesar 1 % dapat meningkatkan permintaan tenaga kerja pengemudi *ojek online* di Kota Pematangsiantar sebesar 32 %.

Menurut keterangan wawancara pimpinan kantor *Gojreck* di Pematangsiantar ialah rata-rata jumlah orang yang mendaftar menjadi pengemudi *Gojreck* di Kota Pematangsiantar setiap harinya adalah sebesar 40 orang, maka jika dihitung jumlah orang yang mendaftar menjadi pengemudi *Gojreck* tiap minggunya ialah sebesar 200 orang (Senin-Jumat).

Jika dihitung jumlah orang yang mendaftar sebagai pengemudi *Gojreck* di Kota Pematangsiantar selama tahun 2017 maka didapatkan hasil estimasi sebesar 2500 orang. Sedangkan, untuk total jumlah orang yang mendaftar sebagai pengemudi *Gojreck* di Kota Pematangsiantar hingga tahun 2018 ialah terdapat sebesar 3500 orang. Maka, peningkatan jumlah orang yang mendaftar menjadi pengemudi *Gojreck* pada tahun 2017 hingga 2018 ialah sebesar 800 – 1000 orang atau sebesar 35 %.

Ojek online akan bermanfaat apabila pendapatan yang diterima oleh pengemudi lebih besar dari pada pendapatan pada pekerjaan sebelumnya. Pendapatan mengemudi *ojek online* yang lebih besar dari pada pendapatan pada pekerjaan sebelumnya, menjadi penyebab terjadinya mobilitas tenaga kerja. Pendapatan

mengemudi *ojek online* yang lebih besar dari pada pendapatan pada pekerjaan sebelumnya, membuat kesejahteraan pengemudi dan keluarganya menjadi meningkat. Pendapatan dari *ojek online* ialah penerimaan yang diterima dari penumpang ditambah bonus yang diperoleh dari perusahaan *TNC* kemudian dikurangi biaya total.

Peneliti melakukan survei terhadap 30 orang pengemudi *ojek online* di Kota Pematangsiantar, 30 orang tersebut terdiri dari 20 pengemudi *Gojek*, 10 pengemudi *Grab*. Tiap-tiap *TNC* *ojek online* mempunyai sistem komisi dan bonus yang berbeda-beda untuk pengemudinya. Namun, untuk biaya/pengeluaran yang dikeluarkan oleh pengemudi *ojek online* agar bisa menarik penumpang tergolong sama yaitu pengeluaran untuk Bahan Bakar Minyak (BBM). Sehingga, pendapatan pengemudi *ojek online* ialah upah dari penumpang ditambah dengan bonus yang diberikan oleh perusahaan *TNC*, setelah dijumlahkan kemudian dikurangi dengan biaya BBM.

Pekerjaan pengemudi sebelum menjadi pengemudi *ojek online* beragam, namun mayoritas pengemudi memiliki pekerjaan sebelum menjadi pengemudi *ojek online* artinya mereka aktif berkerja atau sedang berkuliah. Usia pengemudi yang peneliti temui beragam, mulai dari usia 20 tahun seperti pengemudi yang masih berstatus mahasiswa hingga pengemudi yang berumur 50 tahun, namun mayoritas pengemudi yang peneliti temui berusia 30-40 tahun.

Pengemudi yang peneliti temui adalah pengemudi yang berjenis kelamin laki-laki, peneliti tidak menjumpai pengemudi berjenis kelamin perempuan, namun berdasarkan data yang peneliti dapat, pengemudi *ojek online* juga diisi oleh pekerja berjenis kelamin perempuan. Pengemudi *ojek online* yang peneliti temui bekerja lebih dari 6 jam tiap hari untuk mencari dan menarik penumpang. *Sharing Economy* yang diterapkan oleh *ojek online* membuat pengemudi terbebas dari waktu bekerja. Pengemudi dapat bekerja sesuai dengan waktu yang mereka inginkan. *Sharing Economy* ini juga memungkinkan pengemudi untuk memiliki pekerjaan disamping bekerja sebagai pengemudi *ojek online* sehingga pendapatan yang dimiliki pengemudi menjadi lebih besar.

Analisis dampak *ojek online* terhadap kesejahteraan pengemudi *ojek online*, dilakukan menggunakan pendekatan analisis pendapatan

sebelum dan sesudah menjadi pengemudi ojek *online*, namun sebelum membahas dampak ojek *online* terhadap kesejahteraan pengemudi ojek *online*, terdapat gambaran umum mengenai pendapatan ojek konvensional sebelum dan sesudah adanya ojek *online* dan persepsi ojek konvensional terhadap kehadiran ojek *online*.

- Pendapatan Seluruh Pengemudi Ojek *Online*.

Analisis dampak ojek *online* terhadap kesejahteraan pengemudi ojek *online*, dilakukan menggunakan pendekatan analisis pendapatan sebelum dan sesudah menjadi pengemudi ojek *online*. Responden yang dipilih sebagai sampel ialah berjumlah 30 orang yang ditemui di Terminal Parluasan Pematangsiantar dan sekitar kampus Universitas HKBP Nommensen Pematangsiantar yang terdiri dari 20 orang pengemudi Gojek, 10 orang pengemudi Grab. Penentuan responden menggunakan teknik penentuan sample *Purposive Sampling*.

Berdasarkan data primer hasil survei pendapatan 30 orang pengemudi ojek *online* yang peneliti analisis dapat diketahui bahwa, rata-rata pendapatan 30 pengemudi ojek *online* tersebut atau rata-rata pendapatan yang didapat dari bekerja sebagai pengemudi ojek *online* ialah sebesar Rp. 4,850,000,-. Sedangkan, rata-rata pendapatan 30 pengemudi pada pekerjaan sebelumnya atau rata-rata pendapatan yang didapat dari bekerja pada pekerjaan sebelumnya ialah sebesar Rp. 3,800,500,-. Sehingga, dapat diketahui bahwa persentase peningkatan pendapatan setelah bekerja sebagai pengemudi ojek *online* ialah sebesar 42 %.

Analisis Kebijakan

- Empiris

Keberadaan ekonomi digital akan ditandai dengan semakin maraknya perkembangan bisnis atau transaksi perdagangan yang memanfaatkan internet sebagai media komunikasi, kolaborasi, dan kooperasi antar perusahaan ataupun individu. Pada dasarnya, sistem yang dibangun oleh ekonomi digital sangat signifikan berbeda dengan sistem ekonomi yang selama ini dikenal oleh masyarakat luas. Terlebih lagi, ekonomi digital ternyata dianggap lebih mampu menjawab permasalahan ekonomi saat ini.

Salah satu bentuk jasa digital yang belakangan mewarnai kehidupan masyarakat Indonesia adalah transportasi online. Kehadirannya semakin lama semakin krusial dan semakin tidak bisa dipisahkan dengan

kehidupan masyarakat di kota-kota besar. Oleh karena itu, pembahasan kali ini ingin mencoba melihat peluang transportasi online dalam menjawab tantangan transportasi yang saat ini berkembang di Pematangsiantar.

1. Konstitusi mengamanatkan dalam Pasal 34 ayat (3) bahwa Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum. Fasilitas pelayanan umum ini termasuk di dalamnya adalah transportasi publik.
 2. Hasil analisis efisiensi (waktu, ketepatan, dan efisiensi serta efektifitas) transportasi *online* memberikan kemudahan kepada masyarakat.
 3. Berangkat dari prinsip kebebasan dalam bergerak (*freedom of mobility*), transportasi online diciptakan untuk menjawab tantangan sistem transportasi yang efektif untuk membantu mobilitas masyarakat.
 4. Hasil analisis dampak ekonomi (kesempatan kerja, peningkatan pendapatan) memberikan dampak yang signifikan dan positif.
- Evaluatif

Ada tiga alasan penolakan terhadap keberadaan transportasi online :

Pertama, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU No. 22/2009) dan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (PP No. 74/2014) hanya diatur bahwa pengangkutan orang dengan kendaraan umum dilakukan dengan menggunakan mobil bus atau mobil penumpang. Transportasi online dianggap ilegal karena perundang-undangan yang mengatur dengan transportasi tidak mengatur kendaraan bermotor roda dua termasuk ke dalam salah satu moda transportasi publik.

Kedua, keberadaan transportasi online berpotensi mematikan bisnis transportasi konvensional yang sudah ada sebelumnya (angkutan kota, becak, ojek konvensional).

Ketiga, transportasi online menjadikan sebuah masalah baru dengan kesemberautan ojek online.

“yang iyanya, pengemudi sembarangan menempatkan sembarangan posisi sepeda motornya, kadang di depan trotoar”... narasumber 1.

- Anjuran

Permasalahan yakni di satu sisi transportasi yang “ilegal” itu dibutuhkan masyarakat, di sisi lain hukum belum mengatur dan harus diakui penegakan hukum yang sudah

ada selama ini lemah. Oleh karena itu diperlukan anjuran :

1. Menyusun kebijakan alternatif yakni melalui pembaharuan payung hukum sistem transportasi publik di Kota Pematangsiantar.
2. Dinas Perhubungan menentukan regulasi rasio perbandingan jumlah penduduk dengan jumlah pengemudi (driver) dan merekomendasikan aturan tersebut kepada pihak perusahaan transportasi online.
3. Untuk mengatasi persoalan rumitnya transportasi publik, Pemerintah Kota (Dinas Perhubungan) perlu menciptakan sistem transportasi publik yang berkelanjutan dengan cara melakukan revitalisasi dalam semua aspek yang berkaitan dengan transportasi publik.
4. Pemerintah Kota (Dinas Perhubungan) sebaiknya segera membuat regulasi untuk mengatur keberadaan transportasi online agar dapat memberikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kepada Kota Pematangsiantar melalui kewajiban perizinan tidak hanya perizinan dari pusat, membuat aturan pajak (*state revenue*) di setiap daerah seperti Kota Pematangsiantar.
5. Kemudahan, kenyamanan transportasi, keamanan dan efektifitas dalam penggunaan transportasi online menjadi salah satu tolak ukur dalam perubahan layanan transportasi publik di Kota Pematangsiantar khususnya transportasi konvensional (angkot dan becak).
6. Preferensi tambahan masyarakat dalam memilih jenis transportasi yang berbeda seperti transportasi online menjadikan sebuah roda perekonomian yang baru dalam menambah pendapatan masyarakat.

KESIMPULAN

Setelah melakukan serangkaian studi dan menghasilkan hasil analisa dan pembahasan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kehadiran transportasi online memberikan dampak yang positif dan kehadirannya sangat memberikan kemudahan kepada masyarakat.
2. Transportasi online mengurangi tingkat pengangguran di masyarakat dan menambah pendapatan masyarakat di Kota Pematangsiantar.
3. Kebijakan transportasi di Kota Pematangsiantar belum mengakomodir transportasi online, menjadikan transportasi

online menjadi illegal di masyarakat walaupun kemanfaatannya sangat dirasakan masyarakat.

SARAN

Dari beberapa kesimpulan yang dikemukakan di atas, dapat disarankan kepada para pengambil kebijakan dalam hal ini khususnya Pemerintah Kota Pematangsiantar untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Pemerintah Kota Pematangsiantar melalui OPD terkait Dinas Perhubungan menentukan regulasi rasio perbandingan jumlah penduduk dengan jumlah pengemudi (driver) dan merekomendasikan aturan tersebut kepada pihak perusahaan transportasi online.
2. Menghilangkan kesan “illegalnya” transportasi online, pemerintah dengan OPD terkait melakukan tahapan yang sama sebagaimana proses transportasi konvensional dengan uji KIR, pemasangan stiker, dan penandaan (stiker) pada kendaraan transportasi online.
3. Perlunya Peraturan Daerah (Perda) untuk mengatur keseluruhan transportasi konvensional dan transportasi online sehingga saling terintegrasi dan dapat mengurangi konflik dikarenakan monopoli transportasi online.
4. Agar Pemerintah mendapatkan keuntungan/Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan hadirnya transportasi online, pemerintah menyusun aturan MOU kepada pihak perusahaan transportasi online. Mencari peluang bagaimana mekanisme yang disepakati agar Pemerintah mendapat PAD misalnya : penarikan retribusi atau sejenisnya.
5. Adanya upaya yang serius dari Pemerintah untuk menindak setiap pelanggaran aturan pada regulasi transportasi konvensional, agar *image* transportasi konvensional tidak tergerus oleh kehadiran transportasi online.

DAFTAR PUSTAKA

Abbas, Salim. 2004. Manajemen Transportasi. Jakarta : Raja Grafindo Persada

Fraiberger & Sundararajan. (2015). Peer to Peer Rental Markets in The Sharing Economy.

Kota Pematangsiantar Dalam Angka, BPS Kota Pematangsiantar 2018

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 98 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek.

Ride Hunt. (2015). Apa itu Ride Sharing?. Tersedia di <http://www.ridehunt.id/apa-itu-ride-sharing>.

<http://wartaekonomi.co.id/read/2015/09/18/73020/pemerintah-diminta-buat-aturan-tentang-ojek-online.html>

William N. Dunn (2000), Analisis Kebijakan Publik. PT. Hanindita Graha Widya. Yogyakarta.

Yamit, Zulian. 2005. Manajemen Kualitas Produk dan Jasa. Edisi pertama, cetakan keempat. Yogyakarta : Ekonisia

DISPARITAS KUALITAS PELAYANAN ANTARA BECAK SIANTAR DAN GO-JEK DALAM PEMENUHAN KEBUTUHAN MASYARAKAT DI KOTA PEMATANGSIANTAR

(QUALITY DISPARITY BETWEEN SIANTAR PEDICAP AND GO-JEK IN FULFILLING SOCIAL NEEDS IN PEMATANGSIANTAR)

¹ Marisi Butarbutar, ² Acai Sudirman dan ³ Efendi

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Sultan Agung Pematangsiantar
Jl. Surabaya No.19 Pematangsiantar
marisi.butar2@gmail.com

Diterima : 17 Oktober 2018; Direvisi 15 November 2018; Disetujui 4 Desember 2018

ABSTRAK

Munculnya transportasi *online* berbasis aplikasi seperti Go-Jek dan Grab dirasakan telah berdampak signifikan terhadap transportasi konvensional seperti Becak Siantar. Persaingan ini menimbulkan persepsi di masyarakat tentang disparitas dalam hal kualitas pelayanan yang ditawarkan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui gambaran disparitas kualitas pelayanan yang ditawarkan oleh Becak Siantar dan Go-Jek. Objek penelitian pada Becak Siantar dan Go-Jek. Metode penelitian menggunakan penelitian lapangan dan kepustakaan. Teknik pengumpulan data melalui observasi, dokumentasi dan wawancara dengan data yang bersifat kualitatif yang bersumber dari data primer dan sekunder. Teknik analisis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Disparitas kualitas pelayanan dapat digambarkan dari beberapa dimensi berupa *reability, responsiveness, competence, access, courtesy, communication, credibility, security, understanding or knowing the customer* dan *tangibles*. Untuk keseluruhan disparitas kualitas pelayanan transportasi Becak Siantar dan transportasi Go-Jek ditinjau dari beberapa dimensi masih belum optimal, sehingga dibutuhkan regulasi yang mewakili kedua transportasi serta perlu upaya yang konkret dari Pemerintah Kota Pematangsiantar dan Organisasi Perangkat Daerah terkait untuk mengoptimalkan keberadaan dari Becak Siantar dan Go-Jek. Disarankan bagi Pemerintah Kota Pematangsiantar sebaiknya merancang suatu sistem yang mengkolaborasikan pelayanan Becak Siantar dan Go-Jek sehingga tidak terjadi ketimpangan sosial antar kedua transportasi tersebut.

Kata kunci : disparitas, kualitas pelayanan dan transportasi

ABSTRACT

The emerge of online Transportation based on online application like Go-Jek and Grab give significant impact on conventional transportation such as Siantar pedicaps. The competition results quality disparity in service based on social perception between Siantar pedicaps and Go-Jek. The research objects are Siantar pedicaps and Go-Jek. Field research and Library research are implemented. Observation, documentation and interview are tools to get primary and secondary data. Qualitative Descriptive Analysis is undertaken. The disparity of service of quality might be described in several dimensions such as reability, responsiveness, competence, access, courtesy, communication, credibility, security, understanding or knowing the customer dan tangibles. The disparities in service quality between Siantar pedicaps and Go-jek in several aspects are yet optimum. As a result, several regulations represent both transportation modes need to be produced and Pematangsiantar Local Government has obligation to perform tangible actions, particularly government agencies that deal with transportation issues. A system designed

not only to accommodate Siantar Pedicaps' and Go-Jek's interest but also to collaborate in terms of service.

Keywords : *disparity, service quality and transportation*

PENDAHULUAN

Dalam kehidupan sehari-hari kegiatan transaksi jual beli tidak dapat dipisahkan dari aktifitas kehidupan masyarakat. Perkembangan usaha yang kontemporer telah diwarnai dengan berbagai macam persaingan di segala bidang. Melihat kondisi tersebut menyebabkan pelaku usaha semakin dituntut untuk mempunyai strategi yang tepat dalam memenuhi target serta sasaran kepuasan konsumen. Salah satu perkembangan yang semakin ketat adalah perkembangan di sektor jasa transportasi khususnya di Kota Pematangsiantar. Transportasi merupakan salah satu sarana perhubungan yang sangat penting dalam segala hal aktivitas manusia. Semakin berkembang sarana transportasi, maka akan semakin mudah terjalin hubungan antar manusia.

Sektor transportasi dikenal sebagai salah satu mata rantai jaringan distribusi barang dan penumpang yang telah berkembang sangat dinamis serta berperan didalam menunjang pembangunan politik, ekonomi, sosial budaya maupun pertahanan keamanan. Kegunaan transportasi berperan vital dalam membantu penyaluran barang dan jasa jika dilihat dari era modernisasi saat ini, dimana segala sesuatu hal harus cepat dan juga tepat sasaran. Layanan transportasi *online* atau angkutan bersama adalah layanan transportasi perorangan dimana pelanggan dapat memesan tumpangan (mobil, sepeda motor, dan lain-lain) melalui aplikasi seluler dan pengemudi dapat menanggapi pesanan melalui aplikasi (Wallsten, 2015).

Beberapa tahun terakhir, Indonesia mengalami transformasi dalam hal transportasi. Perkembangan teknologi yang semakin modern telah menambah dunia transportasi di Indonesia. Hal ini terlihat dari bermunculannya model transportasi berbasis *online* pada kota-kota besar di Indonesia. Kehadiran transportasi *online* juga dirasakan oleh masyarakat Kota Pematangsiantar pada saat ini. Munculnya transportasi *online* berbasis aplikasi seperti Go-Jek dan Grab dirasakan telah berdampak signifikan terhadap transportasi konvensional seperti angkutan umum, Becak Siantar, dan ojek pangkalan. Maraknya kehadiran transportasi *online* tidak terlepas dari adanya kebutuhan angkutan transportasi yang lebih

aman, cepat, nyaman, dan terjangkau bagi masyarakat sehingga mengakibatkan eksistensi Becak Siantar semakin berkurang jumlahnya.

Akselerasi perpindahan penggunaan transportasi konvensional terhadap transportasi *online* menimbulkan gesekan-gesekan yang cukup krusial bagi kedua transportasi tersebut sebagai sesama penyedia layanan transportasi. Tentunya ini menjadi polemik tersendiri bagi pemerintah kota dan juga masyarakat dalam merespon keberadaan transportasi *online*. Tendensi masyarakat pada saat ini umumnya menginginkan kualitas pelayanan transportasi yang sifatnya aman, cepat dan nyaman serta harga yang kompetitif mengakibatkan perubahan gaya hidup yang serba instan dan fleksibel. Oleh karena itu, dengan adanya transportasi *online* yang beroperasi di Kota Pematangsiantar dapat memberikan beberapa manfaat seperti pengemudi dan pelanggan dapat mengetahui lokasi masing-masing secara akurat, pelanggan dapat melihat informasi pengemudi dan kendaraan, dan pelanggan dapat dengan mudah menemukan transportasi untuk pergi ke tempat lain (Farin, 2016).

Intensitas kualitas pelayanan yang baik transportasi *online* telah mengakibatkan transportasi konvensional seperti Becak Siantar kesulitan untuk menyeimbangkan kualitas pelayanan yang ditawarkan. Berdasarkan hasil penelitian Syafrino (2017), bahwa transportasi *online* sebagai layanan yang memudahkan masyarakat Indonesia dalam melakukan mobilitas perjalanan. Sedangkan pada hasil penelitian Lintang, dkk. (2016), menyatakan bahwa perilaku sopir bentor (becak mesin) dikatakan tidak sopan karena ada beberapa yang tidak ramah, sering meminta ongkos lebih, dan tidak tertib dalam mematuhi lalu lintas sehingga membahayakan penumpang.

Oleh karena itu, sebagai upaya untuk meneliti lebih lanjut mengenai fenomena kualitas pelayanan yang ditawarkan masing-masing transportasi, maka penulis menggunakan 10 dimensi sebagai manifestasi dari kualitas pelayanan yang meliputi *reability, responsiveness, competence, access, courtesy, communication, credibility, security, understanding or knowing the customer*, dan *tangibles* (Berry dan Parasuraman dalam

Priansa, 2017:56). Adapun yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini adalah : bagaimana gambaran disparitas kualitas pelayanan Becak Siantar dan Go-Jek dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat di Kota Pematangsiantar. Tujuan penelitian untuk mengetahui disparitas kualitas pelayanan Becak Siantar dan Go-Jek dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat Kota Pematangsiantar yang ditinjau dari 10 dimensi kualitas pelayanan. Semoga dengan adanya penelitian ini, Pemerintah Kota Pematangsiantar dan Masyarakat dapat mengetahui disparitas kualitas pelayanan antara Becak Siantar dan Go-Jek dan sebagai salah satu instrumen bahan pertimbangan dalam hal pembuatan keputusan maupun kebijakan yang berkaitan dengan transportasi konvensional dan *online*.

METODE

Objek penelitian pada Becak Siantar dan Go-Jek. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Desain penelitian menggunakan desain penelitian lapangan dan kepustakaan. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang dikumpulkan bersifat kualitatif yang bersumber dari data primer dan sekunder. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif kualitatif. Selanjutnya lokasi penelitian berada di Kota Pematangsiantar tepatnya pada kawasan Taman Bunga Jalan Merdeka dan persimpangan Jalan Diponegoro dan Jalan Surabaya. Observasi dan wawancara dilaksanakan pada hari Sabtu dan Minggu tanggal 29 dan 30 September 2018. Populasi dalam penelitian adalah masyarakat Kota Pematangsiantar. Sedangkan sampel yang digunakan adalah masyarakat yang pernah menggunakan layanan jasa Becak Siantar dan Go-Jek yang ditentukan melalui kegiatan hasil wawancara. Karena keterbatasan waktu penelitian dan biaya, maka tidak seluruh masyarakat yang ada di Kota Pematangsiantar dapat diwawancarai.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Singkat Becak Siantar dan Go-Jek

Birmingham Small Arm (BSA) atau yang lebih dikenal dengan Becak Siantar adalah sepeda motor pabrikan Inggris yang diciptakan untuk kendaraan perang. BSA masuk ke negeri rema ripah loh jenawi pada masa peralihan tentara Jepang ke tentara sekutu (Belanda-

Inggris). BSA kemudian menyebar di setiap jajahan Belanda. BSA mulai masuk tahun 1958 atas inisiatif orang-orang Siantar. Orang Siantar mendatangkannya dari pulau Jawa: Surabaya dan Jakarta. Motor BSA diangkut menggunakan kapal tampomas II (<https://ezrareihardianzz.blogspot.com>).

BSA atau Becak Siantar berbeda dengan becak-becak lain di Indonesia yang memiliki kekhasan. Becak di Jawa umumnya dikayuh oleh manusia sementara Becak Siantar ditarik dengan sepeda motor. Becak motor Siantar lebih unggul karena ditarik motor besar tua bermesin 350 CC dan 500 CC. Becak Siantar sudah dapat dijadikan salah satu situs purbakala, karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992, setiap benda peninggalan sejarah di atas 50 tahun dapat dinyatakan cagar budaya dan wajib dilindungi pemerintah (<https://id.wikibooks.org/wiki>).

PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa atau yang lebih dikenal dengan Go-Jek merupakan sebuah perusahaan teknologi asal Indonesia yang melayani angkutan melalui jasa ojek. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 13 Oktober tahun 2010 oleh Nadiem Makarim dengan jumlah pengemudi sebanyak 20 orang. Pada saat itu, Go-Jek masih mengandalkan *call center* untuk menghubungkan penumpang dengan pengemudi Go-Jek dan pada tanggal 7 Januari 2015, Go-Jek akhirnya meluncurkan sebuah aplikasi berbasis android dan IOS untuk menggantikan sistem pemesanan yang menggunakan jaringan terpusat seperti *call center* (<https://id.wikipedia.org/wiki>).

Saat ini Go-Jek telah tersedia di 50 kota di Indonesia dan telah hadir juga di Kota Pematangsiantar pada tahun 2017 bulan Agustus. Selain Go-Ride, aplikasi Go-Jek juga menawarkan beberapa fitur layanan seperti Go-Food untuk pesan dan antar makanan dari restoran favorit, Go-Send untuk mengantar paket dengan cepat, Go-Mart dan Go-Shop untuk belanja tanpa harus ke luar rumah. Selain pembayaran dapat dilakukan secara tunai, aplikasi Go-Jek juga menawarkan metode pembayaran berupa Go-Pay yang menawarkan diskon dan rewards menarik setelah selesai melakukan transaksi (<https://www.go-jek.com>).

Disparitas Kualitas Pelayanan Transportasi Konvensional dan Transportasi Online

Sebagai landasan dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan beberapa teori sebagai indikator keseluruhan mengenai

kualitas pelayanan. Menurut Jasfar (2005:47), bahwa kualitas pelayanan adalah “bagaimana tanggapan konsumen terhadap jasa yang dikonsumsi atau yang dirasakannya”. Pendapat lain mengenai kualitas pelayanan disampaikan oleh Kotler dan Keller (2009:36), kualitas pelayanan (*service*) merupakan semua tindakan atau kinerja yang dapat ditawarkan satu pihak ke pihak lain yang pada intinya berwujud dan tidak menghasilkan kepemilikan apapun.

Untuk mengukur disparitas kualitas pelayanan yang ditawarkan oleh transportasi konvensional yakni Becak Siantar dan transportasi *online* yakni Go-Jek, maka digunakan beberapa dimensi dari kualitas pelayanan sebagai ukuran untuk menilai dan membandingkan pelayanan yang ditawarkan. Menurut Bery dan Parasuraman dalam Priansa (2017:56), menyatakan kualitas layanan jasa terdiri dari sepuluh dimensi, yaitu:

1. *Realibility*, terdiri dari konsistensi kerja dan kemampuan untuk dipercaya.
2. *Responsiveness*, yaitu kemampuan atau kesiapan seorang karyawan untuk memberikan jasa yang dibutuhkan konsumen.
3. *Competence*, kemampuan dan pengetahuan yang dibutuhkan karyawan dalam memberikan jasa.
4. *Access*, meliputi kemudahan untuk dihubungi dan ditemui.
5. *Courtesy*, meliputi sikap sopan santun, respek, perhatian dan keramahan.
6. *Communication*, memberikan informasi kepada konsumen dalam bahasa yang mudah dipahami.
7. *Credibility*, sifat jujur dan dapat dipercaya.
8. *Security*, aman dari bahaya, resiko dan keragu-raguan.
9. *Understanding or Knowing the Customer*, usaha untuk memahami kebutuhan konsumen.
10. *Tangibles*, bukti fisik dari jasa berupa fasilitas fisik, peralatan yang digunakan, representasi fisik.

Berdasarkan gambaran dari kualitas pelayanan di atas, adapun sepuluh dimensi yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini meliputi *reability*, *responsiveness*, *competence*, *access*, *courtesy*, *communication*, *credibility*, *security*, *understanding or knowing the customer*, dan *tangibles*.

Untuk dimensi *reability* yang dimiliki pengemudi Becak Siantar berdasarkan pengalaman dari beberapa masyarakat sebagai

pengguna jasa menilai konsistensi dari pengemudi Becak Siantar terutama dalam segi waktu masih perlu diperbaiki kembali. Rata-rata ketepatan waktu saat menggunakan Becak Siantar masih belum bisa menyaingi ketepatan waktu pada saat menggunakan Go-Jek. Jika pada jarak tempuh yang sama, pada umumnya Go-Jek lebih cepat beberapa menit daripada Becak Siantar. Hal ini tentunya menjadi bahan evaluasi bagi pengemudi Becak Siantar untuk mengatasi kendala tersebut agar dapat mempertahankan kepercayaan dari konsumen.

Selanjutnya pada dimensi *responsiveness* dari pengemudi Becak Siantar cenderung belum serius dalam hal penanganan keluhan dari penumpang. Mayoritas pengguna jasa yang ada di lapangan memberikan penilaian bahwa reaksi pengemudi becak Siantar dalam menanggapi keluhan penumpang masih terlalu lambat. Rata-rata pengemudi Becak Siantar masih belum peka terhadap apa yang menjadi keinginan dan kebutuhan dari penumpang. Kondisi ini justru tidak terjadi pada saat penumpang menggunakan Go-Jek. Para pengemudi Go-Jek mayoritas memberikan sapaan dan memiliki reaksi yang cepat jika ada orderan masuk dari penumpang, baik itu berupa layanan antar jemput orang, makanan, barang maupun layanan lainnya.

Pada dimensi *competence* yang diperlihatkan serta dimiliki oleh masing-masing pengemudi transportasi baik pengemudi Becak Siantar maupun pengemudi Go-Jek memiliki perbedaan yang cukup mencolok dalam keterampilan pencarian lokasi. Rata-rata kemampuan pengemudi Becak Siantar mengandalkan pengalaman selama berkendara untuk mengingat lokasi yang pernah mereka lewati sedangkan pengemudi Go-Jek selain mengandalkan pengalaman, mereka juga mengandalkan teknologi berupa *google maps* sebagai alat untuk pencarian lokasi atau tempat untuk menjemput dan mengantar penumpang.

Selanjutnya pada dimensi *access* yang dimiliki oleh kedua transportasi tersebut memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Hal ini terbukti dari kemampuan penumpang untuk mencari dan memesan Becak Siantar masih mengalami beberapa kendala. Hampir semua Becak Siantar berada di pangkalannya masing-masing sehingga penumpang yang berada jauh dari lokasi tersebut mengalami kesulitan untuk menggunakan Becak Siantar tersebut. Kondisi ini justru tidak dialami penumpang ketika mereka menggunakan Go-Jek untuk berpergian

ke suatu tempat. Aplikasi Go-Jek memiliki sistem navigasi yang baik sehingga mampu menjangkau titik lokasi dari penumpang akan di jemput maupun diantar.

Kemudian jika ditinjau dari dimensi *courtesy* yang diukur dengan indikator sopan santun dan integritas, dapat dijelaskan bahwa untuk sikap sopan santun berdasarkan pengalaman beberapa nara sumber memiliki citra yang positif. Kebanyakan dari pengemudi Becak Siantar telah berumur 40 tahun ke atas sehingga merefleksikan sikap seorang orang tua yang memiliki etika sopan santun dalam berbicara pada saat melayani. Sedangkan untuk pengemudi Go-Jek dalam kesehariannya memberikan pelayanan memiliki sopan santun dan sikap perhatian yang cukup baik. Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa penumpang menjelaskan sikap perhatian yang diperlihatkan oleh pengemudi Go-Jek saat berkendara berorientasi pada kepuasan. Kepuasan penumpang merupakan kunci keberhasilan seorang pengemudi Go-Jek dalam melayani penumpangnya.

Dari dimensi *communication* yang dirasakan beberapa penumpang Becak Siantar menyatakan pengalaman yang bervariasi. Beberapa waktu lalu, ketika penumpang ingin menggunakan Becak Siantar mengalami hal-hal yang kurang menyenangkan. Misalnya ketika penumpang bertanya tentang tarif harga dan melakukan negosiasi harga menuju suatu titik lokasi tertentu, reaksi dari pengemudi Becak Siantar terkadang membalasnya dengan nada bicara yang tinggi jika penumpang menolak harga yang ditawarkan oleh pengemudi Becak Siantar. Keadaan ini justru berbanding terbalik jika penumpang menggunakan Go-Jek, dimana rata-rata dari pengemudi Go-Jek menggunakan kesesuaian nada bicara yang formal dan bahasa yang digunakan juga mudah dimengerti.

Ditinjau dari aspek *credibility* pada pengemudi Becak Siantar masih kurang optimal. Berdasarkan pengalaman dari beberapa penumpang yang telah pernah menggunakan jasa transportasi Becak Siantar menyatakan bahwa, pengemudi Becak Siantar kurang objektif dalam penjelasan harga. Harga yang ditawarkan terkadang terlalu tinggi dan tidak relevan dengan lokasi yang akan ditempuh. Sedangkan Go-Jek berdasarkan pengalaman beberapa penumpang menyatakan bahwa kredibilitas dan objektivitas harga yang dibayarkan kepada pengemudi Go-Jek dapat

dipercaya dan sesuai dengan harga yang ditawarkan oleh sistem aplikasi.

Selanjutnya jika ditinjau dari aspek *security* untuk kedua transportasi tersebut memiliki pendapat yang berbeda-beda berdasarkan pengalaman dari penumpang. Keamanan bertransaksi pada saat menggunakan Becak Siantar sudah cukup baik meskipun ada beberapa hal yang semestinya perlu ditingkatkan lagi sebagai bahan evaluasi bagi pengemudi Becak Siantar dan pemerintah Kota Siantar, yakni perlu adanya mekanisme pembayaran yang aman dan nyaman bagi penumpang saat melakukan transaksi yaitu berupa voucher atau kartu pembayaran yang dapat di isi ulang. Disisi lain mekanisme pembayaran transaksi dari aplikasi Go-Jek sudah menggunakan sistem pembayaran non-tunai berupa dompet digital yang diberi nama Go-Pay sehingga konsumen tidak mesti langsung memberikan uang dalam bentuk tunai guna membayar upah jasa setelah menggunakan Go-Jek.

Untuk dimensi *understanding or knowing the customer* yang diperlihatkan oleh pengemudi Becak Siantar dalam memahami kebutuhan konsumen khususnya kebutuhan mengenai atensi pribadi dari pengemudi kepada penumpang masih belum maksimal. Pada umumnya pengemudi Becak Siantar jarang berkomunikasi dengan penumpang ketika berada di kendaraan. Fenomena ini justru menjadi keunggulan dari pengemudi Go-jek, yaitu kemampuan serta kepekaan mereka dalam memberikan perhatian kepada penumpang dalam bentuk komunikasi yang terjalin dengan baik. Kepekaan dari pengemudi Go-Jek dalam memahami kebutuhan penumpang menjadikan Go-Jek sebagai pilar prioritas penggunaan transportasi umum yang bersifat *online*.

Kemudian pada dimensi *tangibles* yang digunakan oleh masing-masing pengemudi transportasi terlihat bahwa pengemudi Becak Siantar dari segi kebersihan kendaraan dan kelayakan kendaraan masih perlu diperhatikan serta ditingkatkan kembali. Aspek kelayakan kendaraan menjadi bahan evaluasi krusial bagi pengemudi, disebabkan karena rata-rata usia dari kendaraan Becak Siantar sudah di atas 20 tahun pemakaian. Padahal untuk aspek keselamatan dalam berkendara perlu memperhatikan kelayakan usia kendaraan yang ingin digunakan. Kondisi ini justru menjadi perhatian khusus bagi Go-Jek yang akan menjalin mitra dengan pengemudi Go-Jek.

Salah satu syarat untuk menjadi mitra Go-Jek adalah kelayakan kendaraan yang mewajibkan setiap kendaraan yang digunakan harus keluaran terbaru minimal tahun 2011 ke atas.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mencoba mengemukakan evaluasi terkait kualitas pelayanan transportasi konvensional yaitu Becak Siantar dan transportasi *online* yaitu Go-Jek yang ditinjau dari beberapa dimensi. Untuk meningkatkan performa dari pengemudi Becak Siantar mengenai ketepatan waktu dalam pelayanan sebaiknya perlu adanya sistem yang mengatur keberadaan Becak Siantar sebagai salah satu transportasi wisata yang terhubung dengan dinas kepariwisataan dan pemerintah kota agar Becak Siantar yang beroperasi dapat juga melayani wisatawan lokal maupun internasional. Sedangkan pada Go-Jek sebaiknya tetap mempertahankan maupun meningkatkan kecepatan waktu pelayanan kepada konsumen. Kemudian dalam hal penanganan keluhan dari konsumen, sebaiknya pengemudi Becak Siantar sebagai salah satu icon kesayangan Kota Pematangsiantar dapat memperhatikan kembali aspek kesiapan dan respon yang cepat dalam melayani masyarakat maupun wisatawan. Sedangkan pada pengemudi Go-Jek tetap mempertahankan daya tanggap dan reaksi yang cepat pada saat memberikan maupun menjelaskan fitur layanan.

Untuk mengoptimalkan kemampuan dari pengemudi Becak Siantar tentang pencarian lokasi, perlu adanya rancangan suatu sistem yang mengetahui dan mengatur posisi dari masing-masing pengemudi becak. Sistem ini sebaiknya terkoneksi dengan dinas kepariwisataan dan pemerintah kota untuk memantau pergerakan dari Becak Siantar pada saat beroperasi sehingga ketika ada wisatawan yang datang ke Kota Pematangsiantar, maka Becak Siantar dapat digunakan sebagai model transportasi wisata. Sedangkan pada Go-Jek sebaiknya tetap mempertahankan kualitas kemampuan dari mitranya yaitu pengemudi Go-Jek dengan stimulus berupa peningkatan jumlah bonus. Selanjutnya untuk pencarian lokasi dari Becak Siantar masih mengandalkan pengalaman selama menjadi seorang pengemudi becak. Keterbatasan dari lokasi keberadaan Becak Siantar mengakibatkan masyarakat yang ingin menggunakan Becak Siantar mengalami kesulitan untuk menemukannya sehingga perlu adanya dorongan kepada pemerintah kota memfasilitasi ruang untuk berkumpulnya Becak Siantar yang

terintegrasi dengan pemerintah kota sehingga mempermudah dalam mengkoordinasikannya. Sedangkan pada Go-Jek sudah cukup baik dalam pencarian lokasi dikarenakan mengandalkan sistem navigasi yang terdapat pada aplikasi sehingga mampu menjelaskan keberadaan dari pemesan meskipun sering terjadi kegagalan sistem pada saat proses pencarian.

Berdasarkan sikap sopan santun dan sikap perhatian yang ditunjukkan oleh pengemudi Becak Siantar sudah baik. Hal ini sesuai fakta di lapangan yang dinyatakan beberapa nara sumber mengenai keprilakuan yang ditunjukkan oleh pengemudi Becak Siantar memenuhi ekspektasi dari penumpang. Sedangkan pada pengemudi Go-Jek juga sudah baik dalam hal pemberian layanan yang ditunjukkan dengan perilaku sopan santun serta perhatian kepada penumpang. Selanjutnya komunikasi yang tidak sinkron sering terjadi antara pengemudi Becak Siantar dengan masyarakat. Hal ini disebabkan karena tidak adanya kesepakatan mengenai harga sehingga mengakibatkan timbulnya interpolasi yang negatif dari kedua pihak tersebut. Oleh karena itu, sebaiknya perlu adanya dorongan kepada pemerintah untuk merancang aturan mengenai ketentuan tarif harga yang proposional sehingga tidak terjadi interpolasi yang negatif antara pengemudi Becak Siantar dengan masyarakat. Sedangkan komunikasi dari pengemudi Go-Jek kepada masyarakat sebagai penumpang terjalin sudah baik. Fakta di lapangan menjelaskan bahwa, rata-rata pengemudi Go-Jek menggunakan gaya komunikasi yang santun pada saat berbicara.

Disparitas kredibilitas pengemudi Becak Siantar dengan pengemudi Go-Jek berdasarkan keterangan beberapa sumber menjelaskan bahwa mayoritas pengemudi Becak Siantar menjelaskan fitur layanan dalam hal ini adalah harga tidak objektif dengan jarak tempuh lokasi yang akan dikunjungi. Penetapan harga yang sepihak menyebabkan penumpang enggan untuk menggunakan Becak Siantar meskipun merupakan salah satu transportasi yang sudah eksis dari dulu. Perbedaan kualitas pelayanan yang ditunjukkan oleh pengemudi Go-Jek pada dasarnya merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan ketika melayani penumpang. Kredibilitas seorang pengemudi Go-Jek akan dinilai oleh penumpang dan selanjutnya akan diberikan penilaian di dalam aplikasi sesuai yang terjadi di lapangan. Dari segi keamanan

menggunakan Becak Siantar berdasarkan fakta di lapangan sudah cukup baik. Pada umumnya masyarakat yang menggunakan Becak Siantar merasakan keamanan dan kenyamanan ketika berada di atas kendaraan. Namun demikian, tidak bisa disangkal bahwa kemajuan teknologi yang begitu pesat mengharuskan beberapa transportasi umum yang ada di kota-kota besar menggunakan pembayaran dalam bentuk non-tunai. Oleh karena itu, perlu adanya kebijakan dari pemerintah kota merancang suatu konsep pembayaran satu pintu, dimana penumpang dapat melakukan pembayaran non-tunai dalam bentuk karcis atau dompet digital. Disisi lain keamanan pembayaran menggunakan Go-Jek sudah menggunakan pembayaran non-tunai berupa Go-Pay. Setiap konsumen yang akan melakukan pembayaran atas Go-Jek dapat membayar dengan Go-Pay dan kadang-kadang akan memperoleh diskon ketika ada promo dari pihak Go-Jek.

Untuk aspek usaha memahami kebutuhan konsumen yang ditunjukkan oleh kedua transportasi ini sudah cukup baik. Pengemudi Becak Siantar pada umumnya memiliki kemampuan memberikan atensi kepada penumpang saat dikendaraan. Kelebihan dari Becak Siantar untuk aspek ini adalah setiap penumpang memiliki kebebasan untuk memilih pengemudinya. Sedangkan pada pengemudi Go-Jek memiliki ketepatan dalam pertanggungjawaban informasi kepada penumpang, meskipun setiap penumpang tidak memiliki akses untuk memilih pengemudi Go-Jek yang sesuai dengan keinginan dan harapan dari mereka. Kemudian untuk dimensi bukti fisik yang ditampilkan oleh kedua transportasi ini memiliki disparitas yang cukup dominan. Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan menggambarkan kondisi kelengkapan seragam dan kebersihan kendaraan masih belum konsisten. Kondisi ini justru menjadi perhatian khusus bagi pemerintah Kota untuk menangani dan membenahi para pengemudi Becak Siantar agar memperhatikan aspek bukti fisik lebih intensif.



Perbedaan yang ditunjukkan Go-Jek sebagai salah satu transportasi pendatang dengan kelengkapan seragam, kebersihan kendaraan, dan kelayakan kendaraan yang maksimal menjadikan Go-Jek sebagai salah satu primadona transportasi yang paling diminati oleh penumpang.



KESIMPULAN

Gambaran disparitas kualitas pelayanan Becak Siantar dan Go-Jek dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat Kota Pematangsiantar masih belum terlaksana dengan cukup baik. Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa belum optimalnya kualitas pelayanan yang diberikan Becak Siantar dan Go-Jek jika ditinjau dari 10 dimensi kualitas pelayanan. Secara keseluruhan pengemudi Becak Siantar masih belum objektif dalam penjelasan tarif harga dan akses untuk memperoleh atau menemukan Becak Siantar masih sulit ditemukan bagi masyarakat yang tinggal di pinggiran kota. Selanjutnya untuk Go-Jek sendiri masih mengalami beberapa kendala dalam hal pemahaman kebutuhan konsumen yang terbatas pada sistem sehingga masyarakat tidak punya akses untuk memilih pengemudinya, kemudian ditambah lagi sering terjadinya sistem yang *error* di aplikasi pada saat proses pemesanan.

SARAN

Untuk mengatasi disparitas yang berdampak negatif terhadap kepercayaan masyarakat serta untuk mengoptimalkan kualitas pelayanan kedua transportasi tersebut, sebaiknya pemerintah Kota Pematangsiantar perlu mendesain sebuah sistem yang dapat mengkolaborasikan kedua transportasi tersebut dalam melayani masyarakat sehingga perbedaan kualitas pelayanan antara kedua transportasi ini tidak terlalu signifikan. Misalnya aturan pemberlakuan secara umum dan wajib penggunaan transportasi Becak Siantar kepada setiap pegawai Aparatur Sipil Negara yang ada di Kota Pematangsiantar pada

saat berangkat kerja dan pulang kerja di hari-hari tertentu.

DAFTAR PUSTAKA

- Farin, N. J, Rimon, M. N. A. A., Momen, S., Uddin, M. S, & Mansoor, N. 2016. *A framework for dynamic vehicle pooling and ride-sharing system. In Computational Intelligence (IWCI), International Workshop on (pp. 204-208). IEEE.*
- Jasfar, Farida. 2005. *Manajemen Jasa Pendekatan Terpadu*. Bogor : Ghalia Indonesia.
- Kotler, Philip. 2005. *Manajemen Pemasaran*. Edisi Ketiga belas. Jilid 1 Jakarta : PT Indeks.
- Kotler, Philip dan Kevin lane Keller. 2009. *Manajemen Pemasaran*. Jilid 2, Edisi Ketiga belas. Jakarta : Erlangga.
- Lintang, Tessa Viola, Suryadi Suparjo dan Hendriek H. Karongkong. 2016. *Evaluasi Pelayanan Transportasi Bentor Di Kota Kotamobagu Berdasarkan Persepsi Pengguna*. Jurnal Unsrat. Universitas Sam Ratulangi. Manado.
- Nasution, Nur. 2005. *Manajemen Mutu Terpadu (Total Quality Management)*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Priansa, Donni Juni. 2017. *Perilaku Konsumen dalam Persaingan Bisnis Kontemporer*. Bandung: Alfabeta.
- Syafrino, Aprima. 2017. *Efisiensi Dan Dampak Ojek Online Terhadap Kesempatan Kerja dan Kesejahteraan*. Skripsi. Institut Pertanian Bogor. Bandung.
- Tjiptono, Fandy, 2014. *Pemasaran Jasa*. Edisi Pertama. Yogyakarta: Andi.
- Tjiptono, Fandy dan Gregorious Chandra 2016. *Service, Quality, & Satisfication*. Edisi Keempat. Yogyakarta : Andi.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang *Benda Cagar Budaya*.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang *Pelayanan Publik*.
- Wallsten, S. (2015). *The Competitive Effects of the Sharing Economy : how is Uber Changing Taxis*. Technology Policy Institute, 22.
- <https://ezrareihardianzz.blogspot.com/2014/11/s-ejarah-motor-bsa-masuk-kesiantar.html> (Diakses: 2 Oktober 2018)
- <https://id.wikipedia.org/wiki/GO-JEK> (Diakses : 2 Oktober 2018)
- <https://www.go-jek.com/blog/kini-go-jek-telah-hadir-di-25-kota-baru-di-indonesia> (Diakses: 2 Oktober 2018)
- <https://id.wikibooks.org/wiki>. (diakses 2 Oktober 2018)

MODEL PENGEMBANGAN MANAJEMEN PEMBANGUNAN KELURAHAN

(THE MODEL OF VILLAGE MANAGEMENT DEVELOPMENT)

Marto Silalahi

Dosen Kopertis Wilayah Sumatera Utara dpk STIE Sultan Agung Pematangsiantar
Jl. Surabaya No. 19 Pematangsiantar
martolinsondan@yahoo.co.id

Diterima : 23 Oktober 2018; Direvisi 21 November 2018; Disetujui 4 Desember 2018

ABSTRAK

Rencana kerja pemerintahan dan pembangunan adalah dokumen pemerintahan yang mengartikulasikan kebutuhan masyarakat kedalam program dan kegiatan pemerintahan. Kemampuan mengadministrasikan kebutuhan masyarakat menjadi modal besar mempercepat dan mempermudah tercapainya rencana kerja pemerintahan dan pembangunan. Kesesuaian data kebutuhan dan data sumber daya kewilayahan menjadi hasil atau output dari musyawarah pembangunan. Dimensi skala prioritas menjadi saringan penting dalam menentukan program dan kegiatan yang bersesuaian dengan data dan informasi tersebut. Musyawarah pembangunan (musrenbang) menjadi dasar utama menerjemahkan kebutuhan dan harapan masyarakat kedalam program dan kegiatan pemerintahan dan pembangunan Kelurahan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif analitik berdasarkan kepada pendapat para ahli yang berkompeten. Dimana partisipasi masyarakat menjadi energi besar dalam mensukseskan keberhasilan pencapaian target atau tujuan pembangunan itu sendiri. Oleh karena itu penguatan sumber daya kelurahan baik optimalisasi kinerja pemerintahan kelurahan, keberdayaan organisasi kelurahan dan partisipasi pemangku kelurahan lainnya sangatlah penting dalam sinergisasi kinerja organisasi pemerintahan kelurahan dan keberdayaan masyarakat yang sesuai dengan harapan, tuntutan dan kebutuhan masyarakat kelurahan.

Kata kunci : manajemen pembangunan kelurahan dan partisipasi masyarakat

ABSTRACT

Work plan design in governance and development is a formal government document that articulates society's needs into program and measure. The ability to manage the need of society is one of governance instruments to accelerate in achieving development target. Appropriateness between the necessity and regional-based data sources will result in deliberative and social convention. Priority scaling is an important filter to determine program and measure that agree with regional-based data and information. People-centered development consultation becomes an important basic-data sources to evolve social needs and expectancy into village's program and measure. Descriptive-analytic method examines competent experts' ideas and explanations. Social participation is the influential consideration to make development target and goals achievable. As a result, to strengthen village resources; village governance performance, village organization empowerment, other stakeholders important factors is essential to make work plan design in governance and development well-implemented.

Keywords : village development management and social participation

PENDAHULUAN

Pembangunan daerah memiliki paling tidak tiga tahapan yang dilakukan yaitu perencanaan pembangunan daerah, pelaksanaan dan pengawasan program dan kegiatan pembangunan. Skala prioritas pembangunan desa/kelurahan (bagian tidak terpisahkan dari prioritas pembangunan daerah) disusun berdasarkan kepada pembangunan yang belum dilaksanakan pada tahun sebelumnya dan kebutuhan pembangunan yang bersifat mendesak dan segera harus dilaksanakan karena situasi dan kondisi tertentu.

Pada tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan, keberadaan faktor masukan akan menambah kualitas dan daya saing program dan kegiatan pembangunan yang bersesuaian dengan hasil musyawarah pembangunan daerah. Menerjemahkan kebutuhan masyarakat tergambar dari keseluruhan kegiatan musyawarah pembangunan desa/kelurahan baik tingkat rukun tetangga, rukun warga maupun tingkat desa/kelurahan. Lokasi dan fokus analisa dan pembahasan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan menjadi indikator utama dalam menyusun rencana kerja pemerintahan kelurahan.

Kegiatan mengadministrasikan seluruh data dan informasi sumber daya kewilayahan (misalnya pemerintahan kelurahan) akan membangun sistem pemerintahan dan pembangunan yang terpadu dan terintegrasi. Ketersediaan data dan informasi sumber daya kewilayahan akan mempermudah menyusun rencana kerja pemerintahan dan pembangunan baik kelurahan maupun pembangunan daerah.

Perkembangan kebutuhan masyarakat, perkembangan organisasi pemerintahan kelurahan, pertumbuhan penduduk serta dinamika perubahan peraturan adalah faktor penentu keberhasilan penyusunan rencana kerja pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Rencana kerja pemerintahan dan pembangunan adalah dokumen pemerintahan yang mengartikulasikan kebutuhan masyarakat kedalam program dan kegiatan pemerintahan. Kemampuan mengadministrasikan kebutuhan masyarakat menjadi modal besar mempercepat dan mempermudah tercapainya rencana kerja pemerintahan dan pembangunan. Kesesuaian data kebutuhan dan data sumber daya kewilayahan menjadi hasil atau output dari musyawarah pembangunan. Dimensi skala

prioritas menjadi saringan penting dalam menentukan program dan kegiatan yang bersesuaian dengan data dan informasi tersebut. Musyawarah pembangunan (musrenbang) menjadi dasar utama menerjemahkan kebutuhan dan harapan masyarakat kedalam program dan kegiatan pemerintahan dan pembangunan Kelurahan. Sebagai subjek dan objek kegiatan musyawarah pembangunan, maka partisipasi masyarakat menjadi energi besar mensukseskan keberhasilan pencapaian target atau tujuan kehadiran pembangunan itu sendiri.

Berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, Prety (Syahyuti, 2006:30) mengatakan bahwa “Ada tujuh karakteristik tipologi partisipasi, yang berturut-turut semakin dekat kepada bentuk yang ideal, yaitu :

1. Partisipasi pasif atau manipulatif. Ini merupakan bentuk partisipasi yang paling lemah. Karakteristiknya adalah masyarakat menerima pemberitahuan apa yang sedang dan telah terjadi.
2. Partisipasi informatif. Di sini masyarakat hanya menjawab pertanyaan-pertanyaan untuk proyek, namun tidak berkesempatan untuk terlibat dan mempengaruhi proses keputusan.
3. Partisipasi konsultatif. Masyarakat berpartisipasi dengan cara berkonsultasi, sedangkan orang luar mendengarkan, serta menganalisis masalah dan pemecahannya.
4. Partisipasi insentif. Masyarakat memberikan korbanan dan jasa untuk memperoleh imbalan insentif berupa upah, walau tidak dilibatkan dalam proses pembelajaran atau eksperimen-eksperimen yang dilakukan.
5. Partisipasi fungsional. Masyarakat membentuk kelompok sebagai bagian proyek, setelah ada keputusan-keputusan utama yang disepakati.
6. Partisipasi interaktif. Masyarakat berperan dalam proses analisis untuk perencanaan kegiatan dan pembentukan atau penguatan kelembagaan.
7. Mandiri (self mobilization). Masyarakat mengambil inisiatif sendiri secara bebas (tidak dipengaruhi pihak luar) untuk merubah sistem atau nilai-nilai yang mereka junjung.

Musyawarah pembangunan daerah pada hakekatnya adalah sarana komunikasi yang dilakukan pemerintah dengan masyarakat dalam kontekstual perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan berbagai program dan kegiatan daerah. Sinergisasi komunikasi tersebut akan

menghasilkan kualitas pelayanan pemerintahan yang unggul (*The Publik Service Excellence*).

Kegiatan musyawarah pembangunan daerah merupakan tahapan awal dalam mengumpulkan data dan informasi berkaitan dengan kebutuhan pemangku kepentingan daerah. Merencanakan program dan kegiatan merupakan operasionalisasi memenuhi kebutuhan. Berkaitan dengan perencanaan pembangunan, Wrihatnolo dan Riant (2006:121) mengatakan bahwa "Perencanaan pembangunan adalah produk kebijakan publik. Kebijakan publik tidak akan memberikan dampak jika tidak ditindaklanjuti dalam bentuk implementasi. Oleh karena itu, implementasi perencanaan pembangunan adalah penting agar tujuan perencanaan pembangunan dapat tercapai."

Perencanaan pembangunan tingkat kelurahan dikelola organisasi kelurahan yang merupakan perangkat kecamatan dan lembaga kemasyarakatan kelurahan Pasal 25 (1) dan Pasal 27 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan. Optimalisasi kinerja pelayanan kelurahan terprogram dan terdokumentasikan dalam organisasi dan tata kerja organisasi kelurahan, yang dipimpin seorang Lurah Pasal 229 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi "Kelurahan dipimpin oleh seorang kepala kelurahan yang disebut Lurah selaku perangkat kecamatan dan bertanggungjawab kepada Camat". Untuk melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan kelurahan, kerja sama kelurahan dan lembaga menjadi persyaratan utama.

Aspirasi dan masukan masyarakat dalam kegiatan musyawarah pembangunan daerah menjadi data dan informasi kebutuhan masyarakat dan selanjutnya dikomunikasi melalui rencana kerja pembangunan daerah. Berkenaan dengan perencanaan pembangunan, Sjafrizal (2015 : 130) mengatakan bahwa "Untuk dapat lebih terjaminnya pelaksanaan suatu perencanaan pembangunan diperlukan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu : (1) Perencanaan harus berorientasi pada pelaksanaan dan tidak window dressing; (2) Perencanaan tersebut harus dapat selalu disesuaikan dengan perubahan sosial ekonomi; (3) Menjaga keterkaitan antara perencanaan dan penganggaran; (4) Mengembangkan kapasitas dan kualitas tenaga perencana; dan (5)

Melakukan optimalisasi peran serta masyarakat."

Kinerja pelayanan maksimal organisasi kelurahan menjadi motor penggerak dari keberhasilan pembangunan daerah khususnya pembangunan sarana dan prasarana lokal kelurahan dan pemberdayaan masyarakat tingkat kelurahan. Musyawarah pembangunan kelurahan sebagai sarana komunikasi program dan kegiatan kelurahan dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat, sehingga keberdayaan kegiatan musrenbang menjadi daya dorong dan daya penguat kinerja pembangunan kelurahan. Keberadaan sumber pembiayaan kegiatan pembangunan kelurahan mendapatkan dukungan dari APBD sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan Pasal 30 ayat (1).

Kapasitas dan kapabilitas sumber daya aparatur kelurahan menjadi gelanggang pertarungan antara peningkatan kepercayaan masyarakat (*The Public Trust*) dengan Kinerja maksimal program dan kegiatan kelurahan (*The Excellent Services*). Produktivitas kuantitas dan kualitas program dan kegiatan dihasilkan kinerja maksimal kelurahan. Keberadaan faktor kualitas sumber daya manusia, struktur organisasi, teknologi, pimpinan dan masyarakat dan bentuk kepemimpinan Joedono (dalam Tjokroamidjojo, 1996 : 28) merupakan faktor yang mempengaruhi kinerja pelayanan pemerintahan kelurahan.

METODE

Untuk mendapatkan informasi dan bahan berkaitan dengan keberadaan musyawarah pembangunan kelurahan, maka dilakukan penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif analitik berdasarkan kepada pendapat ahli yang berkompeten. Metode teori dasar (*Grounded Theory*) dan konten analisis (*Content Analysis*) serta mengkombinasikan dengan norma perundangan, digunakan untuk menemukan fenomena utama dari keberadaan musyawarah pembangunan kelurahan atau memperkuat teori yang digunakan dalam menganalisa keberadaan musyawarah pembangunan kelurahan itu, kemudian dibuatkan kesimpulan yang menjadi dasar membentuk prinsip dasar dalam suatu teori.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembangunan kelurahan merupakan bagian integral dari pembangunan daerah

karena kegiatan pembangunan kelurahan dilakukan oleh pemerintah Kelurahan. Kehadiran pembangunan kelurahan merupakan gambaran kebutuhan masyarakat pada suatu kurun waktu tertentu. Berkaitan dengan pelayanan yang dilakukan organisasi, Albert dan Zemke (dalam Ratminto dan Winarsih, 2005 : 79) mengatakan bahwa “Organisasi yang bergerak di bidang pelayanan yang sangat berhasil memiliki tiga faktor, yaitu 1) Strategi pelayanan yang baik; 2) Sumber daya manusia yang melayani; dan 3) Sistem pelayanan yang baik.” Pembangunan kelurahan membutuhkan sumbangan dan partisipasi seluruh pemangku keberhasilan pembangunan. Sebagai objek dari produk pembangunan kelurahan, keberdayaan masyarakat dalam memberikan masukan, sarana dan pendapat dalam forum musyawarah pembangunan menjadi elemen penting. Daya kreativitas dan profesionalitas aparatur kelurahan untuk menyusun rencana program dan kegiatan menjadi pendorong keberhasilan pembangunan kelurahan.

Penetapan skala prioritas kegiatan pembangunan kelurahan membutuhkan faktor Capacity, Equity, Empowerment, Sustainability dan Interdependence (Bryant dan White, 1989:94). Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan serta pemberdayaan masyarakat di kelurahan menjadi skala prioritas dalam pembangunan kelurahan sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan Pasal 30.

Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat menjadi objek dari kegiatan pembangunan kelurahan. Pemerintah kelurahan menjalankan kinerja pemerintahannya dengan maksimal sesuai dengan norma perundangan yang berlaku (misalnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018). Mengelola sumber daya kewilayahan menjadi sumber daya pembangunan kelurahan. Membangun kelurahan membutuhkan dukungan dan partisipasi masyarakat. Sebagai organisasi pemerintahan dibawah Pemerintah kecamatan, maka kehadiran profesionalitas dan keberdayaan kelurahan menjadi sarana mendekatkan dan memaksimalkan program dan kegiatan pemerintahan. Manajemen pembangunan kelurahan menjadi sarana mengoptimalisasikan dalam mewujudkan kebutuhan masyarakat dan pemangku kepentingan kelurahan lainnya.

Berkaitan dengan merencanakan pembangunan, Wrihatnolo dan Riant (2006 : 2230) mengatakan bahwa “Lima hal pokok yang dipegang dalam membuat perencanaan pembangunan”, yaitu : (1) Harus ada prioritas. Manajemen adalah masalah prioritas. Kita harus meletakkan waktu sebagai sumber daya paling penting karena tidak dapat ditarik kembali; (2) Memahami proses perencanaan pembangunan itu sendiri. Proses berarti sekuensi yang merupakan isu lanjutan dari manajemen; (3) Memanfaatkan prinsip ekonomi. Prinsip ini merupakan translasi dari konsep *reinventing government*. Birokrasi pembangunan yang baru tidak lagi boleh berpikir dan bertindak ke arah budget maximizer, sebagai ciri khas perilaku birokrasi; (4) Rencana pembangunan harus do able atau dapat dilakukan dalam kurun waktu yang tersedia, dukungan politis, strategis, dan teknis dan rentang kendali yang tersedia; (5) Pembangunan merupakan kebijakan publik yang unggul. Jika perencanaan pembangunan memberikan harapan kepada rakyat untuk membangun hari esok secara mandiri, perencanaan pembangunan itu adalah kebijakan publik yang unggul.

Merencanakan pembangunan kelurahan dengan maksimal didasarkan kebutuhan, aspirasi dan harapan masyarakat sebagaimana hasil dari musyawarah pembangunan kelurahan. Sebagai kuasa pengguna anggaran (Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan), Kepala kelurahan memiliki kewenangan merencanakan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan dengan tetap berkomunikasi dengan pemerintah kecamatan (Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan).

Berkaitan dengan pembangunan, Kuncoro (2004:63) mengatakan bahwa Pembangunan suatu daerah haruslah mencakup tiga inti nilai, yaitu : (1) Ketahanan (*Sustenance*). Kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok (pangan, papan, kesehatan, dan proteksi) untuk mempertahankan hidup; (2) Harga diri (*Self Esteem*). Pembangunan haruslah memanusiakan orang dan (3) *Frerdom from servitude*. Kebebasan bagi setiap individu suatu negara untuk berpikir, berkembang, berperilaku, dan berusaha untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

Manajemen pembangunan kelurahan berhubungan dengan program dan kegiatan

yang berkaitan dengan masalah prioritas. Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018, skala prioritas dalam pembangunan kelurahan adalah pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat. Identifikasi skala prioritas tersebut dibahas dan dimusyawarahkan dalam forum musrenbang kelurahan. Tematik pembahasan sarana dan prasarana kelurahan dalam musrenbang kelurahan dapat berbentuk pembangunan kantor kelurahan dan ruangan rapat/ruangan diskusi masyarakat, pembangunan ruang publik/masyarakat (seperti Lapangan Merdeka), pembangunan TPS (tempat pembuangan sampah sementara), pembangunan jalan setapak dan parit pasangan disetiap rukun tetangga dan rukun warga, dan sebagainya. Tematik pembahasan pemberdayaan masyarakat kelurahan dalam musrenbang kelurahan dapat berbentuk kegiatan gotong-royong, mendorong usaha kecil dan menengah keekonomian, mendorong kerja bakti lingkungan, mendorong kegiatan pendidikan anak usaha dini, dan sebagainya.

Identifikasi skala prioritas sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat kelurahan menjadi bahan diskusi musyawarah pembangunan kelurahan. Membahas pembangunan kelurahan harus memperhatikan manajemen pembangunan kelurahan sehingga efektifitas dan efisiensi kegiatan pembangunan tercapai dengan maksimal. Keberadaan sumber dana yang dibutuhkan menjadi motor penting dalam menyusun rencana anggaran biaya kegiatan pembangunan, seperti pembangunan gedung pertemuan misalnya.

Manajemen pembangunan berhubungan dengan pembangunan kebijakan publik yang unggul. Untuk mengoperasionalkan program dan kegiatan pembangunan, maka keberadaan kinerja maksimal pemerintahan kelurahan menjadi kebutuhan dan keharusan. Untuk mengoperasikan Pasal 30 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018, maka keberadaan organisasi pemerintah kelurahan membutuhkan penguatan struktural organisasi sehingga penyusunan rencana kerja pembangunan kelurahan dapat memenuhi harapan dan kebutuhan rakyat.

Berkaitan dengan manajemen pembangunan, Lopulisa dan Alam (dalam Safi'i, 2009 : 54) mengatakan bahwa "Pembangunan daerah akan terpusat kepada usaha-usaha pembangunan berbasis masyarakat

(*community base development*), masyarakat dipandang sebagai *economic entry*." Kemampuan menerjemahkan kebutuhan dan harapan masyarakat kedalam program dan kegiatan pembangunan kelurahan membutuhkan keberdayaan organisasi kelurahan dalam menjalankan tugas dan kewenangan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Fokus dan lokus pembangunan kelurahan dimaksudkan dan ditujukan kepada penguatan pembangunan berbasis masyarakat khususnya kegiatan ekonomi usaha kecil dan menengah. Mensejahterakan masyarakat melalui maksimal rencana program dan kegiatan pembangunan, merupakan tugas dan fungsi serta kewenangan pemerintahan. Untuk tingkatan kelurahan kegiatan pembangunan membutuhkan partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan kelurahan.

KESIMPULAN

Mendekatkan dan memaksimalkan kebutuhan dan harapan masyarakat adalah tugas dan kewenangan organisasi pemerintahan sebagaimana amanat norma perundangan yang berlaku. Kehadiran pembangunan kelurahan menjadi jawaban tuntutan, aspirasi dan harapan masyarakat dan pemangku kepentingan kelurahan lainnya. Bagaimana mengaktualisasikan program dan kegiatan pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat kelurahan merupakan tema pembahasan dalam kegiatan musyawarah pembangunan kelurahan.

Sinergisasi kinerja organisasi pemerintahan kelurahan dan keberdayaan masyarakat akan membuahkan program dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan harapan, tuntutan dan kebutuhan masyarakat kelurahan. Membangun sarana dan prasarana kelurahan dan memberdayakan menjadi fokus dan lokus rencana pembangunan kelurahan. Penentuan skala prioritas pembangunan kelurahan harus mempertimbangkan sinergisasi semua pemangku kepentingan kelurahan.

SARAN

1. Dalam rangka penguatan kinerja pembangunan, maka diperlukan adanya penguatan sumber daya kelurahan baik optimalisasi kinerja pemerintahan kelurahan, keberdayaan organisasi kelurahan dan partisipasi pemangku kelurahan lainnya.

2. Penguatan Pemerintahan Kelurahan merupakan grand strategi kebijakan program dan kegiatan pembangunan sarana-prasarana dan pemberdayaan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Bryant, Coralie dan Louise G.White. 1989. *Manajemen Pembangunan Untuk Negara Berkembang*. Jakarta : LP3ES.

Dwiyanto, Agus (editor), 2006. *Mewujudkan Good Governance melalui Pelayanan Publik*. Jogjakarta : UGM Pres.

Gibson, James L, John F. Ivanceich and James H. Donnelly, JR. 1996. *Organisasi, Perilaku, Struktur dan Proses*. Terjemahan Nunuk Adriani. Jakarta : Bina Aksara.

Istianto HP, Bambang. 2011. *Manajemen Pemerintahan dalam Perspektif Pelayanan Publik*. Jakarta : Mitra Wacana Media.

Mahmudi. 2005. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Jogjakarta : UPP AMP YKPN.

Ratminto dan Winarsih.2005. *Manajemen Pelayanan*. Jogjakarta : PT. Pustaka Pelajar

Safi'i. H.M. 2009. *Perencanaan Pembangunan Daerah*. Averroes Press.

Sadyohutomo, Mulyono. 2008. *Manajemen Kota dan Wilayah. Realita dan Tantangan*. Jakarta : Bumi Aksara.

Sjafrizal. 201. *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi Daerah* : Jakarta : Rajawali Press.

Soekanto, Soerjono. 2005. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : PT Radjagrafindo Persada.

Sumodiningrat, Gunawan. 2000. *Strategi Pembangunan dan Kemiskinan*. Jakarta : Penerbit Rineka Cipta.

Supriatna, Tjahja. 1997. *Birokrasi, Pemberdayaan dan Pengentasan kemiskinan*. Bandung : Humaniora Press.

Syahyuti, 2006. *Konsep Penting dalam Pembangunan Pedesaan dan Pertanian*. Jakarta : Bina Rena Pariwisata.

Tjokroamidjojo, Bintoro. 1996. *Perencanaan Pembangunan*. Jakarta : Toko Gunung Agung.

Wrihatnolo, Randi R dan Riant Nugroho Dwidjowijoto. 2007. *Manajemen Pemberdayaan. Sebuah Pengantar dan Panduan Untuk Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta : PT. Elex Media Komputindo.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan

PENGARUH DAN MANFAAT PENGGUNAAN KARTU BPJS KESEHATAN DI KALANGAN MASYARAKAT KHUSUSNYA DI KOTA PEMATANGSIANTAR

(INFLUENCE AND BENEFIT OF UTILIZING BPJS HEALTH INSURANCE CARD IN PEMATANGSIANTAR)

Arolina Sidauruk

Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pematangsiantar
Jalan Merdeka No. 4 Pematangsiantar
arolina.sidauruk@gmail.com

Diterima : 29 Oktober 2018; Direvisi 27 November 2018; Disetujui 4 Desember 2018

ABSTRAK

Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) merupakan badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. Sehingga dengan adanya jaminan sosial ini resiko keuangan yang dihadapi oleh seseorang diambil alih oleh lembaga yang menyelenggarakan jaminan sosial. Untuk itu diadakan suatu penelitian sederhana yang menyangkut kesehatan masyarakat. Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dan manfaat penggunaan kartu BPJS Kesehatan di kalangan masyarakat khususnya masyarakat Kota Pematangsiantar. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian ilmiah, yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti Meleong (1993). Instrumen penelitian menggunakan kuesioner dan melakukan wawancara. Jumlah sampel 80 orang responden. Hasil penelitian menunjukkan mayoritas menerima BPJS dengan minat baik sebanyak 35 responden (43,75%), yang berpendidikan SMA dan S1 sebanyak 22 responden (27,5%), yang bekerja sebagai PNS/Non PNS sebanyak 23 responden (28,75%), sumber informasi yang diperoleh dari petugas kesehatan 80 responden (100%). Berdasarkan hasil penelitian tersebut disarankan hendaknya masyarakat dapat meningkatkan kesehatan dengan ikut serta memanfaatkan program dan keberadaan BPJS yang mampu mempengaruhi dan membawa manfaat bagi masyarakat Kota Pematangsiantar.

Kata kunci : jaminan sosial, meningkatkan kesehatan dan minat baik

ABSTRACT

Health Social Insurance Company is a legal body that has responsible to carry out social security program. The social security program will bear the social risk and consequently will take over financial risk from society. The purpose of this study is to see how large the influence and what benefits of BPJS Health insurance could offer to the society in Pematangsiantar. Qualitative research is applied at this study. Qualitative research is scientific research that has intention to understand a phenomenon in a nature of social context by focusing on intensive interaction process between researcher and the researched phenomenon (Meleong 1993). Research instrument are questionnaire and interviewing. There are 80 people as respondents. The research shows that the majority of BPJS recipients that are satisfied (having good intentions) are 35 respondents (43,75%), Senior High and Bachelor degree are 22 respondents (27,5%), working as public officials and non-public officials 23 respondents (28,75%). Information source that are health officers are 80 respondents (100%). Based on the results, it suggests that society may be able to intensify healthy living standard by participating

in the social security program. Furthermore, BPJS may influence and create benefits to the people of Pematangsiantar.

Keywords : *social security, health acceleration and good purpose*

PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, BPJS merupakan lembaga hukum nirlaba untuk perlindungan sosial dalam menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup layak dan sekaligus dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial di Indonesia. BPJS sendiri yang terdiri dari dua bentuk yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, BPJS akan menggantikan sejumlah lembaga jaminan sosial yang ada di Indonesia yaitu lembaga asuransi jaminan kesehatan (PT. Askes), dan Tabungan Dana Asuransi Pegawai Negeri (PT. Taspen), asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (PT. Asabri) dan lembaga jaminan sosial ketenagakerjaan (PT. Jamsostek).

Transformasi PT. Askes serta PT. Jamsostek menjadi BPJS yang telah dilakukan secara bertahap pada tanggal 1 Januari 2014, PT. Askes menjadi BPJS, untuk selanjutnya pada tahun 2015 giliran PT. Jamsostek menjadi BPJS Ketenagakerjaan. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan yang dahulu bernama Jamsostek merupakan program pemerintah dalam kesatuan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diresmikan pada tanggal 31 Desember 2013. Untuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mulai beroperasi sejak tanggal 1 Januari 2014, sedangkan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan mulai beroperasi sejak 1 Juli 2015. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) merupakan Badan Usaha Milik Negara yang ditugaskan khusus oleh pemerintah untuk menyelenggarakan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama untuk Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun PNS dan TNI/POLRI, Veteran, perintis kemerdekaan beserta keluarganya dan Badan Usaha lainnya ataupun rakyat biasa.

Kesehatan adalah suatu keadaan fisik, mental, dan sosial kesejahteraan dalam kondisi

baik, bukan hanya ketiadaan penyakit atau kelemahan. Pembangunan kesehatan pada saat ini masih dihadapkan pada permasalahan belum optimalnya akses, keterjangkauan, dan mutu pelayanan kesehatan antara lain disebabkan oleh sarana pelayanan kesehatan Rumah Sakit, Puskesmas, dan jaringannya yang belum sepenuhnya dijangkau oleh masyarakat, terutama bagi penduduk miskin, terkait dengan adanya permasalahan dalam hal biaya dan juga jarak pelayanan kesehatan yang belum bisa dijangkau. Untuk saat ini, Pemerintah menghimbau seluruh penduduk Indonesia wajib menjadi peserta jaminan kesehatan yang dikelola oleh BPJS, Program ini diharapkan dapat menaungi seluruh masyarakat, yang mana masyarakat dapat dilindungi dengan asuransi kesehatan.

METODE

Metode penelitian yang dilakukan adalah metode penelitian kualitatif yang mempunyai arti suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktifitas, sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Beberapa deskripsi digunakan untuk menemukan prinsip-prinsip dan menjelaskan yang mengarah pada penyimpulan. Sedangkan data yang digunakan adalah data primer dari hasil wawancara dengan pengguna kartu BPJS disepertaran Kota Pematangsiantar. Objek penelitian adalah beberapa orang pasien yang berobat dan menggunakan kartu BPJS di Puskemas Kartini, Rumah Sakit Tentara dan Vita Insani yang bertujuan untuk mengetahui “Pengaruh dan Manfaat Penggunaan Kartu BPJS Kesehatan di Kalangan Masyarakat Khususnya Masyarakat di Kota Pematangsiantar.”

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan dengan wawancara dari beberapa orang pasien yang berobat dan menggunakan kartu BPJS di Puskemas Kartini, Rumah Sakit Tentara dan Vita Insani. Adapun hasil penelitian yang dilakukan berjudul “Pengaruh dan Manfaat Penggunaan Kartu BPJS Kesehatan di Kalangan Masyarakat Khususnya di Kota

Pematangsiantar” yang dituangkan secara sederhana ke dalam tabel 1. berikut :

Tabel 1. Komposisi Jumlah Kepesertaan BPJS Kesehatan di Kantor BPJS Cabang Pematangsiantar

| No | Kabupaten/Kota | Jiwa | % |
|----|----------------------|---------|-------|
| 1 | Kabupaten Simalungun | 477.933 | 54,70 |
| 2 | Kabupaten Tobasa | 116,214 | 13,30 |
| 3 | Kabupaten Samosir | 86.595 | 9,91 |
| 4 | Kota Pematangsiantar | 193.056 | 22,09 |
| | Jumlah | 873.798 | 100 |

Sesuai dengan data yang diperoleh dari kantor BPJS Cabang Pematangsiantar bahwa pengguna kartu JKN-BPJS di Pematangsiantar sebesar 873.798 jiwa, dari total Wilayah kerja BPJS Cabang Pematangsiantar yaitu Kabupaten Simalungun, Kabupaten Toba Samosir, Kabupaten Samosir dan Kota Pematangsiantar.

Komposisi jumlah kepesertaan BPJS Kesehatan di Kota Pematangsiantar mencapai 193.056 jiwa dari atau 22,09%. Untuk Kabupaten Simalungun jumlah peserta BPJS Kesehatan mencapai 477.933 jiwa atau 54,70%. Di Kabupaten Toba Samosir, jumlah kepesertaan BPJS Kesehatan mencapai 116,214 jiwa atau 13,30 %, sedangkan di Kabupaten Samosir jumlah peserta mencapai 86.595 jiwa atau 9,91%. BPJS Kesehatan senantiasa berkomitmen tinggi untuk selalu mengoptimalkan potensi yang ada dalam menghasilkan kualitas pelayanan yang bukan hanya sesuai dengan standar tetapi juga dapat memenuhi tuntutan dan harapan peserta bekerjasama dengan provider. Terhitung hingga Juli 2017, Kantor BPJS Cabang Pematangsiantar telah bermitra dengan 144 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang terdiri atas 84 Puskesmas, 11 dokter praktik perorangan dan 49 Klinik Pratama. Selain itu, BPJS Kesehatan Cabang Pematangsiantar juga telah bekerjasama dengan 25 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) yang terdiri atas 14 rumah

sakit, 4 apotek dan satu instalasi farmasi serta 6 optik. Selain komitmen dalam bentuk pembiayaan serta perluasan akses pelayanan melalui penyediaan fasilitas kesehatan, ke depan diharapkan peran pemerintah daerah juga makin dioptimalkan, baik dari sisi kualitas dan mutu pelayanannya, sehingga derajat kesehatan masyarakat semakin meningkat, bersama-sama memperkuat regulasi terkait kepatuhan pengusaha dan masyarakat dalam kepesertaan JKN-KIS.

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, penulis mempersempit objek penelitian dengan memberikan kuesioner dan wawancara dari sudut pandang yang sederhana, seperti berapa jumlah pengguna kartu BPJS yang berpendidikan SLTA dan Sarjana (S1), berapa banyak jumlah PNS dan Non PNS yang setia memakai BPJS, kemudian berapa banyak yang menerima/menolak keberadaan kartu BPJS sebagai alat pembayar untuk menanggung biaya pengobatan pasien. Hal ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dan manfaat penggunaan kartu BPJS di masyarakat Kota Pematangsiantar, khususnya yang berobat di Puskesmas Kartini, Rumah Sakit Vita Insani dan Rumah Sakit Tentara.

Adapun penerima BPJS dengan minat baik dalam usaha meningkatkan kesehatan masyarakat di Puskesmas Kartini, Rumah Sakit Vita Insani dan Rumah Sakit Tentara di Kota Pematangsiantar adalah sebagai berikut :

Tabel 2. Karakteristik Responden Pengguna BPJS Kota Pematangsiantar (Puskesmas Kartini, Rumah Sakit Vita Insani dan Rumah Sakit Tentara)

| No. | Karakteristik Responden | Jumlah Responden | % |
|-----|------------------------------|------------------|-------|
| 1 | Pendidikan SMA, S1 (sarjana) | 22 | 27,5 |
| 2 | Pekerjaan PNS/Non PNS | 23 | 28,75 |
| 3 | Berminat menerima/menolak | 35 | 43,75 |
| | Jumlah | 80 | 100 |

Berdasarkan tabel 2. di atas dapat dilihat bahwa dari 80 orang responden mayoritas

responden memiliki minat yang baik terhadap program BPJS sebanyak 35 responden atau

43,75 % dan jumlah responden dengan pekerjaan PNS/Non PNS sebanyak 23 responden atau 28,75% dengan tingkat pendidikan SMA dan S1 sebanyak 22 responden atau 27,5 % dari jumlah yang bersumber dari informasi yang didapat. Hal ini dapat dikatakan sangat mempengaruhi dan mempunyai manfaat bagi pengguna kartu BPJS Kesehatan di kalangan masyarakat khususnya di Kota Pematangsiantar. Menurut asumsi peneliti, pekerjaan tidak terlalu berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat, ini mungkin disebabkan oleh variabel lain dalam penelitian seperti yang menyangkut pendidikan.

Selain hasil wawancara dan penelitian dilapangan, sering timbul beberapa permasalahan antara lain :

- a. Bagaimana sistem rujukan diberlakukan?
- b. Bisakah berobat di luar kota memakai BPJS?
- c. Apakah bisa tanpa rujukan?
- d. Apakah bisa klaim ke BPJS ?
- e. Apakah bisa mengganti Faskes I?

- Bagaimana sistem rujukan diberlakukan?

Satu hal yang paling sering dikeluhkan peserta BPJS Kesehatan adalah sistem rujukan berjenjang yang diterapkan di dalamnya. Hal ini terkesan sangat rumit dan sedikit menyulitkan bagi peserta, terutama bagi yang telah terbiasa dengan layanan asuransi kesehatan dari perusahaan asuransi swasta. Jika dalam penggunaan asuransi kesehatan swasta (mandiri) bisa berobat sesuka hati di klinik atau rumah sakit pilihan kita, hal tersebut tidak berlaku bagi pengguna BPJS Kesehatan. BPJS menerapkan sistem rujukan bagi peserta yang ingin mendapatkan layanan kesehatan. Dimulai dari Fasilitas Kesehatan I (Faskes I), seperti puskesmas, klinik, dan dokter keluarga. Pada dasarnya, hampir semua peserta akan menggunakan Puskesmas sebagai Faskes I mereka. Sebab layanan ini yang cukup mudah ditemukan. Pemilihan Faskes I juga cukup terbatas dan sering kali menyulitkan. Peserta hanya boleh memilih satu Faskes I saja meskipun BPJS telah memiliki kerja sama dengan banyak Faskes I. Lokasi Faskes I juga kerap menjadi masalah. Sebab bisa saja peserta berada/tinggal di lokasi yang berjarak sangat jauh dari lokasi Faskes I terdekat.

- Bisakah berobat diluar kota memakai BPJS?

Bagi kita yang sedang berada di luar kota, entah itu sedang liburan atau sedang ada

kegiatan lain ternyata ada anggota keluarga yang tiba-tiba sakit. Apakah bisa menggunakan layanan BPJS Kesehatan, sedangkan pengobatan dilakukan di luar kota? Jawabannya : Bisa. BPJS Kesehatan merupakan jaminan kesehatan milik Pemerintah yang memiliki segudang manfaat bagi pesertanya. Seluruh keperluan biaya kesehatan masyarakat Indonesia yang menjadi peserta BPJS Kesehatan akan ditanggung oleh pihak BPJS Kesehatan jika melalui prosedur yang benar. Bagaimana jika menggunakan BPJS kesehatan di luar kota? serta Persyaratan menggunakan BPJS Kesehatan di luar kota.

Pertama-tama kita akan ditanyakan nomor BPJS Kesehatan kita (baik anak atau keluarga lain) serta menunjukkan Kartu identitas (KTP). Selanjutnya kita diberikan waktu maksimal 3×24 jam untuk melengkapi persyaratan lainnya seperti :

- a) Fotocopy kartu BPJS kesehatan yang sedang sakit
- b) Fotocopy Kartu Keluarga (KK)

Sebagai catatan, sebaiknya ketika kita akan bepergian, selalu lah bawa kartu BPJS Kesehatan dan fotocopy Kartu Keluarga (KK). Hal ini untuk mempermudah kita ketika ada anggota keluarga yang sakit. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan mewajibkan seluruh peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) untuk menggunakan sistem rujukan online mulai 1 September 2018. Penggunaan sistem ini dilakukan demi membuat proses rujukan oleh peserta lebih cepat dan bisa didata dengan tepat waktu, sehingga kalau didata secara keseluruhan akan banyak pasien yang berobat di Rumah Sakit Vita Insani atau Rumah Sakit dari luar daerah yang memang kedua Rumah Sakit tersebut telah mempunyai kesepakatan dalam hal penanganan pasien pengguna kartu BPJS Kesehatan.

- Apakah Bisa tanpa Rujukan?

BPJS Kesehatan kini tengah berupaya agar sistem rujukan online sudah bisa digunakan di seluruh fasilitas kesehatan mitra badan ini. Jadi, tak perlu khawatir jika masih ditemukan sistem rujukan manual, karena ini masih berlaku. Saat ini sistem masih dalam masa transisi. Rujukan manual dalam bentuk kertas (*hardcopy*) masih berlaku, namun rujukan online juga sudah berjalan secara bertahap di sebagian fasilitas kesehatan. Sistem

rujukan online program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang diselenggarakan BPJS Kesehatan ini sudah berjalan. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang sudah terhubung jaringan internet bisa menerapkan sistem rujukan online per 21 Juni 2018. Sistem rujukan online sesungguhnya sudah disiapkan sejak lama oleh BPJS Kesehatan. Namun implementasi sistem tersebut bergantung pada kesiapan infrastruktur masing-masing fasilitas kesehatan.

- Apakah Bisa Klaim ke BPJS ?

Jawabannya bisa. Ada beberapa hal yang harus kita lakukan untuk memperoleh Klaim BPJS yang sudah kita gunakan antara lain :

a) Mengunjungi faskes terdekat.

Perlu diketahui, untuk menggunakan BPJS kesehatan kita tidak bisa langsung pergi ke rumah sakit melainkan harus mendatangi dahulu faskes 1 untuk berobat. Faskes atau klinik, puskesmas atau dokter keluarga yang bekerja sama dengan BPJS, faskes akan memutuskan apakah kita hanya perlu dirawat di sana atau perlu dirujuk ke rumah sakit, alasannya adalah fasilitas yang dimiliki puskesmas atau klinik tersebut tidak memadai untuk melakukan perobatan dari penyakit yang di derita orang tersebut. Hal ini dapat berubah ketika pasien berada dalam keadaan darurat sehingga kita memerlukan penanganan cepat dari dokter ahli yang memiliki fasilitas lengkap, pada kasus demikian kita dapat langsung pergi ke rumah sakit yang bekerjasama dengan BPJS kesehatan.

b) Meminta surat rujukan.

Jika kondisi kita tidak memungkinkan untuk melakukan perobatan di faskes tersebut, maka kita akan dirujuk ke rumah sakit dengan fasilitas yang lebih lengkap, hal ini penting untuk kita ketahui, minta surat rujukan dan simpan karena surat itu penting saat kita pindah ke rumah sakit, pengajuan rujukan akan ditolak oleh pihak rumah sakit ketika kita tidak membawa surat tersebut.

c) Persyaratan lain.

Selain surat rujukan, ada persyaratan lain yang wajib dibawa saat ke rumah sakit. yaitu: Kartu BPJS Asli beserta fotocopy, fotocopy KTP, fotocopy kartu keluarga, fotocopy surat rujukan dari klinik atau puskesmas tempat kita pertama berobat.

d) Datang lebih awal.

Setiap rumah sakit yang bekerjasama dengan BPJS kesehatan akan mengalami penumpukan pasien setiap harinya. Jadi kedatangan kita diusahakan pagi hari, jangan siang apalagi sore hari, karena antrian akan sangat panjang sehingga kita tidak dapat dirawat pada hari tersebut karena pendaftaran sudah ditutup

- Apakah Bisa Mengganti Faskes I ?

BPJS Kesehatan memberlakukan sistem berobat berjenjang, dimana peserta BPJS yang mengalami gangguan kesehatan dapat berobat secara gratis jika mengikuti prosedur yang berlaku yaitu peserta diharuskan berobat ke fasilitas kesehatan (faskes) tingkat pertama untuk mendapatkan penanganan medis. Jika faskes 1 tidak dapat menangani masalah kesehatan kita, maka kita berhak mendapatkan rujukan ke faskes lanjutan. Faskes 1 merupakan fasilitas kesehatan pertama yang dapat digunakan peserta untuk berobat, biasanya faskes yang telah bekerjasama dengan BPJS adalah Klinik, Puskesmas. Faskes 1 tertulis pada kartu peserta BPJS, pemilihan faskes ditentukan oleh peserta pada saat pertama kali melakukan pendaftaran.

Apabila faskes tingkat 1 yang dipilih peserta tidak sesuai dengan keinginan dan berencana untuk menggantinya. Peserta BPJS diperbolehkan mengganti faskes yang telah dipilih sebelumnya dengan faskes yang baru, faskes yang dapat dipilih merupakan faskes terdekat dengan alamat domisili kita. Disisi lain, ada juga permasalahan yang sering kita hadapi ketika menggunakan kartu BPJS, contohnya dalam hal ini pembelian kacamata. Untuk pengurusan klaim kacamata sangat rumit menurut pasien pengguna kartu BPJS. Ada kesan pemeriksaan dokter ahli mata dirumah sakit yang dihunjak asal jadi sebab menurut pandangan mereka, bahwa seluruh pasien sudah terlebih dahulu memeriksakan mata ke optic yang memang sudah mempunyai fasilitas komputer, sehingga pemeriksaan mata hanya sebagai syarat dan ceremonial saja.

Sebagai tambahan informasi bahwa BPJS Kesehatan menargetkan pada tahun 2019 seluruh penduduk Indonesia sudah dilindungi dengan Jaminan Kesehatan Nasional, dengan perkiraan populasi penduduk pada waktu itu telah mencapai 257 juta jiwa. BPJS Kesehatan secara kontinuitas melakukan sosialisasi program, sehingga jaminan kesehatan bisa menjangkau warga yang tinggal di daerah

kepulauan. Diharapkan seluruh perusahaan dapat mendaftarkan kepesertaan Jaminan Kesehatan karyawannya kepada BPJS Kesehatan. Sebab program ini wajib sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013, tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan.

KESIMPULAN

Setelah dilakukan penelitian dan pembahasan tentang “Pengaruh dan manfaat penggunaan kartu BPJS Kesehatan di kalangan masyarakat khususnya di Kota Pematangsiantar” dapat disimpulkan sebagai berikut :

Bahwa BPJS Kesehatan memberikan jaminan kepada pesertanya dalam bentuk pelayanan kesehatan yang bersifat menyeluruh (komprehensif) berdasarkan kebutuhan medik sesuai dengan standar pelayanan medik. Fasilitas kesehatan BPJS Kesehatan ini terdiri dari fasilitas kesehatan tingkat pertama dan fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan. Dimana pada fasilitas kesehatan tingkat pertama adalah tempat pertama yang harus didatangi oleh peserta BPJS Kesehatan jika ingin berobat, diantaranya yaitu klinik, puskesmas, praktik dokter, praktik dokter gigi dan rumah sakit kelas D yang setara.

Jika kondisi peserta yang berobat masih berlanjut dan butuh penanganan lebih lanjut, maka peserta akan dirujuk ke fasilitas kesehatan tingkat lanjutan yaitu rumah sakit umum, rumah sakit khusus maupun klinik spesialis. Dimana dari hasil pengukuran kualitas jasa pada pelayanan BPJS Kesehatan dapat disimpulkan bahwa pelayanan BPJS Kesehatan sudah cukup memuaskan pesertanya dengan bentuk-bentuk pelayanan yang diberikan oleh petugas BPJS Kesehatan baik perawat maupun dokter yang bertugas.

Hal-hal yang membuat peserta puas akan pelayanan BPJS Kesehatan diantaranya adalah dengan disediakannya fasilitas-fasilitas yang baik serta kelengkapan sarana dan prasarana, menanamkan kepedulian, ketegasan dalam menangani keluhan peserta, memberikan pelayanan kesehatan dengan cepat tanggap dengan menumbuhkan rasa percaya peserta terhadap kehandalan petugas serta memberikan jaminan pelayanan kepada peserta terhadap pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh petugas. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang disingkat BPJS merupakan badan

hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. BPJS yang terdiri dari BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan.

Dari 80 responden menjawab bahwa Ada pengaruh dan manfaat BPJS terhadap minat masyarakat Kota Pematangsiantar dalam upaya peningkatan kesehatan khususnya di Puskesmas Kartini, Rumah Sakit Tentara dan Vita Insani Kota Pematangsiantar.

Pekerjaan sebagai PNS dan non PNS belum begitu mempengaruhi keberadaan BPJS apalagi ditinjau dari segi penghasilannya.

Ada pengaruh terhadap minat masyarakat dalam upaya peningkatan kesehatan dengan menerima/menolak penggunaan kartu BPJS.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut :

Kepada petugas kesehatan yang bekerja di beberapa Puskesmas, Rumah sakit khususnya Puskesmas Kartini, Rumah Sakit Vita Insani dan Rumah Sakit Tentara Kota Pematangsiantar agar dapat mensosialisasikan Program BPJS dan meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menggunakan fasilitas BPJS.

Kepada responden agar mampu mempersiapkan diri dalam menanggulangi berbagai kekurangan baik masalah administrasi maupun mengatasi kendala-kendala yang mungkin saja bisa terjadi dalam pelaksanaannya di lapangan.

Kepada penulis selanjutnya agar dapat lebih menggali masalah-masalah yang terjadi dimasyarakat pada umumnya, pelayanan kesehatan di Puskesmas Kartini, Rumah Sakit Vita Insani dan Rumah Sakit Tentara pada khususnya. Penulis harus mampu meneliti dan mempertimbangkan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi dan apakah manfaat BPJS dalam upaya peningkatan kesehatan masyarakat dapat dinikmati secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

BPJS Kesehatan, 2014.”Panduan praktis Gate Keeper concept Faskes BPJS Kesehatan” 2014. “Panduan Praktis Pelayanan Kesehatan”

2014. “Panduan Layanan Bagi Peserta BPJS Kesehatan”

Bungin, M Burhan. 2007. Penelitian Kualitatif.

Jakarta : Kencana Prenada Media Group

Dwidjowojoto, R.N. 2006. Kebijakan Publik Untuk Negara Berkembang. Jakarta : Elek Media Komputindo

<http://www.fileskripsi.com/2012/11/apakah-definisi-pelayanan-kesehatan.html> pada tanggal 11 Desember 2013 pukul 20:45

<http://www.depkesri.com/2012/12> pada tanggal 12 Desember 2013 pukul 21:05

[http://fk.uns.ac.id/static/materi/Ekonomi Kesehatan.](http://fk.uns.ac.id/static/materi/EkonomiKesehatan)

Prof Bhisma Murti. pdf pada tanggal 6 Oktober 2014 pukul 21:00

Idrus, Muhammad. 2009. Metode Penelitian Ilmu Sosial (Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif). Jakarta : Erlangga

Indiahono, Dwiyanto.2009. Perbandingan Administrasi Publik. Yogyakarta : Gava Media

Kapusrengun BPPSDM Kesehatan Kementerian Kesehatan RI. 2014. "Pemenuhan Tenaga Kesehatan Dalam Jaminan Kesehatan SJSN"

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia "Buku Pegangan Sosialisasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional"

Moleong, Lexy. 2006. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya

Nawawi, Hadari. 1992. Manajemen Sumber Daya Manusia. Yogyakarta : Gajah Mada University Press.

Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional.

Putra, Fadillah. 2003. Paradigma Kritis dalam Studi Kebijakan Publik : Perubahan dan inovasi kebijakan Publik dan Ruang Partisipasi

Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta : Pustaka Pelajar dan Universitas Sunan Giri Surabaya

Singarimbun, Masri. 2012. Metode Penelitian Survy. Jakarta : PT. Pustaka LP3NS Lukman Offset

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

This page is intentionally left blank

Pedoman Penulisan Naskah Ilmiah Kebijakan

Kebijakan adalah jurnal yang diterbitkan oleh Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pematangsiantar yang berisikan karya tulis ilmiah dalam berbagai bidang untuk memberikan referensi/input dalam pengambilan kebijakan di Kota Pematangsiantar. Kebijakan terbit enam bulan sekali dalam satu tahun yakni bulan Juni dan Desember. Kebijakan pertama kali terbit Desember 2017 dengan Nomor ISSN 2599-1744 Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Pusat Nasional ISSN No. : 0005.25991744/JI.3.1/SK.ISSN/2017.12 tanggal 7 Desember 2017.

Naskah yang akan diterbitkan dalam jurnal Kebijakan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pematangsiantar harus memenuhi ketentuan berikut :

1. naskah berupa karya asli yang belum pernah dipublikasikan di tempat lain dan tidak sedang diajukan ketempat lain.
2. naskah ditulis dalam bahasa Indonesia sesuai kaidah-kaidah bahasa Indonesia yang disempurnakan.
3. komponen utama naskah setidaknya-tidaknya memuat hal-hal sebagai berikut :
 - a. **Judul**, ditulis dengan jelas menggambarkan isi tulisan.
 - b. **Identitas Penulis**, dimuat di bawah judul tulisan, memuat nama, nama instansi, alamat korespondensi dan e-mail.
 - c. **Abstrak**, ditulis dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris beserta kata kuncinya, Abstrak ditulis dalam 1 alinea berisi masalah, tujuan penelitian, hasil dan saran/usulan.
 - d. **Pendahuluan**, isi pendahuluan di dalam karya tulis ilmiah berisi penjelasan padat dan ringkas tentang latar belakang penelitian, studi pustaka yang mendukung dan relevan, serta tujuan penelitian.
 - e. **Metode Penelitian**, berisikan disain penelitian yang digunakan, populasi/sampel atau subjek/objek, sumber data, instrumen, analisis dan teknisk analisis yang digunakan.
- f. **Hasil dan Pembahasan**, hasil adalah temuan penelitian yang disajikan apa adanya tanpa pendapat penulis, pembahasan adalah argumentasi penulis tentang temuan penelitian serta relevansinya dengan penelitian terdahulu. Pembahasan hasil penelitian diarahkan pada ranah kebijakan untuk semua disiplin ilmu.
- g. **Kesimpulan dan Saran**, berisikan kesimpulan penelitian merupakan informasi penting dan singkat mengenai hasil penelitian yang telah dilakukan. Di dalam kesimpulan penulis memberikan penjelasan apakah hasil akhir penelitian tersebut sama atau berbeda dari penelitian sebelumnya. Kemudian penulis memberikan saran, seperti penelitian tersebut dapat dilanjutkan di masa depan untuk mengetahui hasil yang lebih sempurna, atau hasil penelitian dapat diaplikasikan untuk kepentingan umum.
- h. **Tabel dan Gambar**, tabel, gambar dan grafik dapat terbaca dengan jelas serta diberi penjelasan yang memadai, mudah dipahami dan proporsional.
- i. **Daftar Pustaka**, daftar referensi, kutipan yang dituliskan dalam karya tulis diletakkan di dalam daftar pustaka. Daftar pustaka penelitian sesuai dengan acuan model Harvard (*Harvard Style*).

Contoh penulisan Daftar Pustaka :

Buku

Iwantono, S. 2010. Kiat Sukses Berwirausaha: Strategi Baru Mengelola Usaha Kecil dan Menengah. Jakarta: PT. Grasindo

Hadi, S. 1996. Metodologi Research I. Dalam: Zaluchu, F. *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Yogyakarta: Andi Offset, hal 81-92

Artikel dari Jurnal

Lolong, Dina Bisara. 2011. Analisis Kematian Ibu dan Neonatal *Jurnal Ekologi Kesehatan* 10 (3), hal 298-304.

Bagian di dalam Buku

Baliinger, A dan Clark, M. 2001. Nutrisi, Pengendalian Nafsu Makan dan Penyakit. Dalam: Payne-James, J. dkk. editor. *Dukungan Arti fisial bagi Praktik Klinik*. Edisi kedua. London: Greenwich Medical, hal 225-239.

Laporan

Komisi Eropa. 2004. *Laporan Pendahuluan terhadap Implementasi dari Strategi Pemasaran Internal 2003-2006*. Luxemburg: Unit Publikasi Komisi Eropa.

Konferensi

Fiedelius, H.C. 2000. Miopi dan Penurunan Visual: Aspek Global. Dalam: Lin, L.L.K dkk. editor. *Miopia Terbarukan II: Prosiding Konferensi Internasional ke-7*. Taipei, 17-20 Nopember 1998. Tokyo: Springer, hal. 31-37.

Tesis

Garcia-Sierra, A. 2000. Investigasi Penyebab Ca-Serviks pada Wanita Usia Subur di Perkotaan. Tesis Ph.D, Universitas Indonesia.

Jurnal Artikel Elektronik (yang diunduh)

Gouy, J, Kapa, J, Moka, A & Levante, T. 2010. Parting with the past: is Papua New Guinea poised to begin a new chapter towards development? *Pacific Economic Bulletin* (Online) Edisi 8. Dari: <https://www.humanrights.gov.au/news/stories/freedoms-PNG.pdf> (Diakses 17 September 2014).

Web Page (yang dibaca)

The Guardian. 2013. Bkie crackdown: gangs could be banned from security and gym jobs (Online). Dari: <http://www.theguardian.com/world/2013/oct/16/bkie-crackdown-we-will-crush->

[them-says-queensland-attorney-general-jarrold-beijie-says](http://www.theguardian.com/world/2013/oct/16/bkie-crackdown-we-will-crush-them-says-queensland-attorney-general-jarrold-beijie-says)

(Diakses: 17 September 2014).

4. Prosedur Naskah

Naskah yang masuk hendaknya diterima paling lama 1 (satu) bulan sebelum waktu penerbitan untuk di-review oleh Dewan Redaksi dan reviewer oleh Mitra Bebestari. Naskah diserahkan dalam 2 (dua) media yaitu hardcopy dan softcopy yang keduanya harus memuat isi yang sama. Nama file, judul dan nama penulis naskah dituliskan pada label CD. Pengiriman naskah ke alamat redaksi melalui surat elektronik ke: kebijakan.bappeda@gmail.com

Atau melalui pos ke:

**Dewan Redaksi KEBIJAKAN
Badan Perencanaan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kota
Pematangsiantar Bidang Monitoring
Penelitian dan Pengembangan
Jl. Merdeka No. 4 Pematangsiantar**